

Chavchay Syaifullah

# Generasi Muda Melawan Kemiskinan



ELATAN

Chavchay Syaifullah

# Generasi Muda Menolak Kemiskinan

	PERPUSTAKAAN MAN MUARADUA		
NO.	2600-1007		
TGL.	08-01-2008		
NELAS	PR	RI	110



PENERBIT  
CEMPAKA PUTIH

Hak Cipta dilindungi undang-undang, pada	: Pengarang
Hak Penerbitan pada	: Penerbit Cempaka Putih
Anggota IKAPI Nomor	: 035
Nomor Kode Penerbitan	: 16
Penyusun	: Chavchay Syaifullah
Editor	: Suta Budi dan Fauzi Luthfiyadin
Kontrol Kualitas	: Vina Dwi Laring
Ilustrasi	: Sumadi
Perancang Kulit	: Sumadi
Setting & Lay Out	: Triningsih
Penanggung Jawab Produksi	: * Intam Rus Ernawati * Slamet Riyadi

Peretakan: Macanan Jaya Cemerlang

### EDISI PERTAMA

Cetakan ke-1 : Tahun 2008

Dilarang mencetak ulang, menyimpan dalam sistem retrieval, atau memindahkan dalam bentuk apa pun dan dengan cara bagaimanapun, elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kode file: CP/GENERASI MUDA MENOLAK KEMISKINAN/2008

ISBN 978-979-662-423-2



Macanan Baru, Karanganyar, Kotak Pos 245, Klaten 57438

Telp. (0272) 321641

Fax. (0272) 322012

e-mail: info@cempakaputih.com

# Kata Pengantar

Kehidupan pemuda masa kini tidak lepas dari dunia huru-hara yang lebih menekankan kesenangan hidup. Tengok saja, pemuda-pemuda ibu kota yang hidup di tengah hingar bingar kota besar. Sebagian besar kehidupan pemuda ibu kota dipenuhi paham hedonis yang mementingkan kesenangan semata. Tindakan ini mungkin hanya dilakukan oleh kaum muda "berduit".

Bagaimana pemuda yang "tidak berduit"? Mereka pun pada dasarnya sama. Mereka larut dalam keterpurukan hidup dengan mabuk-mabukan, judi, bahkan tindakan-tindakan kriminal. Di manakah rasa nasionalisme dan patriotisme kaum muda? Pertanyaan ini menghantui kaum muda masa kini di tengah seabad kebangkitan nasional.

Di sisi lain pemuda adalah seorang pekerja keras. Usia muda yang produktif memacunya untuk terus berkarya dan melakukan inovasi-inovasi baru. Tahun demi tahun gerakan pemuda secara luar biasa memberi pengaruh dalam membentuk wajah bangsa Indonesia. Tahun 1908, 1928, 1945, 1966 hingga tahun 1998 pemuda menjadi kontrol sosial dan pengawas laju gerak Indonesia.

Bagaimana pemuda bertahan di era global seperti saat ini? Bagaimana pula pemuda menghadapi masalah kemiskinan yang mengglobal? Dalam buku ini semua diulas tuntas tanpa ada sekat-sekat yang membatasi.

Akhir kata, kiranya buku ini memberi manfaat yang besar terlebih bagi pemerintah dan kaum muda. Apa yang diungkap dan diulas, kiranya mampu memberi motivasi bagi pemuda untuk terus berkarya dan berinovasi bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Klaten, Mei 2008

Penyusun

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Pendahuluan .....	1
Bab I Kemiskinan di Sekitar Kita .....	9
Bab II Pemuda dan Gerakan Menolak Kemiskinan .....	35
Bab III Kepemudaan, Kemiskinan, dan Spirit Kebangsaan .....	47
Bab IV Gerakan Kewirausahaan Pemuda Melawan Kemiskinan .....	67
Bab V Penataan Kebijakan Antikemiskinan Pemuda .....	91
Penutup .....	123
Glosarium .....	129
Daftar Pustaka .....	130

## Pendahuluan

**K**ata "muda" dan "pemuda" menjadi momok dan hantu pemberontakan atau perlawanan paling menakutkan bagi kejumudan sistem dan rezim *status quo* sejak akhir abad XIX di bumi Nusantara. Istilah "muda" sendiri identik dengan semangat kebaruan dari situasi zaman yang statis. Harapan akan kemudaan dan perubahan zaman pada masa lalu adalah *embrio* dari pergerakan kebangkitan nasional (1908), Sumpah Pemuda (1928) hingga titik kulminasi kemerdekaan Indonesia (1945).

Semua itu merupakan satu capaian kebebasan dari cengkeram kejumudan sistem kolonial yang dimotori oleh kepeloporan kaum muda melalui basis dan kesegaran gagasan serta idealisme akan keadilan bersama. Ide-ide idealisme yang dibarengi kemampuan strategis kaum muda awal abad dua puluhan adalah simbol spirit pembebasan dari rasa kegetiran akibat ketidakadilan imperialisme dan kolonialisme.

Kepeloporan pemuda adalah kriteria kejiwaan pemuda itu sendiri. Kemudaan atau kepemudaan tidak sekadar kriteria usia. Kaum muda merefleksikan sikap kejiwaan dan cita-cita luhur kebangsaan. Satu kebaruan cara pandang yang memutuskan hubungan dengan tradisi kejumudan masa lalu, yaitu sikap berani memperjuangkan visi perubahan yang menjanjikan pencerahan masa depan. Akan tetapi, mereka (kaum muda) yang berani mengemban visi perubahan lebih tumbuh dari mereka yang tidak digayuti beban masa lalu. Meminjam pandangan Hatta, dengan kemampuan untuk membebaskan diri dari hipnosa kolonial, generasi baru kaum terdidik lebih mungkin mengambil inisiatif untuk membangkitkan kekuatan rakyat dan menyediakan basis teoretis bagi aksi-aksi kolektif.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila orang-orang muda ada di balik tonggak-tonggak terpenting pembangunan bangsa. Guru-guru belia mulai mengampanyekan gerakan kemajuan lewat pers

vernakular dan perkumpulan Mufakat Guru pada akhir abad XIX, anak-anak STOVIA (nama sekolah Belanda) memelopori gerakan kultural Budi Utomo pada tahun 1908. Pemuda-pemuda jebolan berbagai sekolah modern termasuk Samanhudi lulusan sekolah "Ongko Loro" (*Tweede Klasse School*) mengembangkan Sarekat Islam sejak tahun 1912 sebagai wadah pergerakan politik *proto-nasionalisme*.



Sumber: *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*  
Pemuda-pemuda STOVIA yang menjadi pelopor gerakan Budi Utomo.

Para mahasiswa mengembangkan Perhimpunan Indonesia, kelompok-kelompok studi pergerakan serta partai-partai politik nasionalis sejak tahun 1920-an. Pemuda pelajar menggalang Sumpah Pemuda sebagai kode pembentukan blok nasional pada tahun 1928, bahkan revolusi kemerdekaan tahun 1940-an dilukiskan Ben Anderson sebagai revolusi pemuda.

Roh atau jiwa dan cita-cita di ataslah yang kemudian membunyikan lonceng revolusi secara serentak berdentang ke seluruh Nusantara. Hal ini menjadi momentum bangkitnya pemuda Nusantara menjadi satu kesatuan politik dalam bingkai nasionalisme yang bersandar pada perasaan sama, yaitu keterjajahan dari bangsa asing. Ikatan solidaritas yang diikat oleh *lingua franca* kemudian meletup bagai bom molotov membunyikan lonceng kematian para kolonialis di negeri ini. Nasionalisme yang diusung kaum muda seperti Bung Karno, Hatta, Sjahrir, Natsir, dan karib seperjuangan adalah bentuk semangat perlawanan yang bersandar pada cita-cita etis, yaitu kekitaan yang merata, kesetaraan, dan kedaulatan suatu bangsa. Bentuk kesatuan politik dalam nasionalisme yang diusung kaum muda sama seperti yang dilukiskan Benedict Anderson sebagai cita-cita mengenai komunitas terbayang, "*imagined community*". Rasa keterjajahan bergelora menjadi kotak pandora kemerdekaan 1945 yang diproklamasikan Soekarno-Hatta.

Selengah abad lebih Indonesia merdeka. Ketidakadilan masih melokut dalam tubuh bangsa. Ketika rakyat tidak beranjak dari predikat miskin, kita harus mempertanyakan peran negara sebagai pengayom warga dan partisipasi elemen-elemen bangsa dalam membangun kesejahteraan bersama yang dipupuk para *founding fathers* melalui jalan terjal nan berdarah-darah. Misalnya pemuda pada masa lalu sebagai penggerak ide pembebasan dan penyogaran harapan kebangsaan Indonesia sekaligus pembakar semangat perlawanan akan ketidakadilan. Singkatnya, ia (pemuda) adalah agen perubahan (*agent of change*).

Semangat pengawal keadilan sosial seakan mengalami ke-redupan di tengah meruahnya budaya hedonisme, konsumerisme, puritanisme, dan krisis ekonomi politik yang menyebabkan frustrasi sosial dan punahnya harapan. Sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan semangat, pemuda pembebasan dan menjadi salah satu beban negara. Ini sungguh kontradiktif dengan pemuda pada awal abad dua puluhan lalu.



Sumber: [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)

Di tengah era kemajuan zaman, beberapa pemuda justru mengalami penurunan peran, bahkan menjadi salah satu beban negara.

Kemiskinan tidak berakar pada masalah yang tunggal. Artinya, kemiskinan tidak disebabkan oleh kekeliruan distribusi keadilan oleh sebuah lembaga negara semata. Akan tetapi, banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan terjadi.

*Pertama*, kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebabkan oleh budaya dan mentalitas kemandirian ekonomi yang tidak terbangun di tingkat masyarakat. *Kedua*, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kekaburan penyelenggaraan distribusi keadilan oleh lembaga negara. Singkatnya, kemiskinan struktural bisa dilihat dari maraknya penyelewengan anggaran negara untuk kepentingan publik melalui korupsi. *Ketiga*, kemiskinan natural. Kemiskinan yang

diakibatkan oleh kondisi fisik masyarakat tidak mumpuni mengembangkan perdayaan ekonomi masing-masing. Misalnya kecacatan fisik yang diderita seseorang.

Beberapa faktor di atas bersaling silang dalam dunia kepemudaan sehingga menenggelamkan cita-cita dan imajinasi politik kaum muda. Ironisnya, kaum muda justru terperosok tenggelam dalam opium kebudayaan masif, narkoba, kriminalitas, dan sejenisnya yang menjalar melalui jejaring tanda dan bahasa. Metafora kaum muda sebagai *agent of change* retak bagai labirin yang sulit untuk ditangkap dari mana muasal dan muara krisis ini.

Mozaik perjalanan fajar kebebasan Indonesia telah melewati fase negara *post-otoritarian*. Namun demikian, sebagai suatu *nation-state* Indonesia menghadapi suatu problema yang amat terkait dengan "ingatan". Ingatan tentang proses berkembang dan menguatnya serta terbentuknya formasi negara yang meninggalkan perjalanan wacana kebangsaan warga-negaranya. Ingatan traumatik tentang perasaan individu yang pernah terbelenggu dalam formasi negara despotik tanpa pernah mendapatkan hak-hak autentiknya sebagai warga negara.

Ada sesuatu yang harus kita tanyakan ulang, apakah kebebasan formal yang telah kita alami saat ini mampu menjadi kebebasan autentik? Kebebasan autentik yang mampu memutuskan dirinya dari formasi berpikir masa lalu, masa berjayanya negara, dan lumpuhnya ekspresi kebangsaan dan kewargaan. Apakah sebaliknya, semua itu akan terputus sebagai konsekuensi dari hukum sejarah? Oleh karena itu, arus dialektika tidak selalu menunjukkan tahap perkembangan dirinya dalam dimensi kontinuitas, tetapi suatu garis anakronitas. Hal ini tampak pada setiap momentum sejarah yang tidak selalu berbanding lurus dengan cita-cita masa lalu. Nasionalisme kepemudaan menjadi pelatuk strategis untuk mengobarkan api pertawanan atas kolonialisme dan imperialisme. Kini sendi-sendi itu tercerai-berai oleh kompresi ruang dan waktu yang diembuskan globalisasi. Lumpuhnya elan vital kebangsaan merapuhkan sendi-sendi ikatan sosial, solidaritas, toleransi, dan kekitaan yang merata sebagai maklumat nasionalisme pada masa letih melawan penjajahan.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 merupakan awal babak perjalanan Indonesia dalam mewujudkan mimpi kesejahteraan dan kesentosaan bersama. Sebuah mimpi yang berawal dari psikologisme terjajah atas ketidakadilan dan ketimpangan imperialisme dan kolonialisme asing atas bumi Nusantara.

Mimpi dari gerakan pembebasan *founding fathers* bangsa Indonesia hingga kini masih berada dalam menara gading. Hal ini karena kemerdekaan tidak diikuti transformasi sosial dan perbaikan kehidupan layak bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, kini para pemuda seolah-olah tengah memasuki lorong-lorong gelap harapan yang penuh kantong-kantong ketidakpastian kerja dan aktualisasi diri.

Ketika kemiskinan dan ketidakadilan menjadi sesuatu yang tidak terenyahkan di Indonesia, kita senantiasa mempertanyakan kembali spirit nasionalisme dan keaktifan elemen-elemen bangsa yang ada. Misalnya pemuda yang semula menjadi motor pembebasan negara dari sindrom keterbelakangan bangsa karena ketidakadilan penjajahan mulai mengendur dan menipis, bahkan nyaris tidak berfungsi sebagai agen transformasi kultural dan pengawal distribusi keadilan pascakemerdekaan.

Indonesia sebagai kesatuan politis yang diidealkan pada masa lalu, kini tercerabut akibat dari proses pembodohan dan pemiskinan generasi muda saat ini. Meningkatnya angka pengangguran, putus sekolah, dan problem *deprivasi sosial* lainnya menyulut bara konflik antaretnis, agama, serta meningkatnya angka kriminalitas dan kekerasan sosial.



Sumber: [20 Tahun Indonesia Merdeka](#)

*Kemerdekaan Indonesia merupakan awal perjalanan dalam mencapai cita-cita bangsa.*



Sumber: [www.kompas.com](#)

*Pengangguran adalah bukti tercerabutnya nasionalisme bangsa.*

Hal tersebut merupakan cerminan dari tercerabutnya nilai-nilai heroisme dan patriotisme kaum muda dalam mengisi kemerdekaan.

Akhirnya, jargon nasionalisme hanya berada di ruang hampa dan kosong. Padahal, Indonesia sebagai sebuah komunitas terbayang (*imagined community*) semestinya mampu diisi dengan suatu cita-cita etis mengenai kedaulatan (*sovereignty*) dan kesejahteraan serta tegaknya prinsip kesetaraan dan kesamaan.

Situasi ketidakpastian ekonomi politik yang berkepanjangan menjadikan nilai-nilai nasionalisme kepemudaan yang identik dengan semangat patriotisme dan heroisme dalam mengisi kemerdekaan, semakin tercerabut. Contoh nyata di beberapa daerah Indonesia seperti Kalimantan, ratusan bahkan ribuan anak muda rela menjadi tentara Hizbul Wathon Malaysia karena sudah terlalu apatis dengan masa depan republik ini.

Dalam konteks inilah revitalisasi peran generasi muda menjadi penting, dalam rangka membangun etos kepemimpinan yang dibarengi dengan kemampuan *entrepreneurship*. Semua itu mampu menjadi alternatif bagi tumbuhnya etos kerja mandiri guna mencapai kedaulatan generasi pemuda dalam mengarungi situasi globalisasi mutakhir.

Selain itu, pembenahan pada wilayah kultur dan pendidikan terkait dengan *skill* atau kemampuan mengorganisasi serta merekatkannya dalam ikatan sosial organisasi fungsional menjadi penting pula dalam rangka membangun sumber daya, baik di tingkat daerah maupun perkotaan. Hal ini bertujuan agar para generasi muda lebih tercerahkan dan memiliki kemampuan untuk mengelola *resources* ekonomi politik yang ada di setiap wilayah masing-masing. Hasilnya, arus urbanisasi yang selama ini melonjak fantastis ke pusat perkotaan dapat ditekan. Hal ini terjadi sejauh elan vital kebudayaan melalui jalur pendidikan *skill* dan organisasi dapat dibarengi dengan tersedianya akses informasi terbuka bagi setiap generasi yang berada dalam masyarakat pedesaan.

Selain dengan cara tersebut, adanya program dan bimbingan serta sokongan dari negara dalam merealisasikan cita-cita pembangunan manusia muda mampu mencetak generasi muda sebagai *pioneer* pembangunan ekonomi pedesaan. Hal ini mengingatkan kita pada

pendapat ekonom senior, Sri Edi Swasono. Beliau berpendapat bahwa kemiskinan struktural dan kultural harus diatasi dengan jalan kebudayaan dan pendidikan bagi Indonesia ke depan. Hal ini bertujuan agar kemiskinan dan kebodohan tidak terus menjalar di tengah masyarakat, terutama kalangan muda karena tidak tersedianya kesempatan pekerjaan, pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Meminjam istilah Amartya Sen, demokrasi yang sedang dirungsi dunia ketiga sering mendapat kendala dalam menciptakan iklim kebebasan karena tidak tersedianya akses dan kebutuhan dasar (*human basic needs*). Oleh karena itu, proses demokratisasi ekonomi penting pula untuk menopang kebebasan. Pembangunan demokrasi politik yang menyajikan kebebasan harus sejalan dan setali dengan cita-cita pembangunan ekonomi. Tanpa hal itu, demokrasi hanya menghasilkan kebebasan yang tidak produktif dan pemborosan belaka.

Hal ini pun terkait dengan maklumat dan cita-cita para *founding fathers* kita sejak enam puluh tahun silam. Hak-hak sosial warga negara, terutama "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Maklumat tersebut adalah isyarat bahwa membangun *resource* sosial di tengah kaum muda menjadi penting sebagai tonggak kemandirian Indonesia ke depan dan sebagai paralel dengan cita-cita nasionalisme kerakyatan yang digagas pada masa leleh merebut kemerdekaan.

Berhak atas pekerjaan berarti suatu sikap imperatif menolak pengangguran. Penghidupan yang layak berarti suatu tekad mulia menghapus kemiskinan. Peran itu tidak hanya dimainkan oleh negara, tetapi juga generasi muda sebagai bagian dari *civil society*.



Foto: Sunil

Adanya bimbingan dan sokongan kepada generasi muda mampu mencetak generasi bangsa sebagai pionir pembangunan.

Berdasarkan beberapa argumen di atas kita dapat melihat pentingnya revitalisasi peran generasi muda dalam pembangunan ekonomi nasional. Revitalisasi peran pemuda dapat ditempuh melalui berbagai strategi dan realisasi program, sesuai dengan cita-cita dasar konstitusi kita, yaitu bertujuan menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, membangun mental kepemimpinan dan kemampuan *entrepreneurship* kalangan muda sangat penting untuk menopang semangat dan cita-cita nasionalisme kepemudaan yang mandiri, bebas, dan emansipatif. Bukankah sejarah telah membuktikan bahwa dalam rengkuh pergerakan kepemudaan, ketidakadilan dan ketimpangan yang dilahirkan kolonialisme dan imperialisme mampu digusur dari bumi Nusantara?

Atas dasar beberapa pokok pikiran di atas, buku ini sengaja ditulis untuk menggairahkan elan vital kepemudaan dan cita-cita nasionalisme kepemudaan yang kini terhempas oleh zaman. Buku ini berusaha menyoroti dinamika kemiskinan dan relasinya dengan pembangunan mentalitas serta etos kerja kepemudaan. Selain itu, buku ini akan menjelajahi seputar klasifikasi, faktor, dan indikasi umum kemiskinan yang ada di Indonesia. Terkhusus kemiskinan generasi muda yang tampak pada semakin meningkatnya pengangguran, tingkat konflik, dan kriminalitas, bahkan fenomena bunuh diri yang menimpa generasi muda.

Selain itu, buku ini akan mengungkapkan secara teoretis hubungan antara negara (nasionalisme) dan kepemudaan, kebudayaan dan sistem pendidikan serta upaya-upaya strategis dalam menanggulangi masalah kemiskinan, baik di tingkat daerah maupun perkotaan. Inisiatif dan pengayaan lewat sistem kerja sama elemen kepemudaan dengan ragam solusi dan kebijakan diharapkan dapat ditempuh, baik oleh negara maupun *civil society* dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Hal itu secara praktis membutuhkan program-program riil, seperti pelatihan dan pengkajian tentang pentingnya mengelola sumber daya yang ada di setiap daerah. Diterapkannya berbagai metode guna membangun mental dan etos kerja kepemudaan. Selain itu, diperlukan keterlibatan negara dalam menyediakan akses pekerjaan dan kesempatan, serta terbukanya akses informasi hingga tingkat daerah.

## **Konsepsi Umum Kemiskinan**

Konsepsi umum mengenai kemiskinan biasanya terkait dengan masalah ketiadaan sumber daya ekonomi, sosial kultural, dan politik masyarakat tertentu. Ketiadaan modal sosial ekonomi inilah yang kemudian membatasi gerak aktivitas dan aktualisasi diri setiap individu dan dinamika sosial dalam masyarakat. Masyarakat manusia dalam realitas sosial politiknya sangat ditentukan oleh basis-basis sosial ekonomi yang kuat dalam rangka membangun serta mengembangkan diri ke arah realisasi segala aktus dan potensinya. Akan tetapi, sejak modus-modus produksi berubah dan arus komoditas melebihi yang diramalkan Marx pada abad XIX lalu, masyarakat manusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Keadaan tersebut menuntut kerja keras atau etos kerja maksimal dengan prasyarat tertentu yang memungkinkan aktualisasi itu terjadi, sejauh ditopang oleh kemampuan diri atau kapasitas individu baik secara kultural maupun struktural.

Pengandaian-pengandaian semacam ini terkait dengan kondisi sosial politik dalam suatu negara atau tatanan masyarakat yang ikut menyokong pembangunan mental dan ekonomi. Terlebih sejak kapitalisme menjadi landasan pijak bagi sistem ekonomi (yang dalam istilah sosiolog modern Max Weber; mengandaikan sistem berbasis dalam etika protestantisme). Secara simbolik masyarakat manusia dituntut mampu mengikuti pola dan struktur masyarakat yang terus-menerus berubah berdasarkan tipe-tipe ideal rasionalitas.

Tipe-tipe ideal tersebut berkembang seiring dengan tahapan sejarah dan rasionalitas tertentu dalam masyarakat yang dihayati, baik secara kultural maupun sosial. Misalnya kepercayaan masyarakat pada mitos-mitos, Agama dan adat istiadat yang dihayati sebagai simbol kehidupan dalam sejarah perkembangan masyarakat sangat menentukan bentuk atau pilihan rasionalitas masyarakat tertentu, termasuk dalam pilihan

watak kepemimpinan dan tindakan simbolik lainnya. Sebagaimana tampak ketika masyarakat Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan. Saat itu masyarakat sangat mengidolakan Bung Karno sebagai pemimpin zamannya. Kepercayaan dalam kriteria ini disebut sebagai kriteria rasionalitas berbasis karismatis. Pada tahap mits ini setiap orang memercayai benda atau individu pada daya karisma yang memancar dari figur tersebut. Meskipun dalam arti tertentu dianggap rasional sesuai zamannya. Akan tetapi, pada tahap selanjutnya masyarakat manusia terus berubah ke arah kepercayaan pada nilai yang memiliki basis epistemis dalam penghayatan, baik keagamaan maupun budaya.



Sumber: Lukisan Sejarah  
*Kepercayaan masyarakat masa lalu kepada Bung Karno merupakan satu bentuk rasionalitas karismatis.*

Sebagaimana tampak ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang secara kodrati memiliki jangkauan nilai universal di dalamnya. Bentuk rasionalitas macam ini menurut Weber disebut sebagai rasionalitas nilai. Pada era kapitalisme lanjut kepercayaan itu dilengkapi dengan tipe rasionalitas lainnya. Pada tahap ini manusia mendasarkan pilihan-pilihan hidup pada kriteria nilai maupun tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini pragmatisme dan utilitarianisme bukan dipandang secara artifisial melainkan sebetuk etika yang dihayati. Sebuah tindakan dianggap bernilai sejauh mencakup aspek kegunaan dan efektivitasnya bagi kehidupan. Rasionalitas semacam ini sering disebut sebagai rasionalitas tujuan.

Model-model di atas merupakan bagian dari sketsa atau semacam gambaran umum mengenai kesadaran masyarakat yang ikut menentukan relasi, modus, dan interaksi di dalamnya. Dalam arti tertentu ikut pula menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat sejauh

kriteria itu berlangsung dalam hukum sejarah yang ditopang oleh kemampuan rasionalitas masyarakat. Fenomena kemiskinan, deprivasi sosial, dan kondisi-kondisi ketidakadilan dalam sebuah tatanan politik masyarakat juga ditentukan oleh pilihan-pilihan ideal tersebut. Ketika nilai atau pilihan rasionalitas itu berbenturan dengan hukum sejarah serta perkembangan modus dan arus komoditas dan laju kebudayaan yang kian fantastis, masyarakat akan dihadapkan pada problem sosial ekonomi baru dalam realitas yang bertentangan dengan segala perubahan dan pilihan sesuai dengan hukum sejarah.

Dalam suku-suku tertentu yang jauh dari modernitas, masyarakat manusia telah memiliki tatanan sosialnya sendiri. Meskipun gejala dan kesenjangan belum berlangsung secara masif dan sistematis, tetapi masalah kemiskinan dan kesenjangan selalu ada, walaupun dalam kadar dan porsi yang lebih kecil. Seiring laju modernitas, formasi sosial ekonomi pun mengalami perkembangan. Perubahan modus produksi, transaksi lintas benua, kecanggihan teknologi dan informasi yang cepat memunculkan masalah kesenjangan dan kemiskinan terutama pada masyarakat manusia yang hidupnya belum mencapai tahap maksimal dalam pilihan rasionalitas. Kondisi itu menyebabkan munculnya problem deprivasi sosial, frustrasi, dan bunuh diri massal dalam masyarakat yang belum siap menghadapi tantangan globalisasi. Fenomena negatif ini tampak di negara-negara *post-komunis* atau negara-negara bekas otoritarian. Terlebih pada negara yang masih mengalami transisi dari otoritarian ke demokratis, seperti Indonesia.

Dengan demikian, kemiskinan dalam arti tertentu merupakan masalah kemanusiaan paling purba dalam sejarah perkembangan masyarakat. Kata miskin sendiri secara sederhana berarti kondisi atau keadaan tidak berharta (harta seseorang yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari), serba kekurangan. Lawan dari kata itu adalah kaya yang identik dengan gelimang harta atau kondisi seseorang yang berkecukupan dan kelebihan dalam mencukupi kebutuhan pokok atau standar hidupnya.<sup>1</sup> Kondisi kemiskinan merupakan masalah yang sampai hari ini tidak kunjung selesai sebab memiliki problematika dan

---

<sup>1</sup> Pius A. Partanto, 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Anika, hal. 27.

dinamika tersendiri dalam masyarakat. Terlebih kemiskinan terkait dengan krisis sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu tatanan politik masyarakat.

Dalam diskursus negara bangsa (*nation-state*) masalah kemiskinan selalu menjadi tema pokok dalam perbincangan filsafat politik mutakhir. Perbincangan itu terkait masalah demokrasi dan keadilan sosial. Problem sentral dalam demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan pada saat yang sama akan berbenturan dengan masalah kesenjangan sosial antara hak dan kewajiban individu dengan negara dalam merealisasikan cita-cita keadilan. Filsuf seperti Jhon Rawls menjelaskan bahwa masalah pokok dalam proses deliberasi politik adalah masalah distribusi keadilan dan hak-hak individu. Terutama masalah yang disebabkan oleh ketiadaan kondisi netralitas dalam pengambilan suatu keputusan yang masih didominasi oleh kepentingan individu dan golongan. Belum lagi masalah hak-hak konstitusional warga negara yang masih tumpang tindih antarbeberapa kepentingan, terlebih dalam kondisi ketidakpastian hukum dan konstitusi. Subjek-subjek politik dalam tahap ini masih dianggap sebagai individu yang belum sepenuhnya menempatkan diri dalam ruang publik politik. Terutama yang terkait dengan identitas baik agama maupun etnisitas. Hal-hal tersebut masih menguat dalam diskursus politik mutakhir.

Dalam kondisi itulah benturan dan konflik akan terjadi. Hal ini karena setiap individu tidak dapat melepaskan identitas dan atributnya di ruang publik politik. Belum lagi kesadaran hukum dan hak asasi manusia belum tertanam karena ketidakpastian konstitusi. Benturan dan konflik kepentingan itulah yang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat dalam ruang publik sehingga kondisi kesamaan hak dan kewajiban tidak sepenuhnya terjadi. Kemiskinan pun merebak, angka pengangguran meningkat, angka kriminalitas di kalangan pemuda tiap tahun meroket seiring dengan rasa ketidakpastian. Harapan dan optimisme masyarakat terutama kaum muda perlahan punah ketika semua nilai dan semangat nasionalisme tidak berkobar. Rentetan pesimisme dan lemahnya mentalitas disebabkan oleh krisis ruang publik politik yang tidak mencerminkan keputusan dan kebijakan yang adil.

Dalam kondisi keputusan politik yang tidak netral janji keadilan hanya menjadi buaian kosong pada siang hari. Akibatnya, negeri ini menghadapi tantangan moral dan politik dalam membangkitkan kembali semangat nasionalisme yang berbasis pada solidaritas, rasionalitas, dan kedaulatan individu yang kukuh dengan pilihan idealismenya. Problem kesenjangan yang melahirkan kemiskinan, diskriminasi, dan tirani mayoritas tidak akan terus berlangsung.<sup>2</sup>



Sumber: *Reputaka*, 19 Mei 2003

*Meningkatnya angka kriminalitas merupakan satu tantangan moral bangsa dalam membangkitkan nasionalisme.*

Melihat kenyataan itu, kita perlu menekankan kembali proses deliberasi politik yang mengandalkan tegaknya hak-hak konstitusional warga negara, termasuk jaminan hak ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Senada dengan Rawls, Habermas (filsuf kontemporer asal Jerman) mengungkapkan bahwa proses deliberasi politik harus dilandaskan pada konstitusi ruang publik yang mencerminkan keadilan, rasional, kesamaan, dan kesetaraan. Akan tetapi, ia menampik bahwa identitas dan atribut yang ada dalam komunitas selalu negatif. Dalam arti tertentu komunitas dapat menjadi basis nilai dan menyokong etos kerja di tengah komunitas itu sendiri. Dengan demikian, Habermas sesungguhnya berusaha menyintesis antara liberalisme dan komunitarianisme yang selama ini keliru dipahami. Penekanan pada individu dalam arti tertentu akan menegaskan kebebasan dan kedaulatan. Akan tetapi, pada saat yang sama ekstensifikasinya, terutama dalam konteks hak milik ketika individu mengalami keluasan di bidang ekonomi sebagaimana dalam liberalisme, akan memunculkan kesenjangan dan eksploitasi atas individu lain yang tidak mengalami perkembangan diri. Kesenjangan ini akan tampak ketika di satu sisi individu mengalami akumulasi ekonomi,

<sup>2</sup> John Rawls, 1991. *Political Liberalism*. Columbia: Columbia University Press, hal. 11-12.

tetapi di sisi lain individu lain justru lebih bergantung bahkan nyaris tidak mengalami kesulitan akses ekonomi politik, terlebih ketika arus finansial yang kini tidak lagi mudah untuk dideteksi validitasnya.

Realitas dan kesenjangan itu lampak ketika masyarakat modern dengan segala kecanggihan teknik dan informasi memanipulasi data dan kesadaran sehingga muncul kesenjangan antara sektor riil dan sektor finansial yang bergerak di pasar modal. Oleh karena itu, Habermas melihat komunitas penting sebagai basis nilai dan solidaritas. Individu dalam komunitas dapat saling berdialog dan pengertian di antara satu dan lainnya. Kemungkinan dialog itulah yang melahirkan *raso* inskasi komunikasi yang menjadi basis dalam diskursus ruang publik politik. Meskipun individu dalam ruang publik membawa identitasnya, hak-hak konstitusional setiap warga negara tetap akan terjamin sejauh dilandasi pada kriteria dan kesepakatan-kesepakatan yang rasional tanpa tekanan dan dominasi. Dalam ideal ruang publik semacam ini fenomena kemiskinan, kesenjangan, nasionalisme, dan sejenisnya dapat diperbincangkan sehingga melahirkan kebijakan dan konstitusi yang mencerminkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kebebasan individu.

Terkait dengan itu, Rawls justru menambahkan alternatif lain. Meskipun dalam arti tertentu memiliki kesamaan, tetapi dalam beberapa hal secara prosedural lebih radikal mengenai ideal ruang publik yang ia bayangkan. Dalam konteks itu ia lebih menekankan individu daripada komunitas. Ia melihat bahwa dalam proses pengambilan keputusan dalam ruang publik mencitrakan tipe ideal, yaitu tercapainya netralitas sebuah keputusan yang mengandalkan sebuah proses keputusan berdasarkan kondisi kesamaan dan kesetaraan. Individu dalam konteks ini dibayangkan sebagai individu yang berwajah pucat pasi atau lepas dari segala atribut dan identitas, kepentingan, dan sejenisnya saat proses pengambilan keputusan politik. Dengan kata lain, individu yang berada dalam posisi asali (*original position*).

Dalam posisi itulah keputusan dapat bersifat netral dan *fair*. Tipe ideal semacam ini merupakan bentuk modular atau prosedural bagi tercapainya ide keadilan yang berdasarkan pada ide masyarakat

sebagai sebuah sistem kooperasi yang *fair*. Dalam kondisi itulah gejala dan ketidakadilan sosial dalam bentuk kemiskinan dapat diminimalisasi dalam rangka demokratisasi dan revitalisasi peran kaum muda di tengah ancaman sekaligus kemajuan zaman.<sup>3</sup>

Kondisi yang digambarkan Rawls dan Habermas di depan memiliki kemiripan dengan sistem atau tatanan politik yang sedang terjadi di Indonesia. Berbagai keputusan publik di parlemen lebih mencerminkan aspirasi kelompok elite tertentu, terutama soal kebijakan kenaikan harga yang turut menyumbang angka kemiskinan dan masalah lain menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berbagai keputusan timpang tersebut tidak mencerminkan keadilan, tetapi merupakan bentuk keputusan yang tidak pernah netral dari kepentingan individu dan kelompok yang dibawa setiap individu dalam parlemen. Oleh karena itu, ideal dan prosedur demokrasi yang semestinya ditempuh tidak pernah mencapai hasil maksimal, sebaliknya hanya menjadi etalase politik di parlemen. Parlemen sebagai salah satu ruang publik politis tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yaitu tegaknya hak-hak konstitusional warga negara dalam ruang publik politis.

Fenomena di atas merupakan titik pijak refleksi kita atas kenyataan pahit mengenai perubahan formasi sosial ekonomi masyarakat. Salah satunya masalah kemiskinan menjadi problem utama yang terus diperbincangkan dalam transisi politik mutakhir. Hari ini kemiskinan bahkan semakin terlihat di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Istilah "negara berkembang" merujuk pada negara-negara



Sumber: [www.kemkominfo.go.id](http://www.kemkominfo.go.id)

Berbagai aksi demo muncul sebagai akibat dari keputusan timpang yang tidak mencerminkan keadilan.

<sup>3</sup> Ibid. hal. 14-15.

"miskin". Dengan karakter negara yang belum sepenuhnya mengalami demokratisasi, negara-negara berkembang seperti Indonesia berada dalam proses pembenahan dari kondisi otoritarianisme masa lalu. Negara post-otoritarianisme seperti Indonesia sampai hari ini masih dihantui bayang-bayang ingatan masa lalu. Reformasi yang bergulir sepuluh tahun silam sampai hari ini masih jauh dari harapan. Akibatnya, problem kesenjangan sosial ekonomi sebagai warisan rezim lama masih menjadi simptom krisis yang terus-menerus didiagnosis dalam rangka deliberasi politik.

Oleh karena itu, problem paling purba (kemiskinan) ini ada dalam keseharian masyarakat kita. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa yang sedang mengalami transisi dari negara demokrasi ke negara yang lebih sejahtera dengan segala capaian teknik dan industrinya. Negara-negara tersebut sering dianggap sebagai negara kesejahteraan *welfare state*, meskipun perkembangan mutakhir etika krisis energi dan resesi ekonomi yang terjadi di Amerika telah membuat panik perekonomian dunia. Dalam situasi ini bayang-bayang kemiskinan semakin menghantui hari-hari masyarakat Indonesia. Ratusan bahkan ribuan anak muda di negeri ini terhempas oleh laju zaman yang semakin melabrak mimpi dan cita-cita luhur kebangsaan kaum muda yang pernah berkobar pada tahun 1908 silam.

Pada bab ini kita akan melihat sejauh mana konsepsi kemiskinan dapat direfleksikan terkait dengan faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin, meskipun dalam beberapa segi sedikit banyaknya di atas telah kita singgung. Selain itu, faktor-faktor struktural dan kultural akan dilihat sejauh mana ia menyelubungi lapisan hidup masyarakat, terutama merasuki pemuda di negeri ini, yang umumnya tidak hanya mengalami gejala frustrasi sosial, tetapi lebih dari itu yaitu hilangnya harapan dari ketidakpastian ekonomi politik Indonesia mutakhir.

Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus. Ini bukan karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan masalah ini masih ada di tengah-tengah masyarakat bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan

krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia. Meskipun berbagai cara dan solusi telah ditempuh untuk menanggulangi kemiskinan, upaya pengentasan kemiskinan sampai hari ini belum berjalan efektif. Pengkajian konsep kemiskinan merupakan upaya positif guna menghasilkan pendekatan dan strategi yang tepat dalam menanggulangi masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Berdasarkan pokok pembahasan ini, kita dapat bercermin dari potensi dan peluang yang ada pada elan vital pemuda sebagai penggerak perubahan.

Pembahasan pokok masalah kemiskinan di tingkat kepemudaan akan bermuara pada penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan masalah kemiskinan tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah global, yang tidak hanya mendera kalangan masyarakat umum. Akan tetapi, yang mengkhawatirkan justru ketika kemiskinan mempengaruhi semangat dan menghambat cita-cita kaum muda ke depan. Setidaknya melalui berbagai strategi dan pemetaan yang akan kita lakukan, kaum muda dapat bangkit dari tidur lelap akibat terpaan-terpaan heteroglosia zaman yang meruah dengan hedonisme, konsumerisme, dan puritanisme yang membuyarkan cita-cita emansipatif pemuda di negeri ini.

Sampai saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih sangat besar, bahkan cenderung meningkat menyusul gejolak resesi ekonomi dunia, walaupun dalam batas tertentu mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini sekitar 37,17 juta jiwa atau 16,58% dari total 222 juta jiwa penduduk Indonesia. Angka-angka itu masih tidak statis. Oleh karena itu, adanya kemungkinan pe-



Sumber: Kompas, 27 Mei 2008  
**Arsyarakat miskin Indonesia**

ningkatan dan penurunan. Dalam konteks ini pemerintah menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 pemerintah menargetkan pengurangan kemiskinan hingga 8,2%. Angka itu lebih besar daripada yang ditetapkan *Millenium Development Goals* (MDGs), yaitu berkurangnya angka kemiskinan setengah dari tahun 2015. Jadi, kemiskinan merupakan persoalan yang harus diselesaikan.<sup>4</sup>

Selain rencana, angka penanggulangan kondisi kemiskinan yang tampak dalam data tersebut memengaruhi dinamika kemiskinan baik secara teoretis maupun praktis, sesuai dengan konteks dan relasinya dengan struktur dan basis kultural yang terus berubah dalam realitas masyarakat. Oleh karena itu, selain melihat kemiskinan secara konseptual yang lebih umum, kita juga patut melihat beberapa konsep yang lebih spesifik terkait dengan karakteristik dan tipe-tipe tertentu mengenai kemiskinan.

## Beberapa Konsep tentang Kemiskinan

Secara konseptual kita dapat melihat bahwa kemiskinan merupakan konsep yang bermatra multidimensional. Konsep multidimensional menunjukkan bahwa dimensi kemiskinan terkait dengan aspek ekonomi, politik, dan sosial psikologis. Aspek-aspek ini memiliki keterkaitan satu sama lain dalam dinamika konseptual mengenai kemiskinan.

Dalam konteks ini secara ekonomi kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang atau individu. Aspek ekonomi lebih ditentukan oleh sumber daya, basis-basis produksi, dan produktivitas kerja seseorang dalam menghasilkan uang, modal, dan jaringan. Akan tetapi, dalam konteks ini sumber daya tidak hanya menyangkut aspek finansial, tetapi juga semua jenis kekayaan (*wealth*)

---

<sup>4</sup> BPS, data 2007

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Dalam hal ini individu dan kelompok dilihat dari proses pengembangan dirinya secara ekonomi dalam relasi ekonomi.

Berdasarkan konsepsi tersebut kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki seseorang melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Contoh garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2.100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari. Selain itu, kita dapat melihat tipe kemiskinan tersebut dalam konteks kekurangan akses pada pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang menjadi hak dasar manusia.

Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Dalam hal ini kekuasaan merupakan tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Akses pada kekuasaan sulit dicapai individu atau kelompok, terlebih dalam kondisi kemiskinan yang absolut. Hal ini disebabkan akses pada kekuasaan sangat mensyaratkan mobilitas ekonomi dan sosial yang saling terkait dan menopang.

Kemiskinan secara sosial psikologis merujuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Kemiskinan ini lebih banyak disebabkan oleh lemahnya faktor negara dalam mengatasi masalah struktur ekonomi politik masyarakat.

Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Hal ini mengingatkan kita pada teori "kemiskinan budaya" (*kultural poverty*)

yang dikemukakan ekonom dan ahli kemiskinan Amerika Oscar Lewis, Oscar Lewis menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul akibat dari adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, dan kurang memiliki etos kerja. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap kalangan pemuda karena kultur keluarga atau masyarakatnya yang tidak melestarikan nilai atau etos kerja maksimal. Kemiskinan ini sering disebut kemiskinan kultural.

Faktor eksternal datang dari luar kemampuan seseorang, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang memanfaatkan sumber daya. Kemiskinan model ini sering diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan karena "ketidakmauan" si miskin untuk bekerja (malas), tetapi "ketidakmampuan" sistem dan struktur sosial politik dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin bekerja.

Problem kemiskinan ini terkait dengan lemahnya visi politik dan kenegaraan suatu bangsa. Sebagaimana sedikit telah kita singgung di atas bahwa dalam ketiadaan kepastian hukum dan ekonomi masyarakat akan lebih mungkin terjerumus dalam lubang kemiskinan terlebih wabah korupsi dan manipulasi birokrasi yang tidak pernah tuntas dari tahun ke tahun.

Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional lebih tepat digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia, terutama terkait dengan pembangunan etos kerja di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa. Mengapa demikian? Di pundak pemuda adalah masa depan bangsa ini diemban. Terlebih di tengah negeri



Sumber: Kompas, 27 Mei 2008

*Mahalnya harga BBM di tengah ketidakmampuan masyarakat menciptakan kemiskinan struktural.*

yang sedang mengais agenda reformasi serta memasuki seabad hari Kebangkitan Nasional.

Konsepsi kemiskinan juga dekat dengan perspektif pekerjaan sosial yang memfokuskan pada konsep keberfungsian sosial dan senantiasa melihat manusia dalam konteks lingkungan dan situasi sosialnya.<sup>3</sup> Keberfungsian sosial ini merupakan bentuk hubungan atau interaksi masyarakat yang menunjukkan pola hubungan baik yang bersifat emosional maupun fungsional.

Kemiskinan juga sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Keadaan ini menjelaskan atau menggambarkan kondisi-kondisi materiil yang dimiliki seseorang. Selain itu, kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup kekurangan materi, seperti kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Dalam bahasa Amartya Sen disebut sebagai *human basic needs*.

Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk eksklusi (keterkucilan) sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dapat juga membuat kondisi hidup seseorang menjadi miskin. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Eksklusi sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral serta tidak dibatasi pada bidang ekonomi semata.

Sementara gambaran kebutuhan sosial dan kebutuhan dasar kemiskinan juga tergambar dalam kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

## Beberapa Penyebab Kemiskinan

Menurut pakar dan beberapa ahli, terjadinya kemiskinan dihubungkan dengan penyebab individual atau patologis, keluarga,

---

<sup>3</sup> Edi Suharto. 2008. *Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Menangani Kemiskinan di Tanah Air*. Jakarta: LP3ES.

subbudaya, agensi, dan struktural. Penyebab individual melihat kemiskinan sebagai akibat dari perlaku, pilihan, dan kemampuan dan si miskin. Penyebab keluarga menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab subbudaya (*subcultural*) menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari yang dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.

Penyebab agensi melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Penyebab struktural memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial, seperti lemahnya sistem birokrasi dan minimnya kesadaran hukum di tingkat birokrat yang semestinya menjadi cermin masyarakat.

Dalam buku *Development as Freedom* (2000), Amartya Sen, seorang ekonom-filsuf peraih Penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 1998, menjelaskan bahwa faktor terciptanya kemiskinan selain terkait dengan ideologi suatu bangsa, budaya, dan lingkungan sebuah negara tinggal, sesungguhnya kemiskinan juga dapat tercipta karena kurangnya pendapatan (*lack of income*) bukan karena kurangnya kemampuan (*lack of capability*).<sup>4</sup>

Dalam beberapa hal, teori atau pendekatan ini banyak dikritik para pakar ilmu sosial karena kemiskinan hanya dianggap sebagai masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal menurut beberapa ahli dan boleh jadi Sen tidak hanya melihat faktor tersebut sebagai penyebab utama. Akan tetapi, setidaknya kita tahu bahwa kemiskinan bukan hanya dikarenakan oleh ketidakmampuan, kekurangan, keterbatasan ataupun kelemahan seseorang. Kemiskinan juga



Sumber: Tempo, Edisi 15-21, 2001

Terjadinya perang mendorong munculnya kemiskinan akibat agensi.

<sup>4</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

disebabkan oleh minimnya pendapatan yang diperoleh. Ini salah satu penyebab seseorang terperangkap dalam jurang kemiskinan.

Andaikan setiap orang diberi kesempatan yang sama atau kondisi-kondisi itu terjadi dalam sebuah negara, sebagaimana pernah ditegaskan pemikir politik Prancis Alexis de Tocqueville, niscaya jurang kemiskinan atau kesenjangan sosial akan hilang. Keadaan tersebut dapat menciptakan kedaulatan rakyat yang lebih demokratis dan sejahtera.

Terkait dengan beberapa penjelasan di atas setidaknya kita dapat melihat secara garis besar bahwa terdapat pembagian mengenai masalah kemiskinan. Sekurang-kurangnya terdapat dua faktor utama penyebab timbulnya kemiskinan. Dalam konteks ini kita dapat membagi jenis kemiskinan dalam distingsi yang jelas, seperti kemiskinan kebudayaan dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kebudayaan terjadi disebabkan adanya kesalahan pada subjek. Misalnya malas, apatis, tidak percaya diri, gengsi, tidak memiliki jiwa wirausaha yang mumpuni, serta tidak mempunyai kemampuan dan keahlian, sebagaimana telah disinggung di atas.

Kemiskinan struktural biasanya terjadi disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor ini secara tidak langsung menyebabkan seseorang menjadi miskin. Misalnya pemerintah yang tidak adil, korup, paternalistik, birokrasi yang lemah, minimnya kesadaran hukum dan penegakannya serta ketidakpastian ekonomi politik secara umum.

Dalam konteks ini gagasan atau beberapa akar kemiskinan yang ditelusuri oleh Isbandi Rukminto Adi (*Senior Programmer Community Development*) menarik untuk dilihat. Ia melihat bahwa akar kemiskinan dapat dikaji berdasarkan level permasalahan. Pembagian berdasarkan beberapa dimensi sebagai berikut.

1. Dimensi mikro yaitu mentalitas materialistik dan keinginan serbacepat (*instant*).
2. Dimensi mezzo yaitu melemahnya kepercayaan sosial (*social trust*) dalam komunitas dan organisasi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap si subjek itu sendiri.
3. Dimensi makro yaitu kesenjangan (ketidakadilan) pembangunan daerah yang minus ('desa') dengan daerah yang surplus ('kota').

Strategi pembangunan kurang tepat (tidak sesuai) dengan kondisi sosio demografis masyarakat Indonesia. Ketimpangan semacam ini meningkatkan arus migrasi, terutama kalangan muda yang cenderung ingin mengejar mimpi kesejahteraan di kota-kota besar seperti Jakarta.

4. Dimensi global yaitu adanya ketidakseimbangan relasi antara negara yang sudah berkembang dengan negara yang sedang berkembang.<sup>7</sup>

Akar-akar kemiskinan yang dijelaskan di atas berguna dalam melihat kondisi kemiskinan dan pencarian alternatif pengentasannya. Kita pun dapat melihat kondisi dan kemungkinan keadaan orang menjadi miskin atau mengalami kemiskinan.

## Siapakah Orang Miskin itu?

Terkait hal di atas, kita sering diselimiuti tanda tanya perihal kemiskinan. Mengapa orang menjadi miskin? Bagaimanakah kondisi seseorang dapat dikatakan miskin? Hal itu muncul ketika kita melihat fenomena mutakhir di tengah masyarakat yang menunjukkan ketidakjelasan kriteria miskin dan tidak miskin. Misalnya, dalam kasus bantuan langsung tunai (BLT) dan beras miskin (raskin) ribuan orang berbondong-mengbondong mengambil jatah orang miskin dengan ragam dan variannya.

Pertanyaan itu muncul ketika kita melihat di antara kerumunan yang tidak semuanya secara fisik terlihat miskin dalam antrian, baik raskin maupun BLT yang belum lama ini berlangsung menyusul kebijakan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Kategori miskin



Sumber: Kompas, 22 Mei 2008.

Bantuan langsung tunai (BLT) hanya diberikan kepada mereka yang termasuk kriteria miskin.

<sup>7</sup> Rizki Aj Hartanto, 2007, *Membaca Pola Kemiskinan, Suatu Analisa Menuju Pemberdayaan*, Makalah Seminar Kemiskinan, hal. 1-15.

semakin pudar ketika kita banyak menemukan orang mengantre dengan pakaian, perhiasan, dan kendaraan yang tidak layak dikatakan miskin secara ekonomi. Untuk menjawab itu, setidaknya kita patut melihat dan mengategorisasikan layak atau tidaknya seseorang masuk dalam kategori miskin.

Dalam *The End of Poverty* (2005), Jeffrey D. Sachs mengklasifikasikan kaum miskin ke dalam tiga bagian. *Pertama*, mereka yang hidup dalam *extreme poverty*, yang satuan rumah tangganya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, kelaparan, tidak mempunyai akses atas layanan kesehatan, tidak mendapatkan air bersih dan sanitasi, tidak dapat mengusahakan pendidikan bagi anak-anaknya, tidak mempunyai fasilitas tempat tinggal yang sederhana dan tidak mempunyai kelengkapan harian. Situasi ini banyak terjadi di negara berkembang.

*Kedua*, *moderate poverty*, mereka yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (seperti dijelaskan pada bagian pertama), tetapi sangat minim dan tidak selalu mampu. *Ketiga*, *relative poverty*, mereka yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi berada di bawah rata-rata cara orang hidup di negara yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek sosial, ekonomi, psikologi, dan politik. Aspek sosial disebabkan terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, dan lemah mengantisipasi peluang. Aspek psikologi disebabkan rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolasi. Aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, dan posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Kemiskinan dapat juga dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu kemiskinan absolut, relatif, dan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

---

<sup>8</sup> Jeffrey D. Sachs, 2005. *The End of Poverty*.

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

## Beberapa Dampak Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) ke seluruh tatanan kemasyarakatan. Kemiskinan dapat membunuh mimpi generasi muda Indonesia dalam menatap masa depan. Bagaimana generasi muda ke depan dapat membayangkan cerah masa depan apabila pada hari ini mereka dihantui antara makan dan tidaknya esok.

Berbagai peristiwa konflik yang terjadi sepanjang krisis ekonomi di tanah air menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan bukanlah semata-mata memengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat. Persoalan kemiskinan mampu memengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional. Meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas, bunuh diri, dan bentuk frustrasi sosial lain terutama yang dialami kalangan pemuda yang sudah pesimis mengarungi hidup karena ketiadaan etos kerja, modal sosial ekonomi dan kesempatan untuk aktualisasi diri ikut pula memengaruhi ketahanan sosial bangsa.

Dalam konteks yang filosofis, manusia (termasuk pemuda) secara eksistensial sangat ditentukan oleh pekerjaan. Hal ini karena melalui bekerja ia mengalami ekstensifikasi diri (perluasan diri) sehingga menghasilkan karya yang autentik. Filsafat pekerjaan ini dapat kita temukan dari berbagai pemikiran dan filsuf, seperti Hegel dan Marx. Mereka melihat bahwa kerjalah yang menentukan keberlangsungan eksistensi manusia dalam mengarungi sejarahnya.

Oleh karena itu, lorong kemiskinan dengan segala bentuk dan varian di atas secara eksistensial telah merapuhkan kondisi dan kedaulatan manusia dalam hal ini kaum muda untuk menemukan autentisitas dirinya dengan dunia di luar dirinya. Selain itu, kemiskinan membuat

seseorang (si miskin) merasa dirinya semakin "terasing" dan imperior dari lingkungan sekitar. Kemiskinan membuat seseorang menjadi "kaku" berinteraksi dalam masyarakat yang menyebabkan individu kehilangan kebebasan. Situasi dan kondisi ini berpotensi melahirkan kekerasan dan kriminalitas.<sup>9</sup>

## Fenomena Kemiskinan di Indonesia

Setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode 1997–1999 dan setelah dalam kurun waktu 1976–1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1% menjadi 11,3%, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP, dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996–1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Sementara itu, *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3% dari seluruh jumlah penduduk (BPS, 1999).

Data dari BPS (1999) juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996–1998 telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin hampir sama di wilayah pedesaan dan perkotaan. Di wilayah pedesaan angka kemiskinan meningkat menjadi 62,72%, sementara di perkotaan meningkat menjadi 61,1%. Secara agregat, persentase peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar di wilayah pedesaan (7,78%) dibandingkan dengan di perkotaan (4,72%). Akan tetapi, selama dua tahun terakhir ini secara absolut jumlah orang miskin meningkat sekitar 140% atau 10,4 juta jiwa di wilayah perkotaan, sedangkan di pedesaan sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa (lihat Remi dan Tjptoherjanto, 2002).

Data di atas mengindikasikan bahwa krisis telah membuat penderitaan penduduk perkotaan lebih parah daripada penduduk pedesaan. Menurut Thorbecke (1999), selidaknya ada dua penjelasan

<sup>9</sup> Rubrik Catatan DR. Sujana Royat (Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan), Majalah KOMITE, (edisi 10V, 5 Oktober 2007).

atas hal ini. Pertama, krisis cenderung memberi pengaruh lebih buruk pada beberapa sektor ekonomi utama di perkotaan, seperti perdagangan, perbankan, dan konstruksi. Sektor-sektor ini membawa dampak negatif dan memperparah pengangguran di perkotaan. Kedua, pertambahan harga bahan makanan kurang berpengaruh terhadap penduduk pedesaan karena mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui sistem produksi subsistem yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat perkotaan yang sistem produksi subsistem khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan tidak terlalu didominasi pada masyarakat perkotaan.

Angka kemiskinan ini jauh lebih besar jika dalam kategori kemiskinan dimasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang. PMKS meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo telantar, dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan daripada orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, sandang, dan papan, kelompok rentan (*vulnerable group*) ini mengalami ketelantaran psikologis, sosial, dan politik terutama menghinggapi para pemuda di negeri ini.

Selain kelompok di atas, krisis ekonomi yang terjadi meningkatkan jumlah orang yang bekerja di sektor informal. Merosotnya pertumbuhan ekonomi, dilikuidasinya sejumlah kantor swasta dan pemerintah, serta dirampingkannya struktur industri formal telah mendorong orang untuk memasuki sektor informal yang lebih fleksibel. Studi ILO (1998) memperkirakan bahwa selama periode krisis antara tahun 1997 dan 1998, pemutusan hubungan kerja terhadap 5,4 juta pekerja pada sektor industri modern menurunkan jumlah pekerja formal (terutama para pemuda) dari 35% menjadi 30%.

Menurut Tambunan (2000), sedikitnya setengah dari para penganggur baru tersebut diserap oleh sektor informal serta industri kecil dan rumah tangga lainnya. Pada sektor informal perkotaan, khususnya pedagang kaki lima mengalami peningkatan yang sangat dramatis. Misalnya di Jakarta dan Bandung pada periode akhir tahun

1996–1999 pertumbuhan pedagang kaki lima mencapai 300%.<sup>19</sup> Dilihat dari jumlah dan potensinya, pekerja sektor informal ini sangat besar. Namun demikian, seperti halnya dua kelompok masyarakat di atas, kondisi sosial ekonomi pekerja sektor informal masih berada dalam keadaan miskin dan rentan.

Departemen Sosial tidak pernah absen dalam mengkaji masalah kemiskinan ini, termasuk melaksanakan Program-Program Kesejahteraan Sosial dikenal PROKESOS yang dilaksanakan, baik secara intradepartemen maupun antardepartemen bekerja sama dengan departemen-departemen lain secara lintas sektoral. Dalam garis besar, pendekatan Depsos dalam menelaah dan menangani kemiskinan sangat dipengaruhi oleh perspektif pekerjaan sosial (*social work*). Pekerjaan sosial dimaksud, bukanlah kegiatan-kegiatan sukarela atau pekerjaan-pekerjaan amal begitu saja, melainkan profesi pertolongan kemanusiaan yang memiliki dasar-dasar keilmuan (*body of knowledge*), nilai-nilai (*body of value*), dan keterampilan (*body of skills*) profesional yang umumnya diperoleh melalui pendidikan tinggi pekerjaan sosial (S1, S2, dan S3).<sup>20</sup>

## **Kemiskinan Sebagai Masalah Krusial Pemuda Saat Ini**

Mantra atau Ikrar Sumpah Pemuda yang memaklumkan ide satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia 79 tahun silam dalam Kongres Pemuda di Jakarta lahir sebagai refleksi dari kebangkitan nasional. Ia juga sebagai cikal bakal dan sumber inspirasi lahirnya kemerdekaan. Intinya dengan Sumpah Pemuda dapat diwujudkan spirit kebangsaan, kesatuan, dan persatuan bangsa pada setiap warga negara Indonesia. Dalam tataran kehidupan bangsa jangka panjang ia merupakan sebuah kontrak politik.

Lahirnya Sumpah Pemuda karena kolonialisme menyebabkan rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang tertindas dan tidak mempunyai kedaulatan. Persatuan dan kesatuan porak-poranda akibat politik pecah belah. Keadaan tersebut memotivasi munculnya kesadaran untuk membebaskan diri dari kolonialisme.

<sup>19</sup> Kompas, 23 November 1996; Pikiran Rakyat, 11 Oktober 1999.

<sup>20</sup> Edi Suharto, *op cit*, hal. 225.

Angka pengangguran terbuka pada tahun 2005 tercatat lebih dari sepuluh juta orang atau 9,86% dari jumlah angkatan kerja. Angka tersebut belum ditambah dengan pengangguran setengah terbuka sebanyak 27,5%. Total angka pengangguran menjadi sekitar 29 juta jiwa. Sebanyak 37,8% dari angka pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja berusia muda (15–24 tahun).



Sumber: Kompas, 20 April 2008.

**Banyaknya angka pengangguran mendorong meningkatnya angka kriminalitas.**

Dapat dibayangkan apa yang terjadi pada kalangan muda itu. Pada sisi mikro akan terjadi perasaan stres dan depresi. Tidak jarang dari mereka nekat melakukan tindakan kriminalitas. Pada sisi makro pengangguran merupakan pemborosan sumber daya khususnya sumber daya manusia (SDM), beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, serta hambatan pembangunan jangka panjang.

Pemuda adalah penerus sekaligus harapan bangsa. Pemuda merupakan sumber daya manusia terbesar bagi pembangunan nasional, sekaligus menjadi kunci dalam inovasi dan perubahan sosial positif. Akan tetapi, saat ini pemuda terjebak dalam lembah kemiskinan dan pengangguran pemuda yang terus merangkak tinggi dari tahun ke tahun. Ironis memang, negara yang penuh dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, pulau terbentang panjang dari Sabang sampai Merauke, tetapi rakyatnya harus hidup di bawah garis kemiskinan.

Tidak heran apabila selama ini negara dianggap tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang bisa menjamin masa depan lebih baik bagi pemuda, kecuali untuk mereka yang berpendidikan tinggi. Tanpa usaha maksimal, pemuda akan tertinggal dan rentan jatuh dalam kemiskinan yang akan mempersulitnya meraih pendidikan, pelayanan kesehatan, dan menghalangi peluang kerja. Jika ini terus berlanjut serta tidak ada solusi yang jelas, para pemuda yang kurang beruntung akan menghadapi rintangan yang lebih tajam dan sulit untuk menuju kemajuan. Kemungkinan pemuda tidak dapat mengakses kebutuhan

yang pada umumnya datang bersamaan dengan pekerjaan jangka panjang, seperti akses terhadap aset dan sumber daya, jaringan sosial yang kuat, dan status dalam mengambil keputusan dalam keluarga atau komunitas. Kemampuan pemuda untuk mencari lapangan pekerjaan yang produktif dan menyeluruh harus menjadi tujuan sentral dalam strategi pembangunan nasional, termasuk kebijakan pengentasan kemiskinan.

Komunitas internasional mengakui pengurangan kemiskinan dan menjadi prioritas dalam *World Programme of Action for Youth* pada tahun 1995. Program tersebut merangkul pemuda sebagai rekan kerja dalam usaha global untuk mengentaskan kemiskinan dan meraih Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Komitmen pemerintah dalam agenda pembangunan diperbarui dan diperkuat dengan diadakannya KTT Dunia 2005 yang membuka kesempatan baru untuk merangkul pemuda dalam aksi terkait masalah yang mereka hadapi.

Tidak sedikit dari kaum pemuda Indonesia terlihat kehilangan arah (disorientasi). Situasi ini umumnya disebabkan oleh faktor narkoba, krisis nilai, pengaruh kesibukan orang tua yang mengabaikan putra putrinya, atau sejumlah faktor lain. Pemuda Indonesia seperti tidak punya harapan dalam meniti masa kini, apalagi mendatang. Yang cukup menarik untuk kita cermati, kalangan pemuda yang kini sedang dalam tempaan pendidikan pun tidak sedikit yang mengalami erosi ideologis. Sebagai komponen masyarakat (mahasiswa/i) tidak sedikit yang terbelok ke ragam permainan yang bernuansa sangat pragmatis dan sempit. Di antara mereka beraksi atas nama moral, tetapi substansi gerakannya tidak jauh dari nuansa kepentingan uang.

Ilustrasi di atas tidaklah cukup untuk menggambarkan totalitas pemuda Indonesia yang sedang diperhadapkan fenomena disorientasi sekaligus destruksi karena semakin jauh dari proporsi idealistik. Realitas pemuda seperti ini sejalan dengan peranannya sebagai penerus generasi pendahulunya, tentu wajib dikembalikan orientasinya ke arah yang konstruktif. Demikian luas aspek yang harus dibangun, bersifat lintas sektoral, dan melibatkan banyak pihak. Kompleksitas persoalan yang kini menghinggap pemuda mempersulit pijakan dari mana harus merekonstruksi agar terbangun sistem yang mampu memperbaikinya. Dalam hal ini sudah saatnya ada kajian khusus yang mampu

mengidentifikasi persoalan integral ataupun persoalan yang bersifat tidak langsung yang secara faktual merupakan persoalan pemuda kita. Temuan data masalah itu sungguh penting untuk dianalisis sebagai kerangka mencapai solusi yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan mendasar.

Riset intensif dengan spesifikasi pemuda yang berbeda-beda ini merupakan proses penting dalam rangka membangun sosok pemuda secara sistemik dan berjangka panjang. Jika proses ini dilakukan, inilah kontribusi nil dan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2004–2009. Kontribusi yang sangat positif ini tidak akan lengkap jika masalah jangka pendek dan menengah, tidak dicari solusinya. Oleh karena itu, sembari memproses model riset yang komprehensif dan berjangka panjang, kita perlu mencari urgensi solusi yang cocok untuk pemuda saat ini.

Secara hipotesis, kita dapat membaca sejumlah indikator persoalan pemuda Indonesia antara lain problem pengangguran yang sebagian menggiring aksi kriminal, persoalan narkoba akibat pengaruh pergaulan dalam berbagai corak, dan masalah perubahan mental yang berpengaruh besar dalam membelokkan warna idealisme pemuda ke sikap atau prinsip yang sangat pragmatis. Sejumlah implikasi dari persoalan yang ada pada akhirnya bermuara pada masalah krisis nilai dalam diri pemuda itu sendiri.

## **Beberapa Gambaran Pendekatan dan Solusi**

Ade Adriansyah Utama, dalam artikelnya *"Reorientasi dan Rekonstruksi Pemuda Indonesia: Pemuda Harapan Bangsa, Tawaran Konsep Strategis Membangun Keunggulan,"* (2008) melihat bahwa upaya merekonstruksi dan mereorientasikan kembali peran kelembagaan pemuda dalam membangun sumber daya pemuda yang andal itu penting. Beliau pertama-tama melihat dan membaca situasi kekinian yang menggejala di kalangan generasi muda saat ini. Melalui pembacaan sejumlah fenomena sosial yang ada disimpulkan bahwa persoalan pemuda selalu terkait dengan problem pengangguran. Hal pertama yang harus dilakukan adalah upaya ketersediaan lapangan kerja. Setidaknya upaya menciptakan pemuda yang mampu berkarya

dalam bentuk apa pun, terutama program dan orientasi pembenahan *skill* kalangan pemuda.

Hal itu berarti semua program seperti pelatihan atau bentuk lainnya merupakan sebuah keharusan untuk melahirkan kreativitas pemuda sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada.

Menyikapi hal itu sekurang-kurangnya kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga serta instansi terkait perlu memfasilitasi proses kemampuan berkarya kaum muda, sekaligus menjadikan diri sebagai motor perubahan dari kepentingan pemuda. Warna kekaryaan bisa secara profesionalisme dalam arti luas, bisa juga kewiraswastaan atau kepemimpinan *entrepreneurship*. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mencari sarana dan prasarana untuk proses pengembangan, sejauh tingkat keberhasilan itu bisa dilihat.

Model ini masih dapat ditransformasikan lebih jauh ke sektor-sektor strategis lain. Dengan melihat potensi wilayah daerah pertanian, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu mendesak Departemen Pertanian, Departemen Industri dan Perdagangan bahkan BUMN serta BUMD untuk memberikan perhatian tertentu terhadap agenda pengembangan pemuda daerah. Agenda ini bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan pemuda, melainkan berpotensi mencegah urbanisasi kaum muda yang justru akan menjadi masalah tersendiri di tengah kota jika tidak dibekali keunggulan praktis.

Jika pemuda pengangguran terlihat memiliki potensi katakanlah bidang olahraga, selayaknya kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan rekomendasi khusus untuk pembinaan dan pengembangan. Dalam hal ini, monopora perlu mengundang kalangan pengusaha setempat (pemda) untuk terlibat dalam proses pembinaan itu.

Sementara di pihak lain, departemen atau lembaga kepemudaan sering dihadapkan pada masalah krusial pemuda saat ini, seperti narkoba, seks bebas, serta tindak kriminalitas yang diakibatkan oleh kondisi kemiskinan dan frustrasi sosial lainnya. Masalah-masalah itu bukan merupakan persoalan mudah. Banyak persoalan atau faktor terkait yang menyebabkan kompleksnya masalah kepemudaan sehingga menghambat pengembangan dan pembangunan mental bangsa. Oleh karena itu, masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab kantor monopora. Sebagai kementerian yang identik

dengan kepemudaan, menpora perlu tampil terdepan menghadapi problem narkoba dan masalah kepemudaan lain, walaupun dengan pendekatan yang bersifat persuasif, seperti menyukseskan program kegiatan bagi pemuda dalam berbagai bentuk. Tampaknya maksimalisasi kegiatan ini memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungannya, walaupun tidak secara sekaligus. Dalam hal ini yang penting adalah cara kantor menpora memprakarsai agenda agenda strategis yang mampu mendorong kalangan pemuda merasa tertarik untuk terlibat dan secara tidak sadar terkurangi ingatannya pada narkoba. Intensitas kegiatan yang diikuti pemuda pecandu narkoba akan memiliki makna penting. Menpora perlu meningkatkan kerja sama dengan banyak pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan selengkap serta pengusaha untuk kepentingan pemuda itu.

Sementara strategi dalam membangun kerja sama atau menghadapi sebagian civitas akademik yang pragmatik perlu diarahkan ke agenda kegiatan yang jauh lebih konstruktif. Di tengah kegiatan studi tidak ada salahnya mereka dilibatkan dalam proses perumusan atau kegiatan-kegiatan lain. Partisipasi itu idealnya mendapat *reward* secara proporsional, walaupun nilainya jauh di bawah standar jika dibandingkan dengan kegiatan politik praktis seperti demo bayaran. Namun demikian, kantor menpora perlu meyakinkan manfaat jangka panjang bagi pemuda mahasiswa yang terlibat secara dini dalam proses perumusan masalah kemasyarakatan. Keterlibatan mahasiswa menjadi ruang strategis untuk mengembalikan jati dirinya sebagai insan ideolog yang tetap mengedepankan idealisme dibanding masalah yang pragmatis.

Kita perlu mencatat pragmatisme yang bernuansa materialisme tidak mudah digeser dengan idealisme semata. Akan tetapi, harus ada kompromitas antara idealisme dengan unsur materialisme. Meskipun unsur materialisme belum bisa digeser sepenuhnya, intensitas kerja sama mahasiswa dan kantor menpora yang sesuai dengan programnya mampu mengembalikan jati diri mahasiswa sebagai insan yang tetap idealis diekspresikan dengan saluran secara proporsional.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ade Adhanyan Utama, 2004, *Reorientasi dan Rekonstruksi Pemuda Indonesia: Pemuda Harapan Bangsa, Tawaran Kontemporer Strategi Membangun Keunggulan*, Makalah, hal. 112.

**P**roklamator sekaligus presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah mengatakan "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Kalimat yang sering dilanturkan sang orator ulung itu dijadikan landasan kuat posisi tawar pemuda. Hal itu diucapkan ketika menyanjung betapa pentingnya keberadaan sebuah komunitas pemuda dalam suatu negara-bangsa (*nation-state*).

Ungkapan itu disampaikan dalam pidato kenegaraan pada masa jayanya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemuda tidak hanya memiliki potensi, tetapi juga progresif, revolusioner, memiliki semangat yang menyala-nyala, dan memiliki gelora, baik secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Oleh karena itu, berbagai hal yang menyangkut perubahan dan pembangunan senantiasa dilekatkan kepada para pemuda. Sejarah membuktikan itu. Di berbagai belahan dunia, perubahan sosial politik menempatkan pemuda di garda depan.

Setiap gerak perubahan zaman biasanya dimulai dari barisan pemuda yang berani, memiliki visi ke depan, memiliki semangat juang yang tinggi, dan tidak silau dengan popularitas maupun imbalan tertentu, baik itu harta ataupun takhta.

Salah satu Indonesianis terkemuka, Benedict Anderson, pernah mengatakan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarahnya para pemuda.<sup>13</sup> Hal ini ditegaskan kembali oleh Indonesianis lainnya seperti Herbert Feith. Menurutnya pemikiran politik modern Indonesia diawali dengan bangkitnya nasionalisme modern yang dipelopori oleh sekelompok kecil pemuda, baik itu mahasiswa maupun cendekiawan muda yang dimulai pada tahun 1900-an dan 1910-an.

Hal yang dikemukakan oleh Ben dan Feith rasanya memang tepat, apalagi dikaitkan dengan sejarah panjang bangsa Indonesia. Para pemuda merupakan aktor utama setiap peristiwa penting yang terjadi

<sup>13</sup> Benedict R. O. G. Anderson. 1991. *Imagined Community: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. Ithaca, N.Y: Cornell University Press, hal. 26.

di Indonesia. Sejak zaman pergerakan nasional sampai saat ini, para pemuda selalu menjadi tonggak dan aktor yang senantiasa menggerakkan perubahan-perubahan yang terjadi.

Dalam sejarah negeri ini, pemuda senantiasa memiliki peran yang cukup strategis di setiap gerak laju kemajuan bangsa. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, para pemuda dapat dikatakan sebagai aktor utama dan tulang punggung dalam rangka mengusir penjajah Belanda maupun Jepang.

Sejarah mencatat bahwa rangkaian peristiwa-peristiwa penting yang tertoreh dalam pembentukan identitas nasional Indonesia merupakan aksi yang dilakukan oleh para pemuda. Misalnya, Kebangkitan Nasional 1908, Soempah Pemoeda 1928, Kemerdekaan RI 1945, Angkatan 1966, dan Peristiwa Malari 1974.

Dalam konteks sekarang ini, para pemuda masih tetap menyanggah predikat yang sama. Mereka tidak hanya aktif melakukan kontrol dan melancarkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat, tetapi juga meruntuhkan kursi kekuasaan pemerintahan yang sedang berkuasa. Misalnya dalam kasus tumbangannya kekuasaan Soekarno pada tahun 1966. Begitu pun halnya dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru pimpinan Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.

Gelar yang disandang para pemuda Indonesia sebagai *age of change* (agen perubahan) dan *agent of social control* (agen kontrol sosial) sampai saat ini masih efektif dalam memosisikan para pemuda Indonesia. Kendati demikian, dari sekian banyak prestasi para pemuda Indonesia dalam sejarah Indonesia, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap masalah-masalah yang melingkupi para pemuda di Indonesia. Hal ini berimbas pada mentalitas para pemuda Indonesia.

Belakangan ini generasi muda mengalami pergeseran serta kemerosotan yang cukup signifikan. Hal itu memang menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Hal ini disebabkan yang terjadi di Indonesia masa lalu dan masa sekarang jauh berbeda. Tantangan-tantangan yang dihadapi setiap generasi tidaklah sama.

Dewasa ini semangat pengorbanan para pemuda tidak lagi berkobar dan menggelora. Hal itu dikarenakan kolonialisme telah tergusur dan

bumi Indonesia. Generasi muda masa kini sama sekali tidak mampu mewarisi perjuangan pemuda masa lalu.

Pada era penjajahan para pemuda dituntut untuk memegang senjata dan berperang mati-matian. Jika pada pemerintahan Orde Baru kita dihadapkan pada politik tidak etis, yang hanya menyulam politik demi mempertahankan *status quo*, pada saat yang bersamaan sebagai tanggung jawab pemuda adalah melawan militerisme. Pada saat ini yang menjadi agenda terpenting bagi para pemuda bangsa adalah bagaimana cara efektif memberantas korupsi di Indonesia, mengurangi angka kemiskinan, serta memperluas lapangan kerja agar para pengangguran semakin berkurang.

## **Masalah dan Tantangan Pembangunan Kepemudaan**

Berdasarkan beberapa penelitian, predikat buruk sering dilekatkan pada Indonesia. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa anak yang baru lahir mungkin akan malu menjadi orang Indonesia. Bahkan, pujangga 60-an pernah menuliskan situasi keterpurukan mental bangsa Indonesia. Taufik menghujat Indonesia lewat syair puisinya dengan tema "Malu Aku Jadi Orang Indonesia".

Berbagai 'rekor' memang ditorehkan negeri ini dengan label buruk. Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 174 negara di dunia. Sementara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand berada pada peringkat ke-41 sampai 44. Posisi negeri ini bahkan di bawah Vietnam yang baru bangkit dari perang dengan Amerika.

Jika diamati indeks pembangunan manusia Indonesia, akan terlihat fakta yang terus menurun dalam beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 1995 Indonesia menduduki peringkat ke-104 dunia jauh di atas Vietnam yang saat itu berada pada peringkat 120 dunia. Ironisnya, pada tahun 2005 peringkat Indonesia merosot ke urutan 110 dunia, Vietnam naik menjadi peringkat 108 dunia. Utang luar negeri yang ditanggung Indonesia kini mencapai Rp1.300 triliun lebih. Jumlah tersebut apabila dibagi rata untuk seluruh penduduk Indonesia setiap penduduk akan mendapatkan Rp6,5 juta. Lembaga *Transperancy International* yang bermarkas di Berlin pun mengumumkan peringkat

indeks korupsi tahun 2005. Hasilnya Indonesia menempati peringkat ke-137 dari 159 negara di dunia. Sungguh luar biasa bangkrutnya bangsa ini. Data tersebut membuat kita mengajukan pertanyaan mendasar, yaitu benarkah kita sudah siap untuk bernegara dan berbangsa? Tidak mudah memang menjawab pertanyaan tersebut.

Dalam *political science*, berdirinya sebuah negara mensyaratkan tiga hal, yaitu pemerintahan, teritori atau wilayah, dan rakyat. Tiga hal tersebut memang telah sejak lama ada di Indonesia. Akan tetapi pembangunan politik dan ekonomi yang memiliki hulu pada kesejahteraan semua elemen bangsa sampai saat ini belum bisa dikategorikan tercapai oleh sebuah negara bangsa semisal Indonesia yang sejak awal kelahirannya digariskan sebagai wahana distribusi keadilan bagi seluruh rakyat.

Salah satu subjek sentral dalam pembangunan politik dan ekonomi adalah pemberdayaan kaum muda. Pembangunan pemuda mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa pada masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini.

Oleh karena itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan dan kebutuhan dalam menghadapi tantangan dan persaingan pada era global.

Sekurang-kurangnya ada tujuh permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda. *Pertama*, masih rendahnya akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan. *Kedua*, masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan pemuda. *Ketiga*, belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah. *Keempat*, rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda. *Kelima*, tingginya tingkat pengangguran pemuda. *Keenam*, maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, NAZA, dan HIV/AIDS. *Ketujuh*, masih rendahnya perhatian dan perhatian terhadap pemuda dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP).

Problematika pemuda yang terbentang di hadapan sekarang ini sungguh kompleks, mulai dari krisis mental, krisis eksistensi, sampai masalah dekadensi moral. Budaya permisif dan pragmatisme yang semakin merebak membuat sebagian pemuda terjebak dalam kehidupan hedonis, serbainstan, dan tercabut dari idealisme sehingga cenderung menjadi manusia yang antisosial.

Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul dan menjadi kekhawatiran masyarakat seperti maraknya penggunaan narkoba dan penderita HIV/AIDS, minuman keras, perjudian, dan perilaku kriminal remaja serta berbagai permasalahan sosial generasi muda lainnya merupakan masalah yang kompleks yang dapat mengancam masa depan generasi muda pada khususnya, dan masa depan bangsa pada umumnya.

Meningkatnya jumlah pemuda pengangguran sebagai dampak dari krisis ekonomi berakibatkan pada masalah tenaga kerja, urbanisasi, lapangan kerja, ketidakpastian iklim usaha, serta lemahnya kemampuan dan perilaku kewirausahaan di kalangan generasi muda. Masalah kepemudaan ditangani oleh berbagai instansi sehingga dalam praktiknya masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurunnya kemampuan daya beli masyarakat berdampak pada kecukupan gizi, kesehatan, pendidikan, dan kelayakan permukiman bagi generasi muda. Hal ini kemudian meningkatkan jumlah anak jalanan, pelacuran, maraknya penggunaan dan peredaran narkoba, minuman keras, perjudian, serta perilaku kriminal remaja.

Anak-anak muda sekarang lebih bangga jika dapat berperilaku kebarat-baratan, mulai dari gaya pakaian, makanan, bahkan sikap dan pandangan hidup. *Stereotipe* gaya hidup hura-hura itu ditunjukkan secara gamblang lewat stasiun televisi mulai dari gaya sinetron dengan pendekatan serbahedonis sampai acara kontes menyanyi seperti *Indonesian Idol* atau Akademi Fantasi Indosiar (AFI). Anak muda sekarang lebih semangat memacu diri lewat 'jalan pintas' yaitu menjadi penyanyi terkenal, artis, banyak penggemar, dan kaya lewat profesi yang serbagemerlap. Cuma segelintir pemuda yang lebih keras berupaya dalam hal prestasi dengan kegemilangan pengetahuan,

penelitian, atau memeras otak dan keringat dari inteligensinya. Sebagian besar anak muda justru terlelap dalam angan-angan kosong yang ditawarkan sistem kapitalisme, tanpa menyadari bahwa 'perjuangan' mereka di jalur serbahedonis, hanya bisa dikategorikan dan menjadi sebuah perjudian atau harapan fatamorgana. Pendek kata, kaum muda kita seperti kehilangan daya kreativitasnya dan terjebak pada pola konsumtif tanpa ada usaha mencipta yang dahulu dimiliki oleh generasi muda bangsa Indonesia, semisal Bung Hatta, Bung Karno, Bung Sjahrir dan tokoh-tokoh muda awal perhimpunan muda Indonesia yang memiliki idealisme dan daya juang menciptakan keadilan yang berbau sosial.

Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran kolektif untuk menjadikan peran pemuda di tengah masyarakat lebih konkret lagi pada perjuangan yang sesungguhnya. Anak-anak muda perlu diberikan stimulan besar untuk dapat kembali ke jalan kebenaran, mempertahankan semangat perjuangan dan kepemimpinan kepemudaan nasional. Hal yang perlu pertama kali disikapi adalah tujuan ideal yang akan dicapai oleh para pemuda itu, bukan hanya sekadar tujuan antara. 'Perjuangan' para anak muda dalam kontes menyanyi, mungkin dapat dikatakan sebagai upaya untuk dapat mencari eksistensi diri. Akan tetapi, perlu diingat bahwa 'perjuangan' itu hanya sekilas menjadi *euforia* sesaat tanpa ada makna yang lebih luas secara sosial dan bagi kemanusiaan.

Pemuda perlu mendefinisikan kembali tujuan dan visi hidupnya secara kolektif. Berdasarkan visi dan tujuan tersebut anak muda akan menemukan kesadaran kolektif guna melanjutkan peran yang diwariskan para pemuda sebelumnya. Hanya dengan semangat, kolektivitas, dan tekad yang kuat bangsa ini dapat kembali berjaya dan bangkit dari keterpurukan.

Seperti sudah disebutkan di depan, semangat perjuangan sebenarnya telah menjadi bagian penting dari pemuda Indonesia sejak dahulu. Dari sanalah semangat kepemudaan harus dipupuk dan dipertahankan. Semangat kepemudaan seharusnya tidak boleh hilang, diterjang berbagai godaan dan tantangan. Seharusnya semakin banyak tantangan, semangat kepemudaan semakin membaja, kuat, dan terlatih.

Sampai saat ini Indonesia mungkin menjadi negara yang memalukan dalam berbagai hal. Anggapan ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Bagaimanapun harga diri bangsa sudah eksis dan didengungkan dari awal. Berkaca pada pepatah Melayu lama "sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang". Oleh karena itu, perlu dibentuk kesadaran kolektif terhadap bangsa mengenai eksistensi, kemandirian, dan harga diri bangsa. Itu sebenarnya harus dimulai dari generasi muda seperti halnya kemerdekaan dan kebangkitan bangsa sejak kelahiran Boedi Utomo 1908, Soempah Pemoeda 1928, dan proklamasi kemerdekaan yang semuanya digerakkan oleh motor utama para pemuda. Semua itu diperlukan pemuda-pemuda yang tangguh, bukan para pemuda yang cengeng atau bermental hedonis. 'Cita-cita ideal Bung Karno' pemuda tangguh Indonesia akan benar-benar mampu mengguncang dunia, bukan hanya sekadar orasi dan *lips service* semata.

## Memperkuat Pembangunan Pemuda

Paragraf awal bab ini telah disebutkan pidato Soekarno yang sangat inspiratif untuk memotivasi kekuatan pemuda. Tidak ada yang pernah meragukan Soekarno sebagai "juru bicara" negara-negara dunia ketiga di tengah ancaman perang dingin. Tidak ada yang pernah meragukan kemampuannya untuk mengguncang dunia dengan karisma dan kepemimpinannya menyatukan ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Ia memiliki keyakinan terhadap generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin dunia.

Namun demikian, bukan perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan untuk mencelak generasi muda yang memiliki hati berkobar dan sanggup mengguncangkan dunia. Semua itu membutuhkan adanya iklim sosial politik yang kondusif bagi pemuda untuk berkiprah sehingga regenerasi kepemimpinan dan sistem edukasi bagi generasi muda dapat berjalan secara berkelanjutan. Regenerasi kepemimpinan kaum muda dalam organisasi kepemudaan seharusnya berpijak pada kompetisi yang fair. Kesempatan harus diberikan kepada generasi muda yang memiliki kemampuan dan kapabilitas dan tidak berdasarkan senioritas.

Selain itu, penting pula terjadi reposisi peran negara dalam ranah organisasi kepemudaan. Selama lebih dari 30 tahun negara mengendalikan kehidupan berorganisasi kaum muda sebelum jatuhnya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan. Organisasi kepemudaan sendiri idealnya berada pada koridor netral terhadap semua kepentingan pemerintahan dan kelompok-kelompok politik. Hal ini akan berpengaruh pada pembangunan sikap kritis dan konstruktif terhadap negara dan pemerintahan yang berkuasa.

Pemilihan keyakinan dan ideologi organisasi kepemudaan ada baiknya dibebaskan oleh negara dan diinisiasi oleh organisasi-organisasi kepemudaan di tingkat nasional. Negara tidak perlu campur tangan dalam urusan internal organisasi pemuda agar nuansa kehidupan organisasi kepemudaan menjadi lebih dinamis. Akan tetapi, ada efek samping yang harus dihindari, yaitu ideologi organisasi sebagai gaya hidup semata. Di Indonesia dengan beragam ideologi yang dianut oleh ratusan organisasi kepemudaan, efek samping ideologi sebagai gaya hidup semata dapat muncul. Ada organisasi kepemudaan yang menggunakan Islam sebagai ideologi tetapi bercorak militeristik, seperti Barisan Serba Guna Pemuda Ansor. Ada pula organisasi kepemudaan nasionalis yang bercorak militeristik, seperti FKPPi dan Pemuda Pancasila Marga.

Titik tekan dibebaskannya pemilihan ideologi oleh organisasi agar mereka dapat berhadapan langsung dengan tantangan dunia saat ini Prancis dan Jerman sudah berhasil memodifikasi ideologi sosialisme mereka agar dapat berhadapan dengan kapitalisme Amerika dan Inggris dalam persaingan pasar bebas. Bagaimana dengan Asia? Di sinilah peran pemuda harus dioptimalkan untuk dapat berdialektika dengan beragam ideologi dunia, mampu mengembangkan sayap jaringan kepemudaan agar dapat memperoleh gambaran situasi global, serta mampu menentukan langkah ke depan organisasi kepemudaan.

Memperkuat kemampuan pemuda dalam menghadapi tantangan global harus datang dari kalangan pemuda itu sendiri. Pembentukan pemuda yang hatinya berkobar sebagaimana diinginkan oleh Soekarno untuk mengguncang dunia tidak dapat dilahirkan apabila tidak ada inisiatif dan kesadaran dari kalangan pemuda sendiri untuk memperkasa dirinya sendiri.

Dalam sistem ekonomi dunia saat ini, negara-negara maju yang hanya berjumlah 20% menikmati 80% kekayaan alam yang ada di dunia ini, sisanya diperebutkan oleh 80% negara-negara miskin dan berkembang. Tantangan dunia global saat ini bertambah berat terutama apabila dikaitkan dengan kondisi keamanan secara umum. Tantangan-tantangan seperti ini yang harus direspons oleh kaum muda di berbagai belahan dunia untuk mempersiapkan diri mereka sebagai bagian dari perkembangan dunia global. Sejarah dunia akan ditentukan oleh sejarah pemudanya.

Pemuda sebagai ujung tombak yang menjelma menjadi sebuah amunisi dari maju mundurnya sebuah bangsa harus senantiasa siap berkiprah dan memberikan sumbangsuhnya bagi kemajuan negara, sebagaimana yang telah diharapkan oleh proklamator tanah negeri ini. Pemuda diharapkan senantiasa menjadi motor pergerakan kemajuan bangsa.

Sekurang-kurangnya ada tiga resep ampuh memperkuat pembangunan pemuda. *Pertama*, pemuda harus membangun jiwa dengan menanamkan pola pikir dan mempunyai cita-cita melakukan pembangunan pada dirinya sendiri maupun bangsa dan negara. Jika para pemuda tidak mempunyai pola pikir semacam itu, mereka akan terperosok menjadi generasi yang apriori, masa bodoh, dan tidak mau tahu yang terjadi di sekitarnya.

*Kedua*, pemuda harus membekali dirinya dengan keterampilan atau memperkuat kapasitasnya agar lebih dihargai oleh lingkungan di sekitarnya. *Ketiga*, pemuda adalah melakukan proteksi diri dari pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba maupun bentuk kenakalan remaja yang lainnya. Seandainya resep pertama dan kedua di atas sudah dilakukan, pemuda akan secara otomatis mempunyai proteksi sendiri terhadap resep yang ketiga.

Dengan demikian, tiga resep di atas sebenarnya saling mengandaikan satu sama lainnya. Setelah melakukan tiga resep tadi, para pemuda dapat melakukan pengamanan terhadap sosial dan lingkungannya, tentu saja dengan tetap memegang teguh solidaritas sosial. Pemuda dapat menjadi aktor utama dalam pembangunan yang dapat mengantarkan masyarakat pada gerbang kesejahteraan sosial yang dicita-citakan oleh Pancasila.

## Peran Pemuda Sebagai Kekuatan Sosial

Dalam sejarah terbentuknya Indonesia peran pemuda sebagai kekuatan sosial, tidak dapat dipisahkan dari lelehnya meras kemerdekaan dan kedaulatan. Pemuda sebagai aktor revolusi dalam sejarah bangsa memiliki posisi paling strategis dalam membuka kotak pandora nasionalisme. Dengan semangat dan cita-cita luhur yang dibangun dengan idealisme dan kapasitas intelektual, integritas, dan independensinya, kaum muda dalam sejarahnya terbukti telah menancapkan tali pancang bagi identitas yang retak pada masa kolonial. Organisasi kepemudaan, seperti Jong Java, Jong Sumatra, Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, dan sejenisnya merupakan bagian integral dalam pergerakan dan pemberontakan melawan penjajahan.

Revolusi yang dilakukan tanpa lelah dan pesimis mampu mengikat tali rekat segala etnis dan agama dalam semangat nasionalisme yang dikobarkan sehingga sekat agama dan etnisitas melebur dalam kesatuan politis berdasarkan ikatan solidaritas dan prinsip kesamarataan. Ego pribadi dan golongan pada titik ini ditinggalkan untuk lebih mementingkan kepentingan nasional. Bahkan yang sangat prestisius, para *founding fathers* yang umumnya kaum muda mampu menyatukan ragam etnis dan budaya Nusantara dalam bingkai atau ikatan bahasa (*lingua franca*) yang hingga kini mampu merekatkan kita dalam kesatuan dan persatuan di bawah bendera Indonesia. Meskipun baru-baru ini mulai retak setelah peristiwa Timor Timur, Papua, Maluku Utara, dan Aceh, tidak semuanya berhasil keluar dari ikatan keindonesiaan. Kondisi retak patah ini menepis bayangan komunitas politis yang permanen dalam bingkai nasionalisme. Hal ini disebabkan dalam kondisi krisis dan ketidakadilan dapat saja ikatan itu retak apabila tidak diantisipasi sedini mungkin.

Namun demikian, kaum muda pada masa leleh revolusi maupun kini tetap saja memiliki peran dan andinya dalam mengubah formasi sosial dan politik. Hal ini dikarenakan dalam dirinya tertanam kekuatan moral sebagai modal sosial dan kekuatan politik yang mampu mengobarkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Posisi-posisi strategis ini tidak hanya ditopang oleh kekuatan moral dan politik, tetapi ditopang oleh kekuatan intelektual.

Pertawala dalam konflik ini identik dengan vitalitas intelektual, ketahanan jiwa pengetahuan, selalu merasa tidak mapan atau antikomapanan dan daya jangkai atau imajinasi politik ke depan yang menjadi impian setiap kaum muda.

Dalam konteks ini intelektual dan ilmuwan sosial Indonesia Soedjatmoko dalam sebuah kesempatan pernah mengenang semangat dan vitalitas intelektual muda itu dengan menggambarkan kembali sosok Soe Hok Gie sebagai aktor intelektual muda yang cukup memiliki peranan dalam perubahan politik Indonesia dari masa demokrasi terpimpin Bung Karno. Oleh karena itu, dalam sebuah risalahnya ia mengenang sosok anak muda itu sebagai berikut.

Soe Hok Gie adalah salah seorang di antara kaum intelektual yang dinamis dan mempunyai masa depan, seorang di antara generasi sesudah kemerdekaan yang kini telah meninggal dunia dalam suatu kecelakaan selagi mendaki Gunung Semeru. Pelibatalannya secara menyeluruh terhadap usaha-usaha modernisasi dan demokrasi, kejujurannya yang tidak mengenal batas, dan ketiadaan yang sempuma akan perasaan sadar diri dalam menilai perjuangannya, telah memungkinkan dia mengatasi batasan-batasan tradisional yang diletakkan atas dirinya, yang telah banyak dijadikan banyak orang semata-mata karena dia adalah keturunan Cina. Bagi saya, dia merupakan suatu contoh bagi kemungkinan lahirnya suatu tipe orang Indonesia, yakni orang Indonesia yang betul-betul Indonesia. Saya kira pesan inilah yang disampaikan oleh usianya yang pendek itu kepada kita.<sup>14</sup>

Sikap mengenang dan apresiasi Soedjatmoko atas intelektual muda itu mencerminkan bentuk kepercayaan serta harapan dan keyakinan penuh bahwa bangsa ini justru terlahir dari subjek-subjek dinamis, memiliki integritas dan kapasitas dalam mengubah formasi-formasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Dari kaum mudalah *grand* naratif bernama Indonesia ini tercipta. Dari kaum mudalah bangsa ini memiliki jangkauan imajinasi politik Indonesia. Dari kaum mudalah bangsa ini terlahir sebagai negara yang lepas dari belenggu penjajahan dan pertudakan.

<sup>14</sup> Soedjatmoko, 1986, *Ulang Peristiwa*, Jakarta: LP3ES, hal. 239.

Akan tetapi, di mana peran dan kekuatan itu setelah dalam beberapa dasawarsa negeri ini dilanda krisis multidimensional tidak bertepi dan masyarakatnya yang semakin terpuruk oleh gelombang globalisasi ekonomi? Apakah nilai-nilai keluhuran dan keberanian itu telah hilang di kalangan kaum muda sehingga sampai saat ini perannya belum terasa sepenuhnya oleh masyarakat? Apakah ini pertanda kalau obor gagasan kaum muda telah redup ditelan zaman yang menawarkan aneka pesona kuasa dan kapital sehingga seluruh upaya itu kerap terbentur di lumpur kuasa dan modal?

Apabila kita melihat terpaan dan dinamika zaman yang semakin memperlihatkan banalitas tindakan, tindak kekerasan yang semakin menular, konsumerisme, fetisisme komoditas (pemberhalaan atas barang atau komoditas), atau sikap "ateisme" dalam bentuknya yang paling praktis (tampaknya kaum muda saat ini memang terlihat layu di atas pesona dunia) lewat tawaran citra dan tanda dari kebudayaan massa. Walhasil imajinasi politik, kepekaan sosial, integritas moral, dan politik kian redup seiring dengan merebaknya kemiskinan serta apatisme publik atas kepemimpinan bangsa ini.

Oleh karena itu, upaya revitalisasi dan desain baru bagi kepemimpinan intelektual muda harus dinyalakan kembali agar semangat nasionalisme kepemudaan, heroisme, patriotisme, dan idealisme kembali menyatu sehingga mampu menerangi harapan yang kini mulai redup. Dalam konteks ini kita dapat belajar dari pengalaman revolusi kaum muda pada masa lalu. Dengan semangat tersebut, kita dapat memperbarui segala kekurangan masa lalu untuk merespons masa kini.

Hal itu tentu saja membutuhkan pola pengorganisasian yang terpola, memiliki basis komunitas epitemis, integritas, daya jangkauan intelektual, serta sikap menjunjung tinggi kejujuran dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Peran pemuda sebagai kekuatan perubahar dapat bergelora kembali dalam rangka merehabilitasi realitas sosial politik yang terus-menerus dihantam badai kemiskinan dan ketidakpastian masa depan politik Indonesia.

**P**ersoalan kemiskinan dan kepemudaan memang sudah menjadi problem mondial. Mantan sekjen PBB Kofi A. Annan pernah menyerukan dalam sebuah acara peringatan hari Pemuda Internasional tahun 2006 yang bertepatan "Menangani Kemiskinan Bersama: Pemuda dan Pengentasan Kemiskinan".

Ekistensi pemuda di dunia saat ini tercatat lebih dari satu miliar orang. Mereka merupakan sumber daya manusia terbesar bagi pembangunan yang dapat menjadi kunci inovasi dan perubahan sosial positif. Akan tetapi, angka kemiskinan pemuda saat ini telah merampas potensi dunia tersebut. Dalam dunia yang penuh dengan kekayaan, satu dari lima orang berusia 5-24 tahun harus hidup dengan penghasilan kurang dari satu dolar per hari. Setengahnya hidup dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari.

Selain itu, seperempat jumlah buruh dunia adalah pemuda dan setengah lainnya tidak bekerja. Lapangan kerja mengalami kesulitan dalam menyediakan pekerjaan bagi pemuda, kecuali bagi mereka yang berpendidikan tinggi. Tanpa usaha yang baik, pemuda akan tertinggal dan jatuh dalam kemiskinan. Pemuda akan sulit meraih pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta peluang kerja. Setelah waktu yang cukup lama, para pemuda yang kurang beruntung akan menghadapi rintangan yang lebih tajam menuju kemajuan.

Kemungkinan lain pemuda tersebut tidak dapat mengakses kebutuhan yang umumnya datang dengan pekerjaan jangka panjang.



Sumber: [www.ipsk.com](http://www.ipsk.com)

Lapangan kerja hanya menyediakan pekerjaan bagi mereka yang berpendidikan tinggi.

seperti akses terhadap aset dan sumber daya, jaringan sosial yang kuat serta status dalam mengambil keputusan dalam keluarga atau komunitas. Tantangan yang akan kita hadapi tampak jelas, yaitu kita harus menaruh perhatian pada pendidikan yang menuju dunia kerja serta meningkatkan kemampuan pemuda dalam mencari lapangan pekerjaan yang produktif dan menyeluruh. Semua itu harus menjadi tujuan sentral dalam strategi pembangunan nasional, termasuk kebijakan pengentasan kemiskinan.

Pada konteks ini Indonesia memiliki *resource* kepemudaan cukup tinggi. Strategi mengoptimalkan peran pemuda dalam upaya pembangunan dan kemandirian ekonomi serta pengentasan kemiskinan yang dibayang-bayangi dengan sindrom keterbelakangan dan ketertinggalan negara di kancah global merupakan masalah yang harus dihadapi Indonesia. Untuk menggenggam kesempatan tersebut dan melipatgandakan usaha pembangunan bangsa, peran serta pergerakan kaum muda adalah sebuah keharusan guna membebaskan potensi kalangan pemuda untuk kebaikan pembangunan bangsa.

Jika melihat mozaik perjalanan bangsa Indonesia, pemuda Indonesia senantiasa menjadi pelopor dan pemimpin bangsa dalam berbagai tahap perjuangan. Kebangkitan nasional tahun 1908 dipelopori oleh kaum muda. Soempah Pemoeda tahun 1928 yang telah merekatkan bangsa menjadi satu karya pemuda. Proklamasi 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan pun dipelopori kaum muda.



Sumber: Kompas, 02 Mei 2008

*Kebangkitan nasional pun dipelopori oleh kaum muda.*

Demikian pula dalam proses pengisian semangat kebernegaraan dan keberbangsaan dalam bingkai keindonesiaan pemuda menjadi pelaku utama. Oleh karena beberapa faktor dan perubahan kondisi bangsa fenomena pemuda sebagai pelopor kebangsaan, baik pada arus pembangunan ekonomi maupun pemeliharaan spirit

republikanisme mengalami kemerosotan. Fenomena ini tampak dalam pergerakan pemuda pada era pascamundurnya Soeharto. Pergerakan muda dan OKP lebih menunjukkan sikap politis dan berafiliasi pada partai politik. Polarisasi ini menyebabkan melemahnya idealisme kepemudaan dan yang muncul ke permukaan publik hanya sikap pragmatisme belaka. Inilah tugas pergerakan kepemudaan saat ini di tengah melemahnya peran dan fungsi pemuda yang terpolarisasi oleh ideologi politik.

Meminjam terminologi Ortega Y. Gasset, pemuda dipahami sebagai *agent of change*.<sup>13</sup> Dalam konteks sejarah Indonesia, pemuda menurut terminologi Ortega mendapatkan perwujudannya. Pemuda memiliki *inherensi* kepeloporan pembebasan dari ketidakadilan dan imperialisme atau kolonialisme.

Perubahan zaman memiliki implikasi terhadap perjuangan dan peran pemuda masa kini. Pada era kolonialisme peran pemuda sebagai agen pembebasan. Dalam konteks kekinian peran pemuda sebagai pembebas kemiskinan dan kebodohan. Peran pemuda masa lalu dan kini memiliki kesamaan tujuan, yaitu melenyapkan ketidakadilan.

Menjaga tradisi kepeloporan pemuda sebagai *agent of change* merupakan tugas pemuda dalam menumbuhkan sikap kemandirian bangsa. Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas mengenai peran pemuda dalam kemandirian bangsa.

## Optimalisasi Peran Pemuda dan Kemandirian Ekonomi

Sebagai aktor perubahan sosial, pemuda tidak hanya menyangand status sebagai pemimpin masa depan, tetapi juga sebagai tulang punggung bangsa dalam mengisi pembangunan. Pada tahun 1928 para pemuda Indonesia dari beragam latar belakang suku, agama, dan bahasa membulatkan tekad demi menggalang persatuan bangsa guna berjuang melawan penindasan kaum kolonialis. Sejak saat itu setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati hari Sumpah Pemuda.

Manifesto yang tertanam sejak 80 tahun lalu telah berulang kali memberikan arah dan semangat pergerakan pemuda dalam

<sup>13</sup> Yudi Latif, 2002. *Revolusi Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press, hal. 12.

menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran. Oleh karena itu, proses sejarah Indonesia tidak akan pernah luput dari lembaran sejarah kepemudaannya.<sup>16</sup>

Dahulu signifikansi peran pemuda jarang disoroti dan digarap secara serius oleh banyak pihak. Misalnya aset intelektual muda yang tersebar di luar negeri. Berbeda pada masa prakemerdekaan, pergerak pemuda Indonesia tersebar di lima benua dan puluhan negara yang terbentang dari timur-barat hingga utara-selatan dunia.

Akan tetapi, sangat disayangkan penyebaran pemuda di berbagai dunia dalam rangka mendukung pembangunan bangsa yang berkelanjutan Kepemimpinan Internasional belum teroptimalkan. Cora pergerakan pemuda setelah tahun 1928 (khususnya pasca kemerdekaan) mempunyai tantangan yang berbeda dengan pergerakan yang diusung sebelum tahun 1928. Pergerakan pemuda pada era globalisasi menghadapi tantangan yang justru semakin kompleks.

Selain perjuangan untuk memberangus KKN dan menegakkan nilai-nilai demokrasi serta HAM, yang tidak kalah pentingnya, yaitu menggalang kekuatan guna menghadapi persaingan ekonomi global, destruksi budaya dan moral generasi, intervensi kedaulatan bangsa serta reposisi Indonesia di tengah-tengah realitas ekonomi dan politik internasional. Tantangan tersebut pada saat ini belum menjadi isu strategis dari sebagian besar gerakan pemuda di tingkat nasional.

Walaupun tantangan yang dihadapi oleh pergerakan pemuda pada kedua zaman tersebut berbeda, tetapi berdasarkan sifatnya dapat ditarik satu benang merah yang sama. Tantangan global seperti perdagangan bebas dan hadirnya organisasi keuangan internasional merupakan alat yang dapat mengusik kedaulatan bangsa yang berujung pada *neo colonialism*.<sup>17</sup> Oleh karena itu, walaupun lampak berbeda, yang sedang kita hadapi saat ini masih "musuh" yang sama, yaitu penjajahan dan hegemoni asing.

Dengan ketersediaan akses dan sumber informasi yang tidak terbatas, pemuda Indonesia di luar negeri seyogyanya mengambil peran

<sup>16</sup> Benedict Anderson. 1990. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, hal 43.

<sup>17</sup> Leela Gandhi. 2001. *Teori Postkolonial: Upaya Menantahkan Hegemoni Barat*. (Terjemahan). Yogyakarta: Qalam, hal 132.

signifikan dengan cara menggalang kepemimpinan internasional guna menghadapi berbagai tantangan di atas. Sebagai kaum intelektual seharusnya transfer informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dilakukan melalui berbagai bentuk dan cara bagi mereka yang berada di Indonesia. Hal ini sama halnya dengan yang telah dilakukan oleh para intelektual pendahulu kita yang menempuh pendidikan di Belanda pada masa prakemerdekaan. Melalui dunia pendidikan kaum muda pribumi berkenalan dengan gagasan atau ide-ide Barat tentang sosialisme, demokrasi, nasionalisme, bahkan marxisme. Lewat kontak-kontak intelektual inilah bangkit kesadaran politik di kalangan muda terdidik.<sup>18</sup>

Salah satu contohnya Mohammad Hatta. Beliau mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia dengan tujuan membangun basis pendidikan ilmu pengetahuan kepada segenap rakyat Indonesia (Nicholas Tarling, 1999). Setiap pemuda Indonesia di mana pun harus mampu menjadi duta bangsa dalam setiap aspek diplomasi kehidupan, baik itu di bidang politik, ekonomi, pendidikan, ataupun budaya. Lebih dari itu, setiap pemuda Indonesia harus dapat merevitalisasi peran dan fungsinya sebagai bagian dari *global village* guna terbentuknya *soft power* dalam rangka meningkatkan reputasi dan posisi tawar Indonesia di mata dunia, sebagaimana telah dinikmati hasilnya oleh Cina, India, dan Brasil.

Hal ini tentu memiliki relevansi dengan Sumpah Pemuda. Hal utama yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan pemuda di tingkat internasional adalah kesatuan. Menurut Antonio Gramsci, tanpa adanya



Sumber: Lukisan Sejarah

Moh. Hatta adalah salah satu tokoh yang peduli terhadap pendidikan kaum muda.

<sup>18</sup> John Ingleson, 1983. *Jalan ke Pengasingan: Perjuangan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta: Pustaka LP3ESJ, hal 79.

kesatuan perjuangan menghadapi tantangan akan kandas diterpa gelombang hegemoni negara-negara besar. Proses terjadinya Sumpah Pemuda sangat relevan bagi pergerakan pemuda untuk digunakan sebagai cemin pembentukan kepemimpinan pemuda Indonesia pada masa yang akan datang.

*Pertama*, para pemuda dan pelajar Indonesia baik yang bersifat perorangan maupun yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) atau organisasi sejenisnya dalam satu kawasan dunia yang sama, dapat mengikatkan diri dalam satu jejaring koordinasi awal untuk tahapan konsolidasi. Akan tetapi, sampai saat ini baru beberapa kawasan saja yang memiliki jaringan koordinasi demikian.

*Kedua*, jika telah terbentuk jejaring koordinasi awal di tiap-tiap kawasan dan daerah kaum muda atau pelajar Indonesia proses menyatukan seluruh jejaring kawasan yang ada bukanlah suatu hal yang mustahil. Hal ini berguna untuk membentuk kepemimpinan pemuda internasional yang bersinergi dengan kaum muda di dalam negeri. Contohnya negara Prancis. Hampir setiap tahun mengadakan Temu Pemuda Internasional (*Rencontres Internationales de Jeunes*) secara resmi guna membahas arah dan kontribusi pergerakan mahasiswa yang berada di seluruh penjuru belahan dunia.

*Ketiga*, guna menyamakan arah dan gerakan pemuda Indonesia, koordinasi dan komunikasi yang intensif harus selalu dilakukan antara pemuda di dalam dan di luar negeri. Tanpa adanya koordinasi dan kerja sama yang harmonis, kekuatan pemuda Indonesia tidak akan terlalu berarti, baik pada level nasional maupun internasional.

*Keempat*, dengan begitu besarnya aset pemuda di luar negeri pemerintah sebaiknya memfasilitasi dan memberikan dukungan penunjang demi terciptanya kepemimpinan pemuda luar negeri dengan sistem koordinasi triumvirat yang melibatkan Departemen Pemuda dan Olahraga, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Pendidikan Nasional.

Tahun 2008 merupakan waktu yang sangat tepat untuk mengoptimalkan peran pemuda sekaligus menancapkan gelombang keenam kebangkitan Indonesia. Pasalnya, selain akan memasuki usia ke-80 peringatan Sumpah Pemuda, pada saat yang bersamaan bangsa

Indonesia juga akan memperingati 100 tahun hari Kebangkitan Nasional.

Apakah ini sebuah mimpi? Tentu tidak. Ini adalah mimpi yang sangat mungkin terwujud. Seorang Martin Luther pernah mengatakan, *"I have a dream today. I have a dream . . ."* Berkat perjuangan dan komitmen bersama akhirnya mimpi tersebut berhasil ia raih.



Sumber: [www.flickr.com](http://www.flickr.com)

*Pemuda adalah agent of change.*

Mengapa pemuda sebegitu penting dalam mengisi pembangunan sebuah bangsa dan upaya mengentaskan kelatengan kemiskinan di dalam negeri? Secara umum terdapat dua sudut pandang yang membuat posisi pemuda strategis dan istimewa. *Pertama*, secara kualitatif pemuda memiliki idealisme yang murni, dinamis, kreatif, inovatif, dan energi yang besar bagi perubahan sosial. Idealisme yang dimaksud adalah hal-hal yang secara ideal mesti diperjuangkan oleh para pemuda, tidak untuk kepentingan diri dan kelompoknya, tetapi untuk kepentingan luas demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

*Kedua*, secara kuantitatif terlihat bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 210 juta orang. Menurut data terakhir Depdiknas jumlah tersebut, apabila kelompok yang dikategorikan generasi muda atau yang berusia di antara 15–35 tahun, diperkirakan berjumlah lebih dari 78–90 juta jiwa atau 37–40% dari jumlah penduduk seluruhnya. Jika kriteria 15–45 tahun tentu jumlahnya lebih besar lagi. Sebagian besar dari kelompok usia ini adalah tenaga kerja produktif yang mengisi berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, dapat dipahami pemuda berpeluang menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku-pelaku pembangunan maupun generasi penerus untuk berkibrah pada masa depan.

Pemuda memiliki kelebihan yang secara substansial terkait dengan idealismenya yang masih murni. Sepanjang sejarah pemuda terbukti telah memiliki posisi dan peran yang strategis dalam menentukan arah

sejarah bangsa. Dalam bidang politik pemuda telah menunjukkan sumbangannya, yaitu turut mendorong proses demokratisasi bangsa. Tugas utama para pemuda saat ini adalah mendorong terwujudnya agenda-agenda reformasi dan demokratisasi serta perbaikan ekonomi kerakyatan guna menunjang kelangsungan negara dan bangsa.

Pemuda Indonesia harus berani melakukan otokritik sekaligus membenahi diri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan se berkiprah di tengah-tengah masyarakat, serta mampu mewarnai berbagai kehidupan bangsa. Bangsa ini membutuhkan peran dan sumbangs kalangan pemuda secara nyata. Oleh karena itu, tugas dan peran pemuda tidaklah ringan. Pemuda Indonesia diharapkan mampu mengambil setiap peluang yang ada dan memanfaatkan secara baik demi kemajuan bangsa.

Fenomena kemiskinan mengitari bangsa Indonesia sampai reputasi ini menginjak usia yang sudah tidak muda lagi. Kekayaan sumber daya alam Indonesia, hamparan yang tidak terhingga tentu tidak pantas untuk bangsa ini menyandang predikat negara miskin. Apa yang menyebabkan bangsa ini terpuruk dan nyaris tidak berdaya bersaing dalam kancah perekonomian global?

Pembangunan kemandirian ekonomi nasional harus dilakukan dengan menggandeng peran serta pemuda sebagai upaya pengkaderan generasi penerus bangsa. Max Weber mengalamatkan dan memercayakan perubahan dengan "aliran kultural".<sup>18</sup> Oleh karena itu, Indonesia harus menghidupkan kemandirian ekonomi pada level bawah dengan menambat peran pemuda sebagai aliran kultural bagi masa depan ke-baqa-an ekonomi Indonesia pada masa datang.

Upaya kemandirian ekonomi pada jiwa pemuda Indonesia sebagai agen perubahan dan moderasi bagi peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara dilakukan dengan cara menumbuhkan sikap dan jiwa kewirausahaan di tingkat bawah melalui penumbuhkembangan cinta pada pemberdayaan sumber daya alam yang terkandung di daerah daerah subur sebagai basis ekonomi. Hal ini dikarenakan kemampuan ekonomi hanya bisa berpijak pada upaya pembangunan ekonomi pada

<sup>18</sup> Yudi Latif, 2002. *Revolusi Demokratis*. Jakarta: Rajawali Press, hal 12.

akar-akar masyarakat bawah bukan pada penciptaan masyarakat kelas menengah baru di pedesaan. Hal ini dikarenakan pola pembangunan secara nyata tidak mampu mendistribusikan keadilan sosial, tetapi hanya menciptakan kesenjangan dan ketimpangan belaka.

Jika tercipta kemandirian ekonomi dengan peningkatan sumber daya pemuda untuk menggunakan sumber daya alam yang terkandung di daerah seluruh Nusantara, ketimpangan, kemiskinan, keterbelakangan, dan eksklusi sosial akan hilang dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan pemuda dan masyarakat adalah agen produksi sekaligus pemegang kendali ekonomi nasional. Situasi ini mendorong integrasi sosial terjalin secara alami. Tidak ada hubungan superior-inferior antara si agen produksi dan konsumen atau antara negara dan masyarakat. Dengan kata lain, terjalin pola hubungan yang saling memperkuat satu sama lain.

## **Organisasi Kepemudaan dan Pelopor Antikemiskinan**

Eksistensi pemuda merupakan elemen penting dalam sebuah bangsa. Pemuda harus memiliki kepedulian mengenai keterpurukan ekonomi yang terjadi satu dekade ini. Rasa kepedulian organisasi kepemudaan terhadap kondisi yang terjadi di negara bisa membangun *resource* penghasilan melalui kegiatan ekonomi mikro di tingkat pedesaan. Optimalisasi peran organisasi yang memiliki kaki di tingkat-tingkat daerah adalah sangat penting untuk menumbuhkan ekonomi tingkat *grass root* di pedesaan.

Kemiskinan yang semakin bertambah menjadi satu tantangan bagi para ormas pemuda untuk ikut terlibat dalam mengatasinya. Banyak ormas yang mempunyai cabang sampai ke tingkat ranting, tetapi kontribusi mereka dalam mengatasi kemiskinan masih minim. Banyak ormas masih terjebak dalam kehidupan politik yang ujungnya bermuara pada kekuasaan, sementara persoalan kemiskinan seolah-olah diupayakan. Oleh karena itu, organisasi pemuda selayaknya menjadi penggagas pengentasan kemiskinan.

Lemahnya mentalitas pemuda dalam bidang pembangunan ekonomi dan hasrat yang berlebih pada kekuasaan bisa dilihat secara

kasatmata melalui fenomena antusiasme pemuda dalam pilkada dan sikap pemuda yang melupakan cara menggerakkan ekonomi daerahnya. Para pemuda seolah tidak ingin memajukan potensi wilayahnya karena mereka lebih tertarik untuk menjadi PNS. Padahal, potensi ormas tersebut cukup besar dengan jaringannya yang mencapai kelurahan. Potensi besar ini seharusnya dimaksimalkan. Setidaknya setiap ormas kepemudaan sudah memikirkan cara menggerakkan perekonomian di wilayah terbawahnya, seperti dengan mendirikan koperasi atau BMT.

Keberadaan ormas kepemudaan yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan potensi bangsa, sesungguhnya telah menunjukkan dinamika. Hal ini seiring dengan perkembangan zaman untuk membuktikan darmabaktinya secara terus-menerus dalam pembangunan nasional demi kepentingan masyarakat, agama, bangsa, dan negara.

Organisasi kemasyarakatan pemuda selayaknya berusaha membentuk citra diri sebagai organisasi modern yang memberikan tekanan pada pengelolaan manajemen profesional. Akan tetapi, di sisi lain organisasi pemuda sebagai organisasi keagamaan memberikan tekanan yang sama pentingnya pada aspek-aspek transedental berupa perbaikan moralitas bangsa. Selain itu, ormas kepemudaan senantiasa memantapkan identitas dan integritas pemuda Indonesia dengan terus-menerus memupuk semangat, nilai-nilai patriotisme, kejujuran, kepeloporan, dan kewaspadaan terhadap bahaya ekstremisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Perkembangan ekonomi global yang terjadi saat ini ditandai kebijakan berbagai negara yang mendorong bekerjanya mekanisme pasar dan persaingan dengan cara mengurangi campur tangan langsung negara atau pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana negara lain, Indonesia tidak dapat mengelak terhadap perkembangan baru yang muncul dalam globalisasi ekonomi.

Kita sadari sampai sekarang Indonesia masih menghadapi kendala struktural dalam meningkatkan daya saingnya. Pada era pasar global daya saing suatu negara tidak lagi ditentukan keunggulan komparatif, tetapi telah beralih pada keunggulan kompetitif yang berbasis penguasaan teknologi, SDM, dan inovasi produk secara berkelanjutan.

Bagi dunia usaha, tantangan yang ada adalah pola operasi dunia usaha dalam lingkungan yang sangat dinamis, kompleks, dan ketat dalam persaingan.

Upaya untuk meningkatkan daya saing dapat ditempuh dengan cara meningkatkan efisiensi ekonomi dan pembaruan manajemen. Peningkatan daya saing dilakukan baik pada sektor dunia usaha sebagai pelaku utama maupun pada pemerintah sebagai unsur pendorong dan pembina kegiatan dunia usaha.

Melihat adanya keterkaitan antara daya saing dengan pembangunan, kebijakan harus diarahkan pada perbaikan efisiensi dan efektivitas seluruh mata rantai kegiatan yang terkait dengan berbagai proses produksi sampai pada konsumen pemakai. Perbaikan efisiensi menyangkut komitmen kuat bertujuan untuk memperbaiki standar teknis dalam produksi, serta perangkat aturan sosial dan ekonomi dalam menunjang produksi dan pemasaran.

Pembangunan ekonomi melalui tahapan perencanaan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pembangunan yang dicapai melalui restrukturisasi dan privatisasi menjadikan stabilitas keamanan dan pemerataan mampu meningkatkan taraf hidup rakyat. Akan tetapi, prestasi pembangunan ekonomi yang telah dicapai tidak mampu bertahan terhadap guncangan dan gangguan internal dan eksternal. Krisis ekonomi yang telah memporandakan struktur ekonomi menyadarkan kita tentang kegagalan dalam strategi pembangunan ekonomi.

Strategi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kelompok usaha besar dan sektor modern dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tanpa diikuti oleh pengembangan kemampuan, potensi, dan sumber daya dalam negeri, terutama potensi serta prakarsa ekonomi umat, menyebabkan struktur perekonomian nasional sangat rapuh. Pertumbuhan ekonomi ini sangat rawan terhadap gejolak sosial politik serta peka terhadap krisis dan fluktuasi perekonomian internasional.

Dewasa ini situasi perekonomian ditandai dengan kompleksnya permasalahan ekonomi sejalan dengan kecenderungan global perekonomian dunia sehingga diperlukan partisipasi aktif semua pelaku ekonomi, termasuk perlunya kebijakan ekonomi yang memberikan

peluang bagi berkembangnya ekonomi umat atau ekonomi yang berakar tunjang pada basis-basis kerakyatan pada level bawah.

Agar perekonomian nasional semakin berkembang, diperlukan kebijakan yang mendukung tumbuhnya pelaku ekonomi umat, serta lingkungan dan iklim dunia usaha sehat yang memungkinkan semua potensi bangsa dapat berkembang. Selain itu, diperlukan pembinaan usaha terhadap ekonomi umat melalui berbagai skema, seperti fasilitas pemodal, sarana perlindungan, sarana tempat usaha, serta sarana pendidikan, dan pembiayaan usaha.

Pembangunan ekonomi telah melahirkan banyak peluang dan kesempatan berusaha yang memungkinkan segenap potensi untuk mengaktualisasikannya serta kemampuan yang dimiliki untuk berkembang. Pembangunan ekonomi telah melahirkan banyak pengusaha baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar.

Akan tetapi, harus diakui bahwa ormas kepemudaan sebagai salah satu komponen bangsa belum berhasil dan diuntungkan dengan terbukanya peluang dan kesempatan dalam proses pembangunan ekonomi. Situasi dan iklim politik selama ini kurang kondusif dan belum memberi peluang pada kewiraswastaan ormas kepemudaan untuk berkembang, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi yang memungkinkan tumbuhnya tingkah laku kewirausahaan, dan berhasil menciptakan suatu lingkungan sosial ekonomi yang mendorong munculnya wiraswastawan di kalangan pemuda yang bekerja secara optimal.

Banyaknya kelemahan dan adanya struktur yang menghambat kemajuan ormas kepemudaan dalam mengembangkan potensi kurang tergarap dengan baik, baik potensi sumber daya manusia, etos kerja, maupun keterampilan. Untuk mengatasi kelemahan dan mengejar keteringgalan dalam bidang ekonomi, ormas kepemudaan perlu mendorong tumbuhnya wirausaha-wirausaha di lingkungan sosial, baik pada tingkat kultural maupun sistem nilai, yang mampu membangkitkan jiwa kewirausahaan. Pemberdayaan ekonomi ormas pemuda dilakukan melalui perencanaan dan aksi nyata yang didukung oleh kebijakan moneter dan perkreditan, serta didukung oleh pasar yang efisien. (lihat bab IV).

Tantangan yang dialami negara berkembang selalu berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Semua itu membutuhkan partisipasi konstruktif semua elemen bangsa. Organisasi kepemudaan merupakan salah satu elemen di dalamnya. Apalagi dalam konteks ekonomi global, peran pemuda sangat dibutuhkan baik dalam upaya memperkuat pembangunan ekonomi nasional maupun mengantisipasi efek negatif ekonomi global yang dikenal dengan neoliberalisme bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran serta dan kontribusi organisasi pemuda dalam pembangunan ekonomi bisa dilakukan melalui pengawasan sekaligus pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan aspek sosial dan ekologis, yaitu menumbuhkan kegiatan ekonomi yang berprinsipkan penghargaan dan keseimbangan pada sumber daya sosial dan lingkungan. Selain itu, organisasi kepemudaan bisa menumbuhkan prinsip kesejahteraan bersama sebagai tujuan pembangunan ekonomi.

Menggagas masa depan bangsa dan mempercepat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sudah lama diimpikan oleh kaum muda. Oleh karena itu, ormas kepemudaan sebagai peranti pembangunan bangsa secara ekonomi perlu menyodorkan pemikiran yang konseptual dan implementatif yang terukur, di antaranya sebagai berikut.

*Pertama*, memompa dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan kemampuan daya beli merupakan ukuran terbangunnya ekonomi sosial pada akar rumput masyarakat. Usaha ini hanya bisa terjalin apabila pemberdayaan ekonomi pedesaan diikuti dengan pemberian modal usaha kecil seluas-luasnya. Secara geografis 80% masyarakat Indonesia hidup dan tumbuh di pedesaan. Selebihnya di perkotaan.

Artinya apa? Secara demografi sosial, kehidupan masyarakat bangsa Indonesia mayoritas di pedesaan. Oleh karena itu, upaya pembangunan ekonomi yang sentralistik di kota-kota besar adalah model pembangunan yang sangat keliru diterapkan dalam konteks masyarakat dan kultur masyarakat Indonesia.

Jika pembangunan masih menggunakan model pembangunan ekonomi kolonial yang bercorak sentralistik dan penguasaan basis

produksi hanya pada segelintir orang di perkotaan, hal ini sama saja dengan usaha pembangunan model ekonomi pada masa kolonial. Model pembangunan seperti ini akan berakibat terciptanya struktur ekonomi yang lemah dan secara tidak langsung akan memproduksi ulang ketimpangan dan keterbelakangan sebagaimana kebijakan koloni dahulu. Jika modal ekonomi sentralistik diterapkan kembali, cita-cita politis keindonesiaan sebagai masyarakat pascakolonial dapat dipastikan kurang menyentuh akar rumput masyarakat yang umumnya hidup di pedesaan.

Indonesia sebagai wujud dari perjuangan politis mengidealkan cita-cita keberpihakan pada kebersamaan, kesetaraan, dan kemakmuran berbasis kerakyatan atas nama Indonesia. Oleh karena itu, harus ada sinergi dan kesesuaian cita-cita politik keindonesiaan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pedesaan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia.

Penciptaan ekonomi pedesaan dengan menghidupkan kembali perangkat-perangkat pedesaan sudah terbangun sejak lama. Sejarah membuktikan bahwa sebelum datangnya era kolonial ekonomi berbasis pedesaan sudah terbangun, yaitu selain sebagai administrasi kelembagaan, desa sebagai sentrum kegiatan ekonomi. Akan tetapi, hal itu berubah drastis ketika kolonialisme tiba di Nusantara dengan kebijakan sentralisme ekonomi yang mendampinginya. Pada akhirnya, kebijakan model ekonomi seperti ini telah memporak-porandakan struktur ekonomi Nusantara.

Anehnya, sistem sentralisme ekonomi kolonial diikuti oleh model pembangunan ekonomi Orde Baru yang lebih menganut sentralisme ekonomi dan politik. Sampai memasuki orde reformasi usaha itu belum dapat direalisasikan. Usaha itu masih berada pada level retorik dan gagasan belum pada level implementasi pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di pedesaan.

Revitalisasi peran ekonomi pedesaan yang berbasis sosial berarti segala kegiatan ekonomi dilakukan sebagai usaha untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat sendiri, sebagaimana teori-teori ekonomi klasik yang digambarkan sejak 400 tahun Sebelum Masehi. Misalnya filsuf Plato dan Aristoteles menegaskan bahwa tujuan kegiatan ekonomi

adalah kemakmuran bersama atau *civic virtues*<sup>29</sup> sebagai landasan etis dalam melakukan pembangunan ekonomi berbasis sosial.

Pikiran-pikiran ekonom klasik telah terserap dalam gagasan-gagasan *founding fathers* bangsa sebagai model pembangunan ekonomi yang berkesesuaian dengan Indonesia. Misalnya Bung Hatta dan Sutan Sjahrir memiliki gagasan ekonomi yang bercorakan republikanisme dan kerakyatan melalui model koperasi sebagai sistem pembangunan yang paling cocok bagi Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan wujud pembebasan dari kelidakadilan serta ketimpangan dan bukan menciptakan disparitas kelas sosial yang menganga.

Berdasarkan gagasan dan pikiran Bung Hatta (sang proklamator) terdapat dua aspek pokok dalam pembangunan ekonomi. *Pertama*, keindonesiaan dipahami dalam dua hal, yaitu transformasi ekonomi dan transformasi sosial (*economic and social transformation*). *Kedua* aspek ini terbaca jelas dalam pemikiran Bung Hatta, yaitu satu dan lain tidak bisa dipisahkan sehingga keduanya membentuk suatu kesatuan yang utuh.

*Kedua*, membangun perencanaan program pembangunan ekonomi yang berbasis rakyat. Melibatkan rakyat dalam pembangunan sarana dan prasarana sebagai pendorong atau stimulan bagi peningkatan pendapatan.

Upaya pembangunan ekonomi yang mengakar pada level masyarakat bawah sebagai pelaku ekonomi, tentu tidak dipahami sebagai sebuah upaya pembangunan ekonomi sosialisme yang berwajahkan ekonomi komando negara. Akan tetapi, ekonomi member ruang luas pada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi adalah kegiatan yang melibatkan berbagai macam elemen dan institusi sosial dalam sebuah negara.

Secara konkret, jika kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama ekonomi, pelibatan aktif institusi dan individu masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan. Hal ini bisa dilakukan dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk membangun ekonomi. Contoh kepemilikan tanah yang dianggap basis penguatan

<sup>29</sup> Michael Dwyer, 2008, *Filosof Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, Yogyakarta: Pustaka, hal. 10.

ekonomi nasional yang secara demografi ekonomi lebih cocok pada pengembangan pertanian dan agrobisnis sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.

Pengikutsertaan rakyat dan elemen-elemen masyarakat dalam sebuah struktur sosial pembangunan ekonomi nasional, dapat dipelajari pada negeri Tirai Bambu, Cina, yang sukses membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Pembagian hak milik tanah sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional negeri tirai bambu tersebut mengalami keberhasilan.

Sebenarnya, gagasan pelibatan elemen-elemen masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional sudah ditegaskan oleh Bung Hatta pada tahun 1934 sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia. Bung Hatta pernah menulis "*Ekonomi Rakyat dalam Bahaya*". Tulisan Bung Hatta telah menjadi dasar konsep ekonomi kerakyatan untuk melawar mengenyahkan sistem ekonomi kolonial Belanda yang didukung atau dibantu oleh kaum aristokrat dari sistem feodalisme di dalam negeri dan pihak-pihak swasta asing tertentu sebagai komprador pihak kolonial Belanda.

Usaha untuk mengenyahkan sistem kolonial ini adalah landasan utama perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Orang yang memahami sejarah ekonomi Indonesia harus mengetahui bahwa penjajahan Belanda di bidang ekonomi berintikan modal kolonial (*kolonial-kapital*) yang bermula dari kolonialisme VOC dan *cultuurstelsel*, pelaksanaan Undang-Undang Agraria 1870, sampai beroperasinya investasi swasta asing lainnya dan benua Barat (Hatta, 1931).

Bung Hatta mengemukakan keadaan struktur sosial ekonomi pada zaman kolonial Belanda di Indonesia menunjukkan golongan rakyat pribumi merupakan mayoritas menempati stratum terbawah dalam struktur sosial ekonomi. Ekonomi rakyat massa pribumi berada dalam posisi tertekan sebagai stratum terbawah dalam konstelasi ekonomi.

Analisis Hatta mengenai dialektik hubungan ekonomi menunjukkan istilah yang disebut "*interlinked transactions*" dalam proses pertukaran yang bersifat eksploitatif. Analisis itu juga menunjukkan adanya "*forced commerce*" atau "*forced sales*" yang merupakan manifestasi kekuasaan pasar yang dimiliki oleh para pedagang. Secara keseluruhan, kekuasaan sosio ekonomi yang dimiliki oleh para pedagang perantara terkandung

dalam skema "orientasi-ratif" yang dapat ditipologikan dalam bentuk ancaman, pemaksaan, manipulasi, olontas, dan kepemimpinan paksa.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Indonesia ke depan harus melibatkan rakyat terutama generasi muda sebagai pelaku ekonomi. Selain itu, bagi para pelaku ekonomi kegiatan ekonomi hendaknya berwujud nasionalisme sebagaimana yang dicita-citakan Bung Hatta di depan, yaitu transformasi ekonomi sekaligus transformasi sosial di dalamnya.

Ketiga, menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata sebagai landasan penyusunan operasionalisasi pembangunan ekonomi. Prioritaskan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dalam operasionalisasi pembangunan ekonomi yang didasarkan pada usaha menyegarkan pemahaman mengenai ekonomi itu sendiri. Pendasaran ekonomi tidak dibangun di atas perhitungan yang "bebas nilai" melalui pendekatan matematik yang disimpulkan dari aksioma yang sangat umum, tetapi dibangun di atas studi tentang manusia dan masyarakat. Dengan kata lain, ekonomi selalu berangkat dari sebuah konteks persoalan yang dihadapi manusia dan masyarakat.<sup>22</sup> Artinya, ekonomi bukanlah perhitungan matematis melainkan suatu perhitungan moral dan etis yang memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan manusia. Ekonomi tidak selalu berbicara tentang logika matematik, tetapi memfokuskan perhatiannya pada perasaan, kebutuhan, dan hasrat manusia.

Dengan pemahaman ekonomi di atas, persoalan ekonomi tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi belaka, yaitu menikmati kekayaan dan penyebaran kekayaan yang terjadi dalam masyarakat. Singkatnya, kegiatan ekonomi merupakan upaya membangun kebahagiaan manusia, bukan pembangunan untuk kekayaan. Sangat keliru jika memahami ekonomi sebagai upaya pencarian kekayaan secara abstrak kemudian bangga dengan angka yang dicapai.

Dengan penyegaran pemahaman ekonomi di atas akan melahirkan usaha pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada ekonomi. Usaha

<sup>21</sup> Prof. Dr. Sigit Anit, 2002. *Bung Hatta Bapak Revolusi Rakyat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, hal. 231.

<sup>22</sup> Michael Dui, 2008. *Fitrah Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*. Yogyakarta: Kanisius, hal. 100.

ini dapat mendorong kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah bangsa bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, termasuk oleh mereka yang terjatuh dalam jeram kemiskinan. Kriteria minimalnya adalah terpenuhi seluruh kebutuhan material pokok semua orang melalui pengembangan ekonomi kerakyatan. Inilah hak ekonomi setiap warga negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan dan dihargai oleh sebuah institusi sekelas negara dan lingkungan sosial. Sebagaimana termaktub dalam hak-hak konstitusi bangsa Indonesia.

Selain beberapa hal di atas, perlu dikembangkan dan diturunkan satu per satu menjadi konsep yang terukur dan sistematis sebagai pedoman perbaikan ekonomi nasional yang utuh guna mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Politik yang sehat harus dibangun di atas jiwa dan moralitas politik yang benar. Pembangunan iklim politik dengan segenap elite pelaku yang memiliki *altruisme* politik kerakyatan, dibangun dengan kecerahan dan optimisme akan menghasilkan pembangunan bangsa yang berbuah manis. Hal tersebut bisa dicapai melalui beragam penyelenggaraan untuk membentuk iklim sosial ekonomi yang mendukung dalam sebuah bangsa.

*Pertama*, sistem demokrasi langsung dengan model pemilihan umum langsung. Pemilihan anggota parlemen dan presiden secara langsung memungkinkan seluruh rakyat terlibat dalam proses partisipasi politik. Melalui pendidikan masyarakat akan memiliki kebudayaan yang berperadaban dan masyarakat yang bermartabat.

*Kedua*, pembangunan pendidikan ditempatkan sebagai strategi pembangunan ekonomi dan politik dalam kerangka pemantapan budaya bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan yang merata. Pembangunan pendidikan yang mencerdaskan akan mentransformasikan kebaikan dan kesejahteraan rakyat sebagai cita-cita luhur sebuah bangsa.

Pembangunan pendidikan merupakan gerakan pembangunan kultural. Hal ini dikarenakan jika kita belajar pada sejarah, tidak ada kemajuan sebuah peradaban luhur dunia, kecuali dengan pembangunan gerakan kultural. Salah satunya dengan pendidikan. Pembangunan kultural melalui pendidikan merupakan episentrum atau awal pembangunan politik dan ekonomi ke depan. Hal ini dikarenakan pendidikan bisa menciptakan dan mengkreasi generasi-generasi muda

baik sebagai politisi dan pelaku ekonomi yang berwatak kebangsaan. Selain itu, sikap ketuhanan dan kelulusan perjuangan generasi emas bangsa Indonesia seperti Hatta, Soekarno, Sjahrir, dan Tan Malaka berawal dari transfer pengetahuan yang mereka geluti melalui dunia pendidikan.

Perkembangan dunia yang begitu pesat dan peradaban global yang semakin modern menuntut kemampuan masyarakat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bahasa pergaulan global yang ditujukan untuk kesejahteraan nasional. Dalam situasi ini pembangunan ekonomi nasional membutuhkan keterampilan dan penguasaan pada pengetahuan modern sebagai faktor pendukung.

Ketiga, stabilitas politik dan sosial menjadi faktor terbangunnya ekonomi nasional. Indonesia memiliki keragaman budaya dan struktur sosial yang majemuk memerlukan proses asimilasi yang terus-menerus untuk menghindari pertikaian antarbudaya bangsa, memerlukan sosok pemimpin yang berwibawa serta memahami akar-akar persoalan budaya, menghargai dan menumbuhkan kreativitas budaya yang terkandung dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia.

Keempat, mewujudkan *good governance*. Hal tersebut dilakukan dengan mengampanyekan jihad melawan dan memberantas tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme baik masa lalu, saat ini, dan mendatang. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa di hadapan publik. Dengan demikian, efisiensi keuangan negara dan pengembalian hak-hak negara yang telah disalahgunakan pada masa lalu tidak akan terulang merupakan hal yang utama.

Tindakan itu pun merupakan satu upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, mengayomi, dan memenuhi enam hak-hak dasar warga negara seperti hak sipil, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jika kelima hak ini dijalankan oleh sebuah pemerintahan, pembangunan yang berbasiskan kesetaraan akan terwujud pada semua level masyarakat, termasuk rakyat miskin sekalipun.

Kelima, penegakan konstitusi dan penyebaran undang-undang kepada masyarakat untuk membentuk rakyat yang sadar hukum. Hal di atas harus dibarengi dengan profesionalisme aparat penegak hukum melalui proses seleksi yang mengedepankan mentalitas jiwa yang baik

pejabat negara yang bersih, dan memberlakukan sanksi hukum seberatnya atas pelanggaran jabatan yang diembannya.

Akhirnya, pembangunan politik dan ekonomi sebaik apa pun tanpa didukung oleh komitmen penegakan hukum tidak akan ada artinya. Semua itu hanya menciptakan bangsa yang korup dan pragmatis. Oleh karena itu, pimpinan lembaga penegak hukum harus mencerminkan keteladanan dan keluhuran budi dengan komitmen yang kuat melakukan reformasi hukum sekaligus penegakan hukum secara legas.

Moralitas senantiasa menempatkan nilai kejujuran, kebersamaan, dan komitmen yang tinggi bagi kepentingan luas. Koridor konstitusi yang ada merupakan jalan terbaik untuk menghargai proses demokrasi yang tengah berlangsung, tanpa harus menghentikan aspirasi yang sedang berkembang. Tentunya semua proses tersebut berlangsung dalam iklim yang demokratis. Aspirasi rakyat menjadi landasan proses konstitusi tersebut. Dalam wacana konstitusi dan demokrasi rakyatlah yang berdaulat melalui para wakil yang dipercayai.

Pembangunan ekonomi yang mengikutsertakan pemuda sebagai peranti, mensyaratkan infrastruktur negara yang sehat dan aktif dalam usaha mendistribusikan keadilan dan kemakmuran bersama. Oleh karena itu, sebuah keharusan bagi keaktifan pemuda dalam menumbuhkan dan menjadi hakim atau pengawas penyaluran keadilan bagi tertancapnya sistem pembangunan ekonomi yang mensyaratkan pembangunan politik dan hukum yang mendukung bagi perkembangan pembangunan bangsa. Singkatnya, pemuda tidak hanya sebagai peranti pembangunan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai penopang dalam menumbuhkan moralitas politik yang mengarah pada retorika dan tanpa logika keberpihakan pada khalayak bersama lewat penegakan hukum di atas order yang ada dalam bingkai negara bangsa.

Apa pun yang akan terjadi, para pemuda harus mempersiapkan diri terhadap berbagai kemungkinan, termasuk konsep menjalankan pembangunan negara dan mewujudkan harapan rakyat atas perubahan yang terjadi. Dengan sendirinya pemuda sebagai agen revolusi keindonesiaan pada masa lalu masih tertanam pada generasi muda kini dan masa depan untuk menjaga keadilan dan semangat kepeloporan antikemiskinan di Nusantara.

Tidak ada pilihan lain bagi bangsa untuk melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam perhalian yang serius. Ambruknya perekonomian Indonesia akibat badai krisis moneter akhir tahun 90-an memberi efek turunan yang tidak termaknai. Masa ini oleh sebagian pengamat disebabkan oleh "bubble economy", yaitu bisnis yang dilandasi utang dari bank yang terlalu besar dan banyak pinjaman valuta asing sehingga rentan terhadap perubahan nilai tukar dan kurs valuta asing.

Tidak heran jika semua pihak memandang tragedi ini diakibatkan proyek pembangunan perekonomian berdiri di atas utang luar negeri yang kelewat batas (*over borrowing*). Menyedihkan lagi, fenomena ini mencerminkan rapuhnya struktur dasar perekonomian Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Rezim ekonomi Orba lebih memercayai pembangunan ekonomi lewat korporasi besar dengan pakem *crony capitalism*. Demokrasi ekonomi yaitu ekonomi kerakyatan menjadi aksesori semata. Oleh karena itu, tanpa ampun deregulasi dan liberalisasi menyebabkan aturan keluar masuknya modal bergerak tanpa arah. Untuk seukuran negara berkembang, ekonomi Indonesia terlalu liberal, bahkan untuk negara maju sekalipun.<sup>23</sup>

Jauh sebelum Indonesia kadung pada praktik ekonomi liberal terjadi di Indonesia, Soedjatmoko, cendekiawan Indonesia dengan reputasi dunia, mengingatkan bahwa Indonesia telah mengabaikan sama sekali perlunya pembangunan ekonomi dan hanya memikirkan pembangunan politik.<sup>24</sup> Nalar ekonomi para elite penguasa ketika itu masih jauh dari prediksi yang idealis dan mendalam. Setidaknya program rencana pembangunan lima tahun (Repeita) tidak mengandaikan perencanaan

<sup>23</sup> Rados Prawro, 1996. *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action*, Oxford: Oxford University Press, p.90.

<sup>24</sup> Soedjatmoko, 1964. *Economic Development as a Cultural Problem*, Cornell: Cornell University.

strategis yang berkesinambungan. Artinya, pembangunan yang ada kurang melibatkan penguatan kemandirian ekonomi rakyat yaitu wirausaha. Rencan ekonomi Orde Baru dibuat leluasa dengan pembangunan fisik, tetapi diengahkan dengan utang yang menumpuk.

Selama 30 tahun model pembangunan kita setia pada pakem pendekatan top-down. Kini pakem ini harus dibalik dengan pendekatan bottom-up. Artinya, ketika pemerintah mengalami kebuntuan dalam menyediakan akses pada perekonomian yang laik, peran *civil society*, LSM, dan segenap organisasi kepemudaan harus proaktif. Tidak ada kesempatan yang datang begitu saja dari langit. Uluran bantuan dari para donatur dan pemerintah tidak perlu diharap banyak. Sekarang saatnya kesempatan dimulai dan diciptakan dari unit terkecil, individu, keluarga, dan komunitas dalam memberdayakan ekonomi yang terjangkau. Oleh karena itu, alangkah lebih mudah jika pemberdayaan ekonomi itu melibatkan semua elemen bangsa.

Dalam konteks Good Governance ada tiga pilar yang harus menopang jalannya proses pembangunan, yaitu masyarakat sipil, pemerintah, dan swasta. Oleh karena itu, SDM atau masyarakat menjadi pilar utama yang harus diberdayakan sejak awal. Oleh karena itu, model pembangunan ke depan harus mampu memberdayakan kemandirian ekonomi masyarakat bawah. Peran pemuda diharapkan mampu mengisi kekosongan itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia adalah surga tiada duanya.

Bangsa yang memiliki komunitas kesatuan dari entitas kabinekaan bahasa, suku, dan agama. Bangsa yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Bangsa yang masih tertinggal di pentas yang lebih tinggi.



Felix Sumad:  
Pemuda adalah sumber daya manusia yang harus diperbaiki sebagai pendobrak keterpurukan bangsa.

Sejarah Indonesia membuktikan peran pemuda merupakan tempat yang signifikan. Kenyataan bahwa ketahanan rakyatnya itu adalah upaya dan sepak terjang kaum pemuda memang benar. Hari lahir, merupakan seratus hari Kebangkitan Nasional, peran pemuda sudah mulai, tanpa aksi dan kurang seksi di pentas nasional. Organisasi-organisasi kepemudaan yang menyebar di pulau-pulau Nusantara sudah mengalami kevakuman. Walaupun bangkit, mereka berkiprah dan berlabuh pada poros politik, tetapi tidak pada poros ekonomi. Gravitasi politik mereka magnet menjanjikan untuk mendapatkan kekuasaan. Situasi seperti ini sekarang harus ditinggalkan dan walinya pemuda berperan aktif sebagai agen perubahan bagi perekonomian kebangsaan. Inovasi, kerja keras, terampil, dan daya tahan pemuda semakin penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.

Peran pemuda dalam pemberdayaan ekonomi yang demikian sudah tampak di depan mata melalui kewirausahaan. Mendapatkan ekonomi dengan kewirausahaan setidaknya menjanjikan harapan ke depan untuk mampu berdiri sendiri dalam berpartisipasi memajukan ekonomi nasional, bahkan persaingan di kancah global.

Selintas pandang kewirausahaan adalah usaha perekonomian yang berangkat dari material seadanya. Dalam kewirausahaan yang terpenting bukanlah bakat dan keturunan, tetapi kerja keras dan kemauan yang kuat. Bukankah dalam keterbatasan itu sebuah ide dan visi yang brilian bisa lahir.

Adanya upaya pemberdayaan menjadikan masyarakat mampu menjalankan pembangunan dengan cara memberikan hak untuk mengelola sumber daya yang ada. Masyarakat miskin diberikan



Foto: Suned

Kewirausahaan pemuda merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki ekonomi bangsa.

kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Dengan demikian, masyarakat diberi kekuasaan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, mengawali pemberdayaan melalui kewirausahaan adalah hal yang penting dilakukan.

Hal ini untuk memberdayakan bidang-bidang yang lain setelah pemberdayaan dalam bidang ekonomi skala besar menjadi urusan pemerintah. Pada masyarakat miskin, masalah utama adalah masalah perekonomian keluarga atau kampung yang menyebabkan mereka tidak berdaya baik secara sosial, kesehatan, maupun politik. Pada masyarakat miskin konsentrasi tertinggi tertuju pada cara memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Mereka akan serius dan akan mengikuti secara penuh hal-hal yang terkait dengan perbaikan perekonomian. Kewirausahaan merupakan pilihan strategis terhadap pemberdayaan masyarakat miskin.

Di atas semua itu, sebagian besar mereka yang tergolong kaum miskin dan marginal adalah pemuda. Delapan puluh persen populasi penduduk Indonesia adalah pemuda. Peran serta pemuda dalam pemberdayaan ekonomi semestinya disikapi dengan serius. Eksistensi pemuda sebagai tulang punggung negara guna berbuat sesuatu untuk negara tidak dapat ditanggihkan dan harus diperhatikan.

Oleh karena itu, membuka keran kesempatan pemuda dalam aktivitas ekonomi sama saja mengurangi beban negara yang menumpuk. Sungguh tragis sebuah bangsa jika sebagian besar pemudanya menjadi beban dan tanggungan negara. Segitinya pemuda sebagai agen perubahar memiliki andil lebih dari elemen bangsa lainnya.



Foto: Sunad

*Eksistensi pemuda dalam kanvas dunia kerja adalah tulang punggung negara mencapai kemajuan.*

Pada bab ini akan menyinggung peran pemuda dalam pengentasan kemiskinan lewat pemberdayaan ekonomi kewirausahaan. Etos kerja dan kemandirian pemuda sangat diharapkan menumbuhkan kewirausahaan kita. Baru kemudian pembahasan akan masuk pada jiwa kewirausahaan dan kewirausahaan itu sendiri. Terakhir adalah organisasi kepemudaan benar-benar mendayagunakan potensinya dalam ekonomi lokal dan nasional. Hal ini sejalan dengan adagium lama bahwa "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh."

## **Menumbuhkan Etos Kerja, Mengukuhkan Mental Kemandirian**

Problem kemiskinan sudah menjadi musuh utama sejak lama. Bahkan, saat ini kemiskinan menjadi masalah global yang perlu dituntaskan. Salah satu proyek luhur ini diterapkan PBB melalui program *Millenium Development Goals* (MDGs). Sejatinya musuh utama umat manusia sekarang adalah kemiskinan. Akan tetapi, bukan berarti kemiskinan adalah sebuah azab. Kemiskinan adalah sebuah anomali dari perbuatan kita sendiri.

Perdebatan kemiskinan sebagaimana diulas pada bab depan secara sederhana dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena lemahnya peran negara dalam memberi kesejahteraan hidup rakyat, misalnya sulit mendapatkan akses pekerjaan. Kemiskinan kultural lebih disebabkan pada kondisi atau keadaan orang bersangkutan, seperti cacat fisik, lemahnya etos kerja, dan mental *nrimo*.

Menjadi miskin bukanlah kehendak semua orang. Mendapatkan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera merupakan aspirasi global dan universal. Tidak bisa dimungkiri adanya kemiskinan adalah hukum alam. Artinya, kemiskinan selalu menjadi fenomena manusiawi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab manusia. Apakah kemiskinan bisa direduksi kembali pada diri manusia itu? Fakta bahwa kemiskinan sekarang ini mengglobal adalah ya. Akan tetapi, kewajiban untuk membebaskan diri dari kemiskinan merupakan tanggung jawab semua orang. Hal ini dikarenakan tidak ada orang sehat yang ingin miskin.

Masalah terpenting sekarang, apakah kemiskinan itu melemahkan atau justru menjadi daya pendorong untuk maju? Demikian hal ini menjadi perhatian serius siapa pun. Sejatinya, kemiskinan tidak selalu menjadi dalih bahwa seseorang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemiskinan akan menjadi tidak berarti jika kita meyakini bahwa kemiskinan harus dilawan dengan tindakan. Asumsinya, kemiskinan itu ada karena kita mengolekannya sendiri tanpa disadari. Betapa pun kemiskinan itu ada adalah sebuah fakta. Jadi, fakta bahwa negara kita miskin, tidak perlu didiskusikan lagi.

Persoalannya sekarang, dengan apa kita mengubah kemiskinan itu? Kalau kita menelisk lebih dalam lagi, kemiskinan terjadi disebabkan oleh kultur kita yang lemah menyikapinya karena alasan kultural sangat erat kaitannya dengan mental dan kepribadian diri. Seberapa pun orang itu miskin, ia bisa terlepas dari kemiskinannya dengan mentalitas yang kuat untuk bangkit. Kultur dan mental menjadi persoalan mendasar yang harus segera dibenahkan dan dipersiapkan sejak awal untuk membangun potensi diri. Pelajaran dari banyak bangsa menunjukkan bahwa kultur dan kekuatan mental bangkit menjadi faktor kemajuan bangsa tersebut. Misalnya penjatuhan bom atom oleh sekutu di atas Kota Hiroshima dan Nagasaki telah membuat Jepang lumpuh segalanya. Oleh karena kultur budaya unggul dan kekuatan mental, mereka mampu bangkit kembali.

Secara umum bangsa Indonesia masih kental dengan mentalitas dan kultur feodalistik sehingga keduanya berpengaruh dalam segala segi kehidupan, politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Hal ini juga sangat menentukan pembangunan bangsa di pentas dunia. Saat ini menurut *Human Development Reports, HDR 2002* (Laporan Pembangunan Manusia 2002) yang dikeluarkan Program Pembangunan PBB (*United Nations Development Programme, UNDP*) tentang *Human Development Indicators* tahun 2002, Indonesia menempati peringkat 110 dari 173 negara yang diteliti dengan *Human Development Index (HDI)* 0,684. Posisi Indonesia itu jauh di bawah negara anggota ASEAN, seperti Singapura (25), Brunei Darussalam (32), Malaysia (59), Thailand (70), dan Vietnam (109).

Pada HDR tahun 2003 indeks tersebut merosot menjadi 0,682. Penurunan indeks yang mencerminkan memburuknya kualitas manusia Indonesia ini juga terlihat dari menurunnya peringkat HDI, dari urutan 110 ke 112. Sementara Malaysia naik ke peringkat 58 dan Vietnam masih di urutan ke-109. Pada HDR tahun 2007–2008, indeks yang diambil dari data tahun 2005 menempatkan Indonesia pada peringkat 107. Posisi ini menempatkan Indonesia di bawah Singapura 25, Brunei Darussalam 30, Malaysia 63, Thailand 78, Filipina 90, dan Vietnam 105. Namun demikian, Indonesia masih berada dalam negara dengan kategori Indeks Pembangunan Manusia dalam skala medium. Dalam laporan ini HDI dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi (1–70), menengah (71–155), bawah (156–177).<sup>23</sup>

Data di atas tidak bermaksud menyudutkan siapa pun termasuk segenap bangsa ini. Akan tetapi, kita harus bijak dan sadar bahwa pembangunan manusia menjadi penting sebagai tolok ukur pembangunan bangsa ke depan. Menyoal pembangunan bangsa lagi-lagi kita tidak bisa melepaskan unsur kultural dan mental. Mengubah kultur dan mental memang sangat riskan karena kultur adalah sebuah kebiasaan yang tertanam dalam diri masyarakat. Kebiasaan ini pada gilirannya akan membentuk mentalitas dan memengaruhi etos kerja. Alasan kultural akan selalu menjadi pertimbangan awal menentukan dan memprediksi kemajuan sebuah bangsa. Selama ini fenomena kemiskinan selalu ditinjau secara struktural. Lebih memprihatinkan lagi adalah mentalitas kultural yang lemah telah menjadikan kita lama bangkit, tetapi kurang pemahaman ini disadari. Tidak mengherankan jika kuat tidaknya mentalitas akan berimplikasi pada etos kerja itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan mental dan etos kerja harus menjadi perhatian sejak dini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos bermakna sebagai berikut.

- (1) pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial;
- (2) kebudayaan sifat, nilai, dan adat istiadat khas yang memberi watak kepada kebudayaan suatu golongan sosial dalam masyarakat; serta

<sup>23</sup> Lihat Laporan Indeks Pembangunan Manusia UNDP 2007–2008.

3) semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.<sup>26</sup>

Etos kerja yang baik berasal dari hasil kesadaran individu untuk secara tulus menggali semua potensi positif yang ada dalam diri individu bersangkutan. Etos kerja ada di dalam DNA seseorang yang secara fundamental telah dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, dan dunianya. Etos kerja sebuah bangsa banyak dipengaruhi oleh budayanya.

Etos kerja sebenarnya mengajarkan kepada setiap sumber daya manusia untuk secara tulus dan ikhlas dari lubuk hati terdalam membangun kebiasaan-kebiasaan positif yang efektif dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada orang di luar dirinya. Diperlukan upaya berkesinambungan dari dalam diri untuk memberikan contoh teladan perilaku etos kerja yang ingin dimiliki oleh seseorang tersebut. Terkadang orang lain bisa menjadi ilham dalam menggali etos kerja yang kita miliki. Peran mereka tanpa disadari memberikan wawasan dan pengetahuan yang akan berdampak besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menggali etos kerja terbaik dari sudut kacamata positif.

Etos kerja yang baik lahir dari pribadi-pribadi yang proaktif dalam mempersiapkan diri mereka untuk menjadi manusia-manusia yang siap seratus persen menjalankan dan menentukan misi dan visi hidupnya dengan nilai-nilai positif yang tidak dapat dikompromikan lagi. Nilai positif berarti setiap pikiran dan tindakan selalu berkonsentrasi untuk membenarkan pelayanan berkualitas tinggi.

Pembangunan mentalitas diri menjadi modal berharga dalam setiap tindakan. Dengan etos kerja yang mumpuni akan memperkuat ekonomi. Maksudnya adalah etos yang demikian akan menentukan perilaku yang harus diambil dan dibangun serta dikembangkan. Dengan demikian, etos kerja akan senantiasa meningkatkan kinerja melawan rasa rendah diri dan minder. Terkait erat dengan mentalitas dalam hidup ini, pasak tidak boleh lebih besar daripada tiang. Lebih hemat, menghargai waktu, mengutamakan kualitas, berpikir rasional, merupakan etos yang

---

<sup>26</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi. Ketika surplus itu didapat, harus ada reinvestasi yang dapat meningkatkan kapital.

Pembenahan mental dan etos kerja berhulu pada sektor pendidikan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan yang sesungguhnya adalah seberapa jauh membentuk mentalitas untuk berani hidup, mandiri, dan beraktualisasi diri. Pendidikan yang dimaksud tidak saja pendidikan formal, tetapi juga pendidikan nonformal.

Menurut Jansen Hulman Sinamo, penulis buku *best seller 8 Etos Kerja* dan ahli pengembangan sumber daya manusia, mengatakan bahwa hidup hanya menyediakan dua pilihan, yaitu mencintai pekerjaan atau mengeluh setiap hari. Jika tidak bisa mencintai pekerjaan, kita hanya akan memperoleh "5-ng" seperti ngeluh, ngedumel, ngegosip, ngomel, dan ngeyel.<sup>27</sup> Menurut Jansen, cara terbaik mengatasi kondisi demikian adalah dengan membenahi pangkal masalahnya, yaitu motivasi kerja. Itulah akar yang membentuk etos kerja. Secara sistematis, Jansen memetakan motivasi kerja dalam konsep yang ia sebut sebagai "Delapan Etos Kerja Profesional". Etos pertama, kerja adalah rahmat. Apa pun pekerjaan kita, entah pengusaha, pegawai kantor, sampai buruh kasar sekalipun adalah rahmat dari Tuhan. Anugerah itu kita terima tanpa syarat, seperti halnya menghirup oksigen dan udara tanpa biaya sepeser pun.

Bakat dan kecerdasan yang membuat kita bekerja adalah anugerah. Dengan bekerja, setiap tanggal muda kita menerima gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, kita mempunyai banyak teman dan kenalan serta mempunyai kesempatan untuk menambah ilmu dan wawasan. Semua itu anugerah yang patut disyukuri. Sungguh kelewatan jika kita merespons semua nikmat itu dengan bekerja ogah-ogahan.



Foto: Sumadi

Dengan bekerja seseorang akan memiliki banyak teman.

<sup>27</sup> Majalah RIFO SOCIETA, Edisi Khusus Kemiskinan Tahun 2006, Nm. 40-42.

*Etos kedua, kerja adalah amanah.* Apa pun pekerjaan kita, pramuniaga, pegawai negeri, atau anggota DPR, semua adalah amanah. Pramuniaga mendapatkan amanah dari pemilik toko. Pegawai negeri menerima amanah dari negara. Anggota DPR menerima amanah dari rakyat. Etos ini membuat kita bisa bekerja seponuh hati dan menjauhi tindakan tercela, misalnya korupsi dalam berbagai bentuknya.

*Etos ketiga, kerja adalah panggilan.* Apa pun profesi kita, perawat, guru, penulis, semua adalah darma. Seperti darma Yudistira untuk membela kaum Pandawa. Seorang perawat mengamalkan darma untuk membantu orang sakit. Seorang guru mengamalkan darma untuk menyebarkan ilmu kepada para muridnya. Seorang penulis mengamalkan darma untuk menyebarkan informasi tentang kebenaran kepada masyarakat.

Oleh karena itu, jika pekerjaan atau profesi disadari sebagai panggilan, kita bisa berucap pada diri sendiri, *"I'm doing my best"*. Dengan begitu, kita tidak akan merasa puas jika hasil karya kita kurang baik mutunya.

*Etos keempat, kerja adalah aktualisasi.* Apa pun pekerjaan kita, entah dokter, akuntan, ahli hukum, semuanya bentuk aktualisasi diri. Meskipun kadang membuat kita lelah, bekerja tetap merupakan cara terbaik untuk mengembangkan potensi diri dan membuat kita merasa "ada". Bagaimanapun sibuk bekerja jauh lebih menyenangkan daripada duduk bengong tanpa pekerjaan. Secara alami, aktualisasi diri itu bagian



Sumber: Kompas, 2 April 2007

*Anggota DPR menerima amanah dari rakyat.*



Foto: Sumad

*Seorang guru mengamalkan darma untuk menyebarkan ilmu kepada murid.*

dan kebutuhan psikososial manusia. Misalnya, dengan bekerja seorang bisa berjabat tangan dengan rasa pede ketika berjumpa dengan orang lain. "Perkenalkan, nama saya Miftah, dari Bank Kemilau".

**Etos kelima**, kerja itu ibadah. Tidak peduli apa pun agama atau kepercayaan kita, semua pekerjaan yang halal merupakan ibadah. Kesadaran ini pada gilirannya akan membuat kita bisa bekerja secara ikhlas, bukan demi mencari uang atau jabatan semata. Jansen mengutip sebuah kisah zaman Yunani Kuno seperti ini, "Seorang pemahat tiang menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengukir sebuah puncak tiang yang tinggi. Saking tingginya, ukiran itu tidak dapat dilihat langsung oleh orang yang berdiri di samping tiang. Orang-orang pun bertanya, 'Apakah pantas bersusah payah membuat ukiran indah di tempat yang tidak terlihat?' Ia menjawab, 'Manusia memang tidak bisa menikmatinya, tetapi Tuhan bisa melihatnya.'" Motivasi kerjanya telah berubah menjadi motivasi transendental.

**Etos keenam**, kerja adalah seni. Apa pun pekerjaan kita, bahkan seorang peneliti, perawat, ataupun polisi adalah seni. Kesadaran ini akan membuat kita bekerja dengan enjoy seperti halnya melakukan hobi. Jansen mencontohkan Edward V. Appleton, seorang fisikawan peraih nobel. Dia mengaku, rahasia keberhasilannya meraih penghargaan sains tersebut karena dia bisa menikmati pekerjaannya. "Antusiasmanlah yang membuat saya mampu bekerja berbulan-bulan di laboratorium yang sepi," katanya. Jadi, semua kerja adalah seni. Bahkan, ilmuwan sesenus Einstein pun menyebut rumus-rumus fisika yang njelimet itu dengan kata sifat *beautiful*.

**Etos ketujuh**, kerja adalah kehormatan. Seremeh apa pun pekerjaan kita, itu adalah sebuah kehormatan. Jika bisa menjaga kehormatan dengan baik, kehormatan lain yang lebih besar akan datang kepada kita. Jansen mengambil contoh etos kerja Pramoedya Ananta Toer. Sastrawan Indonesia kawakan ini tetap bekerja (menulis), meskipun ia dikucilkan di Pulau Buru yang serba terbatas. Baginya, menulis merupakan sebuah kehormatan. Hasilnya, kita sudah mahfum. Semua novelnya menjadi karya sastra kelas dunia.

*Etos kedelapan*, kerja adalah pelayanan. Apa pun pekerjaan kita, pedagang, polisi, bahkan penjaga mercusuar, semuanya bisa dimaknai sebagai pengabdian kepada sesama. Pada pertengahan abad XX di Prancis, hidup seorang lelaki tua sebatang kara karena ditinggal mati oleh istri dan anaknya. Bagi sebagian besar orang, kehidupan seperti yang ia alami mungkin hanya berarti menunggu kematian. Akan tetapi, bagi dia tidak demikian. Ia pergi ke Lembah Cavannen, sebuah daerah yang sepi. Sambil menggembalakan domba, ia memunguti biji oak, kemudian menanamnya di sepanjang lembah itu. Tidak ada yang membayarnya. Tidak ada yang memujinya. Ketika meninggal dalam usia 89 tahun, ia telah meninggalkan sebuah warisan luar biasa, hutan sepanjang 11 km! Sungai-sungai mengalir lagi. Tanah yang semula tandus menjadi subur. Semua itu dinikmati oleh orang yang sama sekali tidak ia kenal.

Ada dua aturan sederhana supaya bisa antusias pada pekerjaan. Pertama, mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat. Dengan begitu, bekerja akan terasa sebagai kegiatan yang menyenangkan. Jika aturan pertama tidak bisa didapatkan, gunakan aturan kedua, yaitu kita harus belajar mencintai pekerjaan. Kadang kita belum bisa mencintai pekerjaan karena belum mendalaminya dengan benar. Dengan segala kekurangan yang ada kita harus mencintai pekerjaan kita.<sup>28</sup>

Ketika etos kerja sudah mendarah daging, kemampuan mandiri akan tumbuh. Demikian halnya dalam melakukan wirausaha yang dewasa ini semakin diperlukan. Kewirausahaan akan menjadi lebih baik jika etos kerja dan mental kemandirian menjadi fondasinya. Selama ini yang menjadi kendala kita sebagai sebuah bangsa adalah kurangnya kemandirian dan etos kerja. Kita harus akui bahwa bangsa ini terus melilit dirinya dari pinjaman utang luar negeri. Terkait dengan hal itu tidak heran jika sebanyak apa pun dana pemerintah digunakan sebagai subsidi kepada rakyat miskin, misal bantuan langsung tunai, tidak pernah cukup sampai kapan pun. Yang ada bantuan itu semakin menenggelamkan pada ketidakmandirian berkepanjangan. Boleh

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

Atakan bantuan seperti pedang bermata dua. Pertama, bantuan akan menyebabkan orang memperlemah dirinya sendiri. Kedua, dengan bantuan orang lain, seseorang bisa mengaktualisasikan diri dengan memanfaatkan kapasitas kemampuan.

Selama ini proyek bantuan pemerintah habis begitu saja. Harapan adanya bantuan mampu menjadikan rakyat miskin mandiri belum dilaksanakan. Konsep bantuan semacam ini sedari awal harus ditinjau ulang agar pengeluaran subsidi rakyat miskin tidak habis sia-sia. Sekaranglah saatnya etos kerja dan mental kemandirian berfungsi sebagai tolak ukur memberdayakan perekonomian rakyat kecil melalui kewirausahaan.

## Memberdayakan Ekonomi Rakyat Lewat Kewirausahaan

Asumsi sebagian besar orang bahwa kewirausahaan memerlukan bakat tidak lagi berlaku. Pertanyaan tentang kewirausahaan pun sudah bergeser, bukan apakah jiwa kewirausahaan ini dapat ditumbuhkan melalui pendidikan atau tidak? Akan tetapi, maukah jiwa kewirausahaan baru itu disambut dengan sikap positif? Tentunya hal ini membutuhkan investasi waktu, daya, dan dana. Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi yang berubah cepat, pemahaman kembali jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) menjadi solusi terbaik.

Fenomena kewirausahaan sosial sebenarnya telah ada sejak lama, tetapi istilahnya baru mengemuka pada dekade tahun 1990-an. Penekanan definitif kewirausahaan sosial dimaksudkan untuk lebih memberikan perbedaan dengan kewirausahaan yang berorientasi bisnis murni. Ini tampak dari definisi yang dikemukakan dalam *Conference of Asian Foundations and Organizations (CAFO)* yang menyatakan bahwa "kewirausahaan sosial melibatkan promosi dan pembentukan perusahaan atau organisasi yang menciptakan keuntungan dengan menggali hasil dari konstituen yang ada. Biasanya dari publik secara luas atau masyarakat bawah.

Bentuk konkret kewirausahaan sosial yang umum ditemukan adalah penciptaan peluang kerja bagi orang-orang yang terpinggirkan (cacat,

pengangguran, dan tunawisma). Aktivitas kerja produktif akan membuahkan profit yang dapat digunakan untuk memberikan penghasilan dan mengangkat kondisi sosial ekonomi mereka. Menurut Fowler (2000), hal ini dikategorikan sebagai *integrated social entrepreneurship*. Keuntungan yang dihasilkan dapat secara simultan menciptakan keuntungan sosial (*social benefits*).<sup>29</sup> Bentuk lain yang dapat dijumpai adalah penciptaan unit usaha mandiri yang keuntungannya dialokasikan untuk menunjang misi sosial lembaga tersebut, jadi tidak secara langsung menciptakan keuntungan sosial (*complementary social entrepreneurship*). Oleh banyak kalangan jiwa kewirausahaan atau *entrepreneurship* dapat dibina atau ditanamkan sejak kecil. Pada dasarnya kewirausahaan lebih menyoal pada menggerakkan perubahan mental.

Mien Rachman Uno, pakar kepribadian sekaligus Presiden Direktur Lembaga Pendidikan Duta Bangsa, mengatakan bahwa untuk menjadi wirausahawan andal, dibutuhkan karakter seperti pengenalan terhadap diri sendiri kreatif, mampu berpikir kritis, mampu memecahkan permasalahan, dapat berkomunikasi, mampu membawa diri di berbagai lingkungan, menghargai waktu, empati, dapat mengendalikan emosi, dan mampu membuat keputusan.<sup>30</sup>



Foto: Sunard

*Kesuksesan berwirausaha bukan dilihat dari tinggi pendidikan melainkan besarnya niat dan bakat.*

Ada penelitian menarik wirausaha tidak selalu mengenai seberapa tinggi pendidikan pelaku di dalamnya. Benedicta Pnhatin Dwi Riyanti, yang meneliti faktor-faktor keberhasilan usaha kecil di Jakarta dan Yogyakarta dari sudut pandang kepribadian, menyimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan bukan merupakan variabel yang baik dalam

<sup>29</sup> Alan Fowler, *NGDOs as a Moment in History: Beyond Aid to Social Entrepreneurship or Civic Innovation*. Artikel dalam *Third World Quarterly*, p. 21.

<sup>30</sup> Kompas, 3 Maret 2008, *Kewirausahaan Dibina Sejak Dini*

menentukan keberhasilan usaha. Tidak terkaitnya pendidikan dengan tingkat keberhasilan usaha kemungkinan disebabkan tidak adanya keterkaitan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah atau kuliah dengan pengetahuan yang diperlukan dalam mengelola usaha atau ilmu yang diperoleh hanya sebatas teori tanpa praktik langsung dalam dunia kerja.<sup>31</sup>

Ada baiknya kita menengok sejarah bahwa sudah sejak lama wirausaha menjadi perhatian serius para ekonom dunia. Sebut saja Joseph Schumpeter. Ekonom asal Austria ini menilai bahwa wirausahawan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk (1) memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, (2) memperkenalkan metoda produksi baru, (3) membuka pasar yang baru (*new market*), (4) Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau (5) menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Schumpeter mengaitkan wirausaha dengan konsep inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis serta mengaitkannya dengan kombinasi sumber daya.

Schumpeter merupakan salah seorang ekonom pendukung wirausaha. Dalam buku *The Theory of Economic Development*, Schumpeter mengemukakan bahwa ketidaksimbangan dinamis yang disebabkan oleh wiraswastawan yang melakukan inovasi, bukan keseimbangan dan optimisasi adalah merupakan norma dari suatu ekonomi yang sehat dan realitas sentral bagi teori ekonomi dan praktik ekonomi.<sup>32</sup>

Salah satu lembaga penelitian di Amerika Serikat, *Entrepreneurship Center* Universitas Miami di Ohio, menilai bahwa kewirausahaan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses

<sup>31</sup> Benedicta P. Dwi Riyanti, 2008. *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasilan Usaha Skala Kecil di DKI dan DIY*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pasca-Sarjana UI.

<sup>32</sup> Joseph Alois Schumpeter. 1983. *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Chicago University Press, p. 57.

tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian.

Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pengertian tersebut bahwa kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang-peluang yang muncul di pasar. Eksploitasi tersebut sebagian besar berhubungan dengan pengarahannya dan kombinasi input yang produktif. Seorang wirausahawan diharuskan menghadapi risiko atau peluang yang muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan inovatif. Selain itu, seorang wirausahawan menjalankan peranan manajerial dalam kegiatannya, tetapi manajemen rutin pada operasi yang sedang berjalan tidak digolongkan sebagai kewirausahaan. Seorang individu mungkin menunjukkan fungsi kewirausahaan ketika membentuk sebuah organisasi, tetapi selanjutnya menjalankan fungsi manajerial tanpa menjalankan fungsi kewirausahaannya. Jadi, kewirausahaan bisa bersifat sementara atau kondisional.

Tidak dimungkiri kewirausahaan ini sudah dikenal lama oleh kita. Akan tetapi, kenyataannya Indonesia merupakan negara yang tingkat kewirausahaannya rendah. Hal ini terkait dari konsepsi tentang kerja. Kerja bagi sebagian besar diartikan memiliki kantor, gaji pensiunan, dan asuransi. Artinya, ketika sebuah pekerjaan tidak memiliki kantor dan fasilitas lainnya kita pun enggan melakukan pekerjaan itu. Tidak heran jika pola pikir demikian hampir melekat di kepala anak didik kita yang telah lulus sekolah.

Sebaliknya, kewirausahaan ada karena diciptakan oleh pribadi yang berjiwa kewirausahaan dengan mentalitas dan etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu, dari sudut ini kewirausahaan dipandang sebelah mata. Padahal, di negara maju seperti Amerika konsep kerja adalah



Foto: Snsid

Bagi banyak orang bekerja berarti diartikan memiliki kantor, gaji, dan pensiunan.

menyangkut kegiatan apa pun, pekerja mengalami banyak arti misalkan ketika seorang mahasiswa mengatakan *I must to work* berarti dia harus belajar yaitu kuliah. Mereka tidak memukul rata konsep kerja sebagai kegiatan mencari pemasukan lewat bekerja di kantor. Pola pikir demikian menjadi penting sebagai salah satu perwujudan diri menumbuhkan jiwa kewirausahaan.



Sumber: [www.ihul.ac.id](http://www.ihul.ac.id)

*Belajar pun dapat dikatakan bekerja.*

Melihat tingkat populasi yang tumbuh pesat, negara berkembang justru potensial sebagai tempat mengembangkan kreativitas dan usaha-usaha baru. Terlebih lagi, Indonesia sangat kaya potensi sumber daya, baik alam, budaya, maupun manusianya. Dengan bertimpahnya materi yang ada, Indonesia bisa bangkit melalui jiwa wirausaha rakyat. Hasilnya akan berdampak baik bagi pembukaan lahan pekerjaan, mengatasi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan. Yang paling penting potensi pemberdayaan ekonomi rakyat kecil benar-benar terwujud. Secara nasional, keberadaan wirausaha akan mendorong perekonomian bangsa. Mengapa itu belum terjadi?

Jika dengan wirausaha bisa memberdayakan perekonomian rakyat kecil, bukan tidak mungkin kemiskinan di Indonesia bisa berkurang. Selama ini tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tahun 1996–2005 berfluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode tahun 2000–2005. Pada periode tahun 1996–1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 38,40 juta pada tahun 1999. Pada periode yang sama persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47% menjadi 23,43%. Pada periode tahun 1999–2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Secara relatif terjadi

juga penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43% pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode tahun 2002–2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin turun dari 18,20% pada tahun 2002 menjadi 15,97% pada tahun 2005.<sup>33</sup>

Data terakhir jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97%), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Pertambahan penduduk miskin di daerah pedesaan sedikit lebih tinggi dari daerah perkotaan. Selama periode Februari 2005 hingga Maret 2006, penduduk miskin di daerah pedesaan bertambah 2,06 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 1,89 juta orang. Sejalinya, persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Februari 2005, sebagian besar (64,67%) penduduk miskin berada di daerah pedesaan, sementara pada bulan Maret 2006 persentase ini turun sedikit menjadi 63,41%.

Fenomena kemiskinan di atas akan tertolong dengan adanya wadah wirausaha. Saat ini Indonesia bisa dibanggakan dengan wirausaha yang ada. Pemerintah pun sedang menggalakkan perhatian yang cukup besar dalam bidang wirausaha salah satunya melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sekarang pemberdayaan UKM menjadi penting sebagai solusi mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Keseniusan pemerintah ditunjukkan dengan meletakkan koperasi dan UKM dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) tahun 2005–2025.<sup>34</sup> Pembangunan bidang koperasi dan UKM, secara eksplisit ditujukan pada upaya untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.

<sup>33</sup> Litut Badan Pusat Statistik.

<sup>34</sup> Kementerian Negara Koperasi dan UKM, *Revitalisasi Koperasi dan UKM Sebagai Solusi Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan*, edisi 2007, hlm. 10.

Selama tahun 2004-2009, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2005-2009 yang memuat tiga agenda penting sebagai prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan, salah satunya adalah meningkatkan Indonesia yang lebih sejahtera.

Terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara tegas RPJM tahun 2004-2009 telah menetapkan prioritas kebijakan pembangunan di bidang koperasi dan UKM. Pertama, mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Kedua, mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka peningkatan pendapatan serta kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ketiga, memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan, memperluas akses pada sumber pembiayaan khususnya perbankan, memperluas, dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran, dan informasi.

Keempat, memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor. Kelima, meningkatkan UKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Keenam, meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Atas dasar agenda dan arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah tersebut, disadari bahwa pemberdayaan KUKM telah menjadi agenda pokok dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pemberdayaan koperasi dan UKM. Konsekuensinya upaya pemberdayaan KUKM menanggung beban berat untuk membuktikan sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing ekonomi nasional.

Dari laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2007, koperasi menunjukkan peran yang signifikan dalam penyerapan jumlah tenaga kerja yang ada. Pada tahun 2005 tercatat UKM menyerap sebesar 83.233.793 orang atau 96,28% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. Secara terperinci kontribusi UK (usaha kecil) mencatat sebanyak 78.994.872 orang atau 91,38% dan UM (usaha menengah) sebanyak 4.238.921 orang atau 4,90%.

Dalam hal ini UK sektor pertanian, peternakan, perhutanan, dan perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 38.039.281 orang atau 48,15% dari total tenaga kerja yang diserap. Sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada UM adalah sektor industri pengolahan, yaitu sebanyak 1.727.038 orang atau 40,74%.<sup>25</sup>



Sumber: *Khasanah*, 19 Oktober 2007

*Pada tahun 2005 sektor peternakan/pertanian berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.*

Pada tahun 2006 UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 85.416.493 orang atau 96,18% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. Jumlah ini meningkat sebesar 2,62% atau 2.182.700 orang dibandingkan tahun 2005. Kontribusi UK tercatat sebanyak 80.933.384 orang atau 91,14% dan UM sebanyak 4.483.109 orang atau 5,05%. Untuk UK sektor pertanian, peternakan, perhutanan, dan perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebanyak 37.965.878 orang atau 46,91% dari total tenaga kerja yang diserap. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 73.403 orang atau 0,19% dari tahun sebelumnya. Sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada UM adalah sektor industri pengolahan, yaitu sebanyak 1.627.073 orang atau 40,75%.<sup>26</sup>

Melihat data ini bukan kekhawatiran lagi bagi Indonesia untuk mengembangkan kewirausahaan yang berkesinambungan. Tingkat

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm, 20.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm, 21.

wirausaha di Indonesia memang masih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Rasio kewirausahaan dibandingkan penduduk di Indonesia hanya 1:83, sementara di Filipina 1:66, Jepang 1:25, bahkan Korea kurang dari 20. Berdasarkan rasio secara internasional, rasio unit usaha ideal adalah 1:20.

Meskipun sektor pertanian dalam UKM menempati posisi tertinggi, oleh banyak kalangan dinilai jangan sampai dipenuhi banyak orang. Hal ini mengingat banyak sektor lainnya yang perlu mendapatkan transformasi tenaga kerja. Sumber daya alam Indonesia yang cukup besar seharusnya bisa memberi nilai tambah yang tinggi di dalam negeri. Oleh karena itu, sektor pengolahan akan menambah masukan yang ada selain sektor pertanian. Jadi, pengolahan sumber daya alam bisa diambil nilai tambahnya dengan memaksimalkan sebaik mungkin. Hal lain dari itu adalah UKM merupakan aktor lintas sektor sehingga semuanya dapat diberdayakan secara maksimal. Dengan begitu, usaha pemerintah membuka jalan agar semuanya berjalan menjadi penting seperti kemudahan mengurus perizinan sampai perpajakan dan pembiayaan yang menyangkut lembaga keuangan.

Beberapa tahun belakangan sampai sekarang kewirausahaan menjadi isu menonjol dalam pertemuan *Asia Pacific Economic Cooperation* (Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik) atau APEC. Dalam beberapa kali pertemuan kelompok kerja APEC, agenda penciptaan unit usaha baru ini menjadi pembahasan yang intensif. Tantangan selama ini menunjukkan bahwa kawasan Asia Pasifik mengalami kekurangan unit usaha apabila dibandingkan dengan besarnya ekonomi dan penduduk di kawasan tersebut. Dengan cara melahirkan wirausaha baru, kebutuhan unit usaha baru dalam jumlah besar dapat terpenuhi. Oleh karena itu, dengan kondisi ril ini APEC merasa tertantang.

Dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, bukan tidak mungkin potensi wirausaha ke depan dapat mengisi setengah produk nasional. Oleh karena itu, agenda ini dapat memicu perekonomian dalam negeri. Hal itu akan berjalan baik dengan dukungan regulasi, sumber daya manusia, pembiayaan bagi wirausaha baru. Selain itu, wirausaha merupakan kegiatan lintas sektor perlu

memerhatikan *cross cutting issues* yang ada sehingga tidak ada mpang tindih antara satu sektor dengan sektor lainnya. Evaluasi rhadap semua sektor pun dapat menjadi terarah dan ke depan menjadi ibih baik.

## **Partisipasi Peran Lembaga Kepemudaan dalam Pembangunan Ekonomi**

Sejak masa kebangkitan nasional, perjuangan kemerdekaan, sampai dengan masa Orde Baru peran pemuda Indonesia mengalami pasang surut. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, partisipasi para pemuda sejak masa kebangkitan nasional dan masa perjuangan kemerdekaan cenderung tidak banyak berubah. Partisipasi pemuda cenderung lebih dimanfaatkan oleh pemerintah yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Orientasi dalam pembinaan kepemudaan seperti ini cenderung kurang mampu menjadikan para pemuda Indonesia menjadi pelaku-pelaku yang terampil dan produktif dalam kegiatan berbagai sektor ekonomi.

Sistem ekonomi yang monopolistik dan elitis pada masa Orde Baru cenderung menempatkan sejumlah besar pemuda terdidik menjadi penganggur sehingga kegiatan kepemudaan lebih menonjol dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Para pemuda yang kurang dilibatkan dalam kegiatan ekonomi produktif menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi terpuruknya ekonomi nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pembinaan organisasi kepemudaan perlu direvitalisasi sedemikian rupa sehingga pemuda yang memiliki potensi besar menjadi kekuatan penggerak yang ampuh dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Iktikad baik ini akan berjalan dengan baik jika peran lembaga kepemudaan yang ada mendapatkan perhatian besar dari semua pihak, baik pemerintah dan swasta. Selain itu, *stake holder* yang bersangkutan dengan ekonomi dan pelatihan sumber daya juga penting. Pemberdayaan yang terarah dapat mempersiapkan para pemuda sebagai pelaku-pelaku pembangunan, khususnya dalam konteks pembangunan karakter bangsa yang produktif dalam era persaingan global.

Sedanya pemerintah lewat kerja sama antardepartemen, Departemen Pemuda dan Olahraga, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Departemen Sosial, Departemen Riset dan Teknologi merembukkan usaha bersama dalam menggalakkan peran pemuda dalam rumusan yang padu. Tiap-tiap departemen akan saling mengisi dan memberi andil bagi pemberdayaan peran OKP dalam kewirausahaan, seperti melaksanakan pelatihan dan *training* menyoal pemberdayaan ekonomi tepat guna. Pelatihan ini disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. OKP yang berada di perkotaan dan pedesaan memiliki tren dan peluang sendiri dalam kewirausahaannya sehingga keberadaan mereka bermanfaat bagi komunitasnya. Aksi ini akan membuat OKP merasa percaya diri dalam merintis dan mengembangkan produk kewirausahaan ke depannya. Selain itu peran sosial mereka sekaligus menjadi mitra pendamping bagi rakyat kecil lainnya untuk turut serta meniti kewirausahaan.

Akan tetapi, tidak serta-merta ketika pemerintah mengagendakan wirausaha bagi pemuda langsung disambut. Di sini rencana strategis harus disusun terlebih dahulu. Masa-masa awal yang harus dibangun dalam mensosialisasikan pentingnya kewirausahaan adalah lewat penyadaran. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat dan daerah harus aktif turun ke lapangan mengkampanyekan pentingnya wirausaha. Slogan-slogan pemuda berjiwa mandiri dan bisnis perlu dijadikan slogan nasional bagi pemuda sehingga setiap aspek pendidikan pemuda baik formal maupun informal menanamkan semangat berwirausaha.

Agar target operasi pemberdayaan wirausaha pemuda ini bisa berjalan baik diperlukan beberapa langkah yang perlu diambil. Pertama pemetaan atau kategorisasi pemuda yang harus diberdayakan. Beberapa kategori pemuda yang perlu diberdayakan saat ini antara lain (1) pemuda yang sudah memiliki usaha sederhana dan memerlukan pengembangan, (2) pemuda yang memiliki keahlian, tetapi tidak memiliki modal, (3) pemuda yang memiliki modal, tetapi tidak memiliki keahlian dan (4) pemuda yang memiliki modal sekaligus keahlian. Saat ini yang paling banyak di Indonesia adalah pemuda dalam kategori keempat.

Kedua, digalakkan pelatihan-pelatihan yang bersifat keahlian dan keterampilan kerja. Permasalahan yang mengganjal pemuda selama

ini adalah rendahnya skill yang dimiliki. Usaha ini dapat menyertakan kerja sama OKP dengan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki oleh Depnakertrans atau lembaga swadaya yang bergerak dalam pelatihan tenaga kerja. Dengan dibukanya pelatihan-pelatihan tersebut, diharapkan pemuda dapat menambah keahlian dan pendidikan informal untuk berwirausaha.

Kedua, pendampingan. Banyak pemuda yang bergerak di bidang UKM memerlukan pendampingan untuk membuka dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan lembaga-lembaga konsultan wirausaha yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta yang mampu memberikan arahan kepada pemuda dalam berwirausaha. Dengan demikian, keberadaan 'Youth Center' sangat diperlukan melalui bekerja sama dengan instansi terkait, terutama pemerintah daerah untuk memudahkan pemuda mendapatkan akses pendampingan tersebut.

'Youth Center' yang banyak dikembangkan seperti di negara-negara maju nantinya menjadi pusat kegiatan pemuda yang berorientasi pada pemberdayaan kewirausahaan sehingga akses pemuda untuk mendapatkan informasi dan membuat kegiatan yang mengasah kemampuan mereka berwirausaha dapat dilakukan di sana. Pemuda juga diharapkan dapat saling bertukar informasi guna mengembangkan usaha.

Kesempat, penguatan jaringan antar-OKP. Saling tukar pengalaman dan pelatihan bersama akan menambah masukan OKP satu sama lain. Kemajuan satu OKP bisa mendorong OKP lain untuk lebih maju lagi. Selain itu, penguatan jaringan ini menjadi media *sharing knowledge* di antara mereka.

Harus diakui bahwa peran OKP dalam pemberdayaan ekonomi menjadi mata rantai yang penting. Ketika OKP sudah memosisikan sebagai aktor kewirausahaan dalam peningkatan ekonomi lokal, keberadaannya harus disambut gembira. Hal ini karena semua kemajuan berangkat dari komunitas yang kecil. Melalui pemberdayaan wirausaha berbasis komunitas akan lebih mudah mengukur sejauh mana dampak kemajuan pemuda. Perlu waktu yang lama membuat jaring wirausaha ini memberi andil bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, langkah awal yang tepat sasaran dengan tujuan yang terukur adalah langkah paling baik. Sebuah pepatah mengatakan bahwa langkah awal yang baik adalah setengah dari perjuangan.

**M**asalah kemiskinan yang menjangkit di kalangan pemuda semakin mendapatkan perhatian serius dari para pemimpin dunia. Hal ini karena masalah ini berdampak pada pembangunan ekonomi kepemudaan masa mendatang. Bahkan, pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) prihatin terhadap masalah kemiskinan di kalangan pemuda. Hal ini karena jumlah penduduk miskin dunia terus bertambah.

Ironisnya, masalah kemiskinan muncul di tengah pesatnya kemajuan pembangunan ekonomi dan teknologi dunia. Adakah solusi jitu untuk mengatasi masalah kemiskinan? Padahal, generasi muda tengah tertular oleh budaya instan, *pop culture*, konsumtif, terpolarisasi, dan cenderung abai terhadap persoalan bangsa. Adakah harapan itu berkobar kembali di pundak kaum muda setelah seabad kebangkitan nasional dan sepuluh tahun reformasi?

Dalam sebuah kesempatan, ekonom senior Sri Edi Swasono mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi bangsa Indonesia yang dilanda kemiskinan struktural dan kultural. Terlebih keadaan ini menjangkit di kalangan pemuda, seperti pelajar, mahasiswa, dan bekas mahasiswa yang terombang-ambing oleh situasi ketidakpastian ekonomi dan ketiadaan ruang pekerjaan bagi mereka. Situasi ini memunculkan gejolak frustrasi dan meningkatnya kriminalitas di kalangan kaum muda, bahkan tenggelam dalam opium narkoba dan seks bebas. Serentak penghayatan atas nilai-nilai keluhuran dan kemanusiaan pun punah ditelan pesona zaman yang semakin menerjang kesadaran kaum muda.

Menanggapi masalah tersebut pada tahun 2007 lalu, ia mengungkapkan perihal pentingnya membangun strategi kebudayaan dan pendidikan bagi Indonesia ke depan. Cara tersebut bertujuan agar kemiskinan dan kebodohan tidak terus menjalar di tengah masyarakat Indonesia. Terlebih menggerogoti mental dan masa depan para pemuda

di negeri ini. Menurutnya, sejak orasi puna tahun lalu para penerus Republik Indonesia telah menegaskan hak-hak sosial warga negara, terutama tentang "tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", yang terpaku dalam konstitusi. Amanat konstitusi semacam inilah yang seharusnya menjadi landasan pokok dalam pembangunan ekonomi bangsa. Terutama sebagai kerangka normatif bagi implementasi kebijakan sehingga mampu membangun sumber daya manusia andal, tidak bermental *inlander* budak, dan imperior dalam segala hal.

Dalam konteks tersebut pembangunan mentalitas bangsa melalui jalan pendidikan menjadi salah satu fondasi paling penting untuk mengayuh pembangunan ekonomi dan budaya humanis serta emansipatif. Upaya-upaya tersebut membutuhkan program konkret dan mampu diimplementasikan dalam bentuk kegiatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi kaum muda, baik di tingkat daerah maupun perkotaan.<sup>37</sup>



Sumber: *Tempo*, 29 Agustus 2004

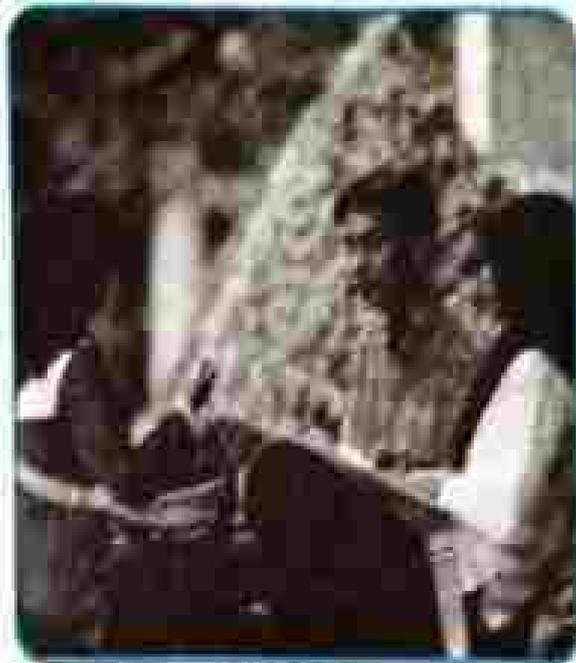
*Meningkatkan pendidikan merupakan satu langkah efektif dalam mengayuh pembangunan ekonomi.*

Amanat konstitusi di atas mengisyaratkan bahwa "berhak akan pekerjaan" adalah suatu sikap imperatif menolak pengangguran. "Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" adalah suatu tekad mulia menghapuskan kemiskinan. Sikap *imperatif* dan tekad mulia ini tentu menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi kerakyatan. Program tersebut dilakukan baik melalui program pelatihan, padat karya, dan membangun semangat kepemimpinan kaum muda yang memiliki kemampuan *entrepreneurship* terlebih didukung oleh tersedianya akses

<sup>37</sup> Sri Edi Swasono, 2007, *Strategi Kebnalarayan dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan* Mukadimah, hal. 1-12.

masi dan pekerjaan yang layak yang banyak anak di Indonesia. Tingkat kemiskinan di kalangan pemuda dapat ditanggulangi melalui pendekatan pembangunan ekonomi yang simultan di tengah kaum muda.

Cara ini tentu dengan men-  
yakan pada tradisi dan transmisi  
kearifan lebih lanjut sehingga  
terjadi integrasi sosial ekonomi  
ini dengan cita-cita kemanusiaan-  
universal. Melalui program itu  
kaum muda setidaknya dapat  
mengembangkan diri dan lingkungan  
dari dan aspek pemberdayaan  
ekonomi masyarakat. Angka  
kemiskinan dan tindak kriminalitas  
juga menurun di tengah ketidaki-  
stabilan ekonomi politik dan  
ekonomi-sistem krisis yang lahir  
dari modernitas.



Sumber: Kompas, 18 Mei 2009

*Membangun kaum muda yang kritis  
mampu menghambat kemiskinan di  
kalangan kaum muda.*

Kini cita-cita itu barangkali tinggal sunyi di batas masa. Akan tetapi,  
ujian berarti tenggelam dalam kesunyian harapan. Sesungguhnya  
masih banyak alternatif lain yang dapat ditempuh dalam situasi yang  
terdesak. Selalu ada celah dari lubang jarum yang kecil. Begitu kira-  
nya perumpamaan harapan dan posisi pemuda yang semakin sulit.  
Hal itu menjadi motivasi setiap warga negara, terutama kaum muda  
untuk lebih berpikir keras dalam memecahkan masalah krusial yang  
menimpa kepemudaan, seperti akibat kemiskinan struktural dan  
kultural.

Masyarakat Indonesia ditengarai telah lengah terhadap tuntutan  
sekarang aktual terkait dengan penguatan sumber daya, penguatan basis-  
basis kebudayaan, dan pendidikan. Hal ini karena sebelumnya mereka  
lebih menekankan pada aspek pengejaran atas pertumbuhan ekonomi  
yang merupakan pemikiran *mainstream* terutama sejak rezim Orde  
Baru. Sampai dalam batas tertentu tantangan budaya ke depan akan  
terasa semakin kompleks di tengah kemiskinan yang tidak kunjung  
selesai, malah semakin akut. Akan tetapi, bukan tidak ada jalan keluar

dari kemelut kemiskinan akut IU. *Generasinya* Jafi peristiwa tersebut dapat memetakan kerangka analisis dari berbagai masalah yang membelit kepemudaan. Masalah-masalah tersebut antara lain *problem* kultur konsumtif, tingkat polarisasi, dan lomahnya strategi kebudayaan sampai *state building* yang selama ini diabaikan para birokrat. Hasilnya masalah kemiskinan dan kepemudaan mengalami puncak gunung esnya.

Pertanyaan pun muncul serentak ketika menjelaskan *perubahan* kepemudaan dan kemiskinan di atas, sesuai dinamika dan perubahan di dalamnya. Akankah kita tetap miskin? Pertanyaan ini seakan menyingkapkan bara pesimisme dibalik kebijakan dan etos sosial budaya masyarakat yang semakin rapuh, terutama para pemuda yang *kin* mudah terjangkit penyakit budaya populer dan abai terhadap sejarah dan cita-cita pejuang bangsa ini. Belum lagi masalah kemiskinan *kultural* yang membuat banyak orang semakin frustrasi dalam menyelesaikan problem kemiskinan.

Pada tahun 2003 pengangguran terbuka mencapai 9,85% dan tahun 2004 mencapai 10%. Beberapa spekulasi memperkirakan angka pengangguran pada tahun 2005–2009 lebih besar 10%. Diperkirakan tahun 2005 pengangguran terselubung tidak lebih baik dari tahun 1995. Angka peningkatan ini tentu mengejutkan, tetapi sekaligus tidak mengejutkan.

Mengejutkan karena sebagai bangsa yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan energi, Indonesia tidak semestinya mengalami kemiskinan, kelangkaan bahan pokok, dan beras. Yang tidak mengejutkan karena di tengah laju industri dan perubahan modus produksi yang mensyaratkan kualitas sumber daya manusia kompatibel. Indonesia justru abai terhadap pendidikan dan strategi kebudayaan. Tidak mengherankan, apabila sampai hari ini masyarakat *seolah* menghadapi situasi krisis multidimensi. Hal ini disebabkan Indonesia



Sumber: [www.oban.or.id](http://www.oban.or.id)

**Pengangguran didominasi angkatan kerja berusia muda.**

tidak memiliki prapemahaman terhadap dampak dari laju kemajuan ekonomi politik yang makin kosmopolit.

Pada tahun 2005 angka pengangguran tercatat sepuluh juta lebih orang atau 9,86% dari jumlah angkatan kerja. Ditambah dengan pengangguran setengah terbuka sebanyak 27,5%. Total angka pengangguran menjadi sekitar 29 juta jiwa. Dari 37,8% angka pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja berusia muda (pemuda) (15–24 tahun). Bisa dibayangkan yang terjadi pada kalangan muda. Pada sisi mikro akan terjadi perasaan stres dan depresi, bahkan warga merasa tidak berguna. Tidak jarang mereka nekat melakukan tindakan kriminalitas bunuh diri, tenggelam dalam praktik mafia narkoba, *women trafficking* (perdagangan perempuan), bahkan dapat memunculkan generasi teroris berbasis agama dan etnik. Sementara pada sisi makro pengangguran merupakan pemborosan sumber daya khususnya sumber daya manusia (SDM), beban keluarga, dan masyarakat.

Pada tahun 2009 diharapkan pengangguran turun menjadi enam persen. Lalu para penganggur akan bertanya, apakah mereka akan termasuk kelompok enam persen? Apakah masih harus antri panjang untuk memperoleh pekerjaan?

Dalam situasi ini dan berdasarkan data di atas, pertanyaan tersebut menjadi relevan dan akan menemui jawaban tragisnya, yaitu orang miskin akan tetap miskin, meskipun memperoleh santunan jaring pengaman sosial (JPS) atau bantuan langsung tunai (BLT). Orang miskin tidak akan menjadi kaya karena santunan-santunan atau bantuan-bantuan yang selama ini diberikan.

Si miskin akan tetap miskin selama tidak bisa mendayungkan kapasitas produktifnya atau selama dia tidak bekerja. Oleh karena itu, tidak heran apabila di mana-mana, bahkan di negeri tetangga pemuda



Sumber: [www.alfiansung.com](http://www.alfiansung.com)

Tidak sedikit kaum muda yang meninggalkan desa hanya untuk menjadi pengamen di kota.

asal negeri ini bermigrasi ke luar kota dan negeri lain untuk mencari nafkah serta menjadi tenaga kerja Indonesia. Di kota-kota mereka mengemis meninggalkan sawah dan desa karena ketiadaan akses pekerjaan dan pendidikan yang minim baik formal maupun nonformal.

Belum lagi faktor budaya yang cenderung ikut kerja kepada orang lain, melamar kerja kepada mandor atau majikan, mencari lowongan kerja, dan juga belum mengemban *mindset* menciptakan kerja bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Padahal sebagaimana di atas disinggung bahwa mengubah *mindset* dari pekerja ke etos kerja mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Semua itu tentu membutuhkan desain pendidikan dan strategi kebudayaan yang memiliki jangkauan visi ke depan. Selain melestarikan budaya *entrepreneurship*, kepemimpinan organisasi perlu pula ditanamkan sejak dini di kalangan kaum muda.

Hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan cita-cita awal kemerdekaan, yaitu 'mencerdaskan kehidupan bangsa'. Berdasarkan pernyataan tersebut jelas "kehidupan"-lah yang harus dicerdaskan, dan bukan kemampuan otak. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan konsepsi budaya daripada konsepsi biologis genetika. Para pendiri republik menolak sikap dan perilaku *ke-inlander-an*, yaitu sikap hidup sebagai *inlander*, terjajah, terbenam harga dirinya, penuh *unfreedom* atau ketidakbebasan, dan keterbelengguan diri.

Kita harus mengingat petuah para pendiri republik yang selalu mengajarkan bahwa kehidupan yang cerdas menuntut kesadaran harga diri, harkat dan martabat, kemandirian, pintar, serta jujur. Selain itu, memiliki kemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif. Di sinilah pemikiran para pendiri republik dikatakan menembus masa, mendahului lahirnya paham-paham pembangunan progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek luhur bahwa pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya.

## Masalah dan Solusi Pengentasan Kemiskinan

Setiap kita pasti tidak ingin hidup miskin atau dibuat miskin. Kalimat negatif itu setidaknya dapat menyatakan sebuah sikap kejujuran. Apabila

setiap kita ditanya, apakah nyaman hidup miskin atau dimiskinkan? Pasti jawabannya tidak! Jadi, tidak seorang pun ingin hidup miskin atau menjadi miskin.

Mencari jalan penyelesaian kemiskinan merupakan usaha yang kompleks dan sulit. Sampai batas tertentu kadang semua itu semakin membuat orang depresi dan frustrasi, ibarat mencari jalan di hutan belantara. Itulah gambaran apabila mencari benang merah dari masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks karena tidak ada alternatif instant. Bahkan, ketika kita tersesat dalam kemiskinan hampir sama sulitnya mencari jalan keluar dari hutan belantara kemiskinan tersebut.

Alih-alih mencari jalan keluar, kita kadang terjerumus dalam lubang yang lebih dalam. Oleh karena itu, segala sesuatu menyangkut penyelesaian kemiskinan harus dimulai dengan memerhatikan hal-hal kecil dalam keseharian kita, tanpa meninggalkan cita-cita besar yang semestinya mampu diorganisasi kalangan pemuda untuk mengubah formasi-formasi sosial masyarakat.

Misalnya seorang teman yang terlalu tergiur dengan mudahnya pinjaman rentenir atau bank dengan bunga yang besar, tanpa mempertimbangkan risiko ke depan. Tindakan tersebut tidak akan membuatnya keluar dari jerat kemiskinan, sebaliknya semakin terperosok lebih dalam. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan memerhatikan dan memulainya dengan hal-hal kecil atau melakukan hal paling minimal positif yang dapat kita lakukan saat itu, tanpa harus memulainya dengan desain besar.

Pemandangan kemiskinan yang sudah menjadi suguhan miris kadang membangunkan semangat kaum muda untuk menyusun *grand naratif uspay strategi* kemiskinan, tetapi luput dari hal-hal detail yang harus diperbaiki dalam tubuh gerakan kepemudaan. Hal ini menyebabkan setiap program ideal dan besar akan melangit, bahkan cenderung tinggal di atas awan tidak berjejak. Terlebih dalam situasi rakyat menjerit, susah cari kerja, minyak tanah langka, nasi aking, angka kriminalitas meningkat, perceraian yang disebabkan oleh kemiskinan, sampai maraknya peristiwa bunuh diri karena tidak tahan menanggung beban kemiskinan.

Fakta negatif ini adalah gambaran-gambaran nyata masyarakat yang sangat beragama, entah karena lemahnya pendidikan, kemalasan, kesempalan, lemahnya modal, dan terutama mirimnya sokongan negara, serta kebijakan yang selama ini belum memihak pada pembangunan ekonomi kerakyatan. Angka kemiskinan meningkat dari yang terkecil sampai yang paling membongkok. Di manakah letak persoalan sesungguhnya, yang harus diselesaikan paling awal dan paling kecil kemungkinan dapat diselesaikan oleh pemuda? Pertanyaan inilah yang sulit dijawab hingga hari ini.

Fakta kemiskinan yang merupakan realitas paling sulit menemukan ujung pangkalnya itu adalah cermin dari abainya kita menengok hal-hal kecil dalam hidup. Lepas dari banyak sebab dan persoalan di atas, harapan akan kesejahteraan sangat tipis. Harapan dan seleses cita-cita harus dimiliki untuk tidak berkutat pada problem yang hanya berjalan di tempat. Agama dan ajaran budaya paling tidak menjadi inspirasi. Memulai dari diri sendiri itu penting. Dari mana? Tentunya dari hal-hal kecil yang memiliki visi jangka panjang sebagaimana telah disinggung di atas.

Ada kisah bijaksana dan menarik dari hikayat budaya maupun agama yang bisa dipetik untuk memompa kesadaran, semangat, dan gairah guna bangkit keluar dari kemiskinan. Kisah itu menceritakan sang kakek pada masa kerajaan Abdul Aziz abad II H. Kakek itu konon petani miskin yang menanam kurma di tengah usianya yang senja. Pohon yang ia tanam tentu memakan waktu lama dan belum tentu ia menikmati pada hari, minggu, bulan, bahkan tahun atau pada masa ia hidup. Justru dari situ ada filosofi menarik dari si kakek bahwa sesuatu yang ditanamnya hari ini kelak akan dimakan cucu-cucunya. Itulah satu contoh berharga yang menyiratkan ajaran bahwa kepentingan jangka panjang lebih penting daripada hari ini.

Mentalitas ini menjadi semangat kaum muda pada masa lalu yang memperjuangkan kemerdekaan. Meskipun mereka akhirnya tidak dapat menikmati kemerdekaan pada sisa hidupnya, mereka yakin bahwa perjuangan itu tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, perumpamaan di atas dapat menjadi titik tolak dan motivasi agar kaum muda tidak ragu memulai pekerjaan dari hal-hal kecil di sekelilingnya baik menanam

modal, perajin, dan sejenisnya yang memiliki kepentingan jangka panjang. Muara dari semua itu adalah ajaran moral yang mengajarkan bahwa jangan takut untuk berkarya, meskipun dari hal-hal yang kecil yang ada di sekeliling potensinya.

Bagaimana kalau hari ini kita lapar, haus, dan hampir tidak kuat menahan beban hidup? Jawabannya mungkin bukan contoh di atas. Jawabannya dapat macam-macam bisa mulai dengan bekerja sama, meminta bantuan negara dan orang lain. Dengan menajamkan kemampuan diri dan kemampuan isadanya yang didasari usaha dan semangat yang bertolak dari motivasi dasar di atas. Dalam bahasa lain, jika ada pilihan kecuali dengan bekerja keras sungguh-sungguh, untuk menahan dan membuka jalan baru. Dalam agama, akhir dari semuanya bermuara pada takwaf. Akan tetapi, dalam pengertian itu dilakukan dengan doa dan kesungguhan usaha. Oleh karena itu, kesemuanya berputar dari kepercayaan diri dan kesungguhan untuk memulai sendiri yang paling minimal.

Selain masyarakat, pemuda juga harus sadar bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau di luar yang menentukan kemiskinan berlangsung. Jadi, tidak bersifat alami semata. Kejelian dan kepedulian serta perlawanan terhadap kebijakan yang memang patut diperhatikan, melalui koridor hukum, damai, dan strategis, terutama dalam menagih janji hak-hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, masyarakat terutama elemen kepemudaan harus mampu membangun aliansi dan solidaritas, meskipun dimulai dari kelompok-kelompok kecil, agar setiap orang mampu bekerja dan berkembang, maupun menanggapi isu-isu sosial yang berkembang di luar. Bahasa sederhananya ringan kecil tetapi memiliki daya dukung ekonomi dan sosial serta etos kerja yang tinggi untuk menopang komunitas.

Komunitas kecil tersebut tidak hanya berhubungan dalam konteks organisasi yang bersifat emosional semata, tetapi bersifat fungsional yang sinergis. Oleh karena itu, etos sosial dan budaya menjadi penting selain adanya sokongan modal.

Selama ini akar-akar komunitas dalam bingkai solidaritas dan etos kerja perlahan hilang dan rapuh akibat kemiskinan. Kemiskinan sendiri selain mendorong berkembangnya aneka penyakit kronis, seperti busung lapar, demam berdarah, atau polio, juga memaksa orang miskin melakukan jalan pintas, yaitu kriminalitas, menjual diri, atau menjual bayi kandungan demi uang serta problem lainnya. Yang paling menderita akibat kemiskinan adalah kaum miskin itu sendiri terlebih apabila terlepas dari ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat.



Sumber: Kompas, 4 Maret 2009

*Sangatnya prostitusi salah satu akibat dari kemiskinan.*

Selain menjadi korban keganasan hidup, orang miskin juga menjadi kambing hitam persepsi masyarakat (*blaming the victim*). Orang miskin acap dilihat sebagai sebab, bukan akibat ketidakadilan. Oleh karena itu, perjuangan memberantas kemiskinan tidak cukup hanya dengan mengandaikan level makro sosial ekonomi politik melalui berbagai keputusan pemerintah. Kemiskinan juga harus diperangi pada level mikrososial, yaitu individu, keluarga, dan organisasi masyarakat terutama kepemudaan.

Melalui perspektif mikro kerangka pengentasan kemiskinan lebih menekankan kemiskinan sebagai pengalaman pergulatan hidup keseharian. Pendekatan pada level mikro menitikberatkan pada pandangan orang miskin sendiri, kondisi kemiskinan dialami, dirasakan, dan dihadapi dalam hidup keseharian serta cara mereka berjuang melepaskan diri dari jerat kemiskinan, terlebih yang dialami ribuan kaum muda saat ini, baik di daerah maupun perkotaan.

Bagaimanapun pengalaman mengenai kemiskinan tidak selalu sama. Pengalaman itu berbeda satu sama lain. Mereka memiliki pandangan sendiri dalam menafsirkan keadaan yang mereka hadapi

dengan kaca mata sendiri. Mereka melihat kemiskinan dalam bangunan konstruksi sosialnya sendiri. Oleh karena itu, celah atau lubang perbedaan harus diarungi sekaligus dicari jawabannya dengan cara menentukan kriteria dan pertimbangan yang paling baik untuk memulai, melakukan serta mengatasi setiap kemiskinan yang dialami sehari-hari.

Sejatinya, orang miskin ditempatkan sebagai orang yang bukan sosok tanpa daya dan harapan. Mereka serantiasa berjuang untuk bertahan dan mengubah hidupnya. Mereka bukan sosok lemah tanpa kekuatan, meskipun ditindas struktur sosial. Sebenarnya dalam konteks ini memandang martabat dan posisi kaum miskin tetap memiliki daya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Terlebih apabila sosok tersebut ditempatkan pada kalayak kaum muda yang membutuhkan motivasi dan penempatan diri yang layak di tengah masyarakat agar ia tidak pernah merasa menjadi beban sosial karena kondisinya yang miskin. Pandangan ini melihat martabat semua manusia di ruang publik adalah sama memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi, dalam arti tertentu kondisi struktural dan kultural akhirnya menjerat mereka terutama kaum muda dalam kemiskinan yang akut. Dalam konteks ini membangkitkan kembali semangat dan posisi kaum miskin menjadi penting sehingga kedaulatan manusia dapat ditegakkan sepenuhnya.

Dalam pandangan ini kita melihat berbagai tindak kriminal yang mereka lakukan merupakan cerminan dari kreativitas mereka atau sejenis upaya *struggle for survival*, berjuang untuk tetap hidup dalam melanjutkan hidup. Semua itu menjadi kasus negatif dari bentuk frustrasi sosial akibat kemiskinan, meskipun kriminalitas belum tentu karena faktor kemiskinan. Akan tetapi, dalam tindakan negatif kita masih melihatnya secara positif bahwa energi negatif di atas masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan positif, terutama merevitalisasi peran dan posisi kaum muda, baik pada level kesadaran maupun praktis dalam kehidupan sosial politik mutakhir.

Bagaimanapun masalah kemiskinan hanya dapat diatasi jika perekonomian nasional secara keseluruhan tumbuh dan berkembang maju, dari tahap pertanian menuju ke tahap industri dan jasa. Kebijakan terbaik adalah membuka diri terhadap dunia luar dan menerapkan

*market-friendly policies*. Selain itu, perlu pula melakukan revitalisasi pertanian dan melaksanakan kebijakan beras yang menjamin kestabilan harga. Serta pentingnya membangun sumber daya manusia yang andal sebagai kunci dari pembangunan mental dan etos kerja kaum muda.

## **Pentingnya Membangun Motivasi**

Dalam kasus ini bangunan dari etos kebudayaan sangat penting sebagai modal dasar pengentasan kemiskinan, terutama untuk mengubah hidup dan menyalakan cita-cita guna bangkit dari kemiskinan. Entah dorongan nilai spiritual dari agama maupun nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang sebagian kita pelajari dari perumpamaan bijak atau teladan dari kisah-kisah orang yang beragama dalam mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, berkaca dan belajar dari orang lain juga penting.

Dibandingkan dengan perubahan ekonomi dan teknologi, transformasi budaya senantiasa berjalan lambat sehingga lolos dari perhatian pakar ekonomi dan politisi. Para pengambil keputusan selalu terpancang pada kebijakan makro sehingga mengabaikan pentingnya pendekatan mikro. Akhirnya, masyarakat miskin pun turut larut dalam situasi itu.

Padahal, mengikuti arus tanpa pengetahuan akan lebih berbahaya daripada tidak mengikutinya. Misalnya mengikuti tren motor atau penggunaan alat canggih. Orang kadang lebih mementingkan membeli motor, televisi, kulkas, dan alat-alat canggih lainnya daripada menabung untuk sekolah anaknya pada masa depan atau lebih memilih membelikan motor anaknya daripada membelikan keperluan belajar.

Orang tua atau masyarakat yang masih dihantui oleh kemiskinan harus memiliki motivasi yang kuat, paling tidak dimulai dari diri dan keluarga agar lebih mementingkan motivasi masa depan daripada masa kini. Contoh menginvestasikan anak agar dapat mengenyam pendidikan. Hal itu karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang akan menentukan pada abad persaingan global. Nilai dan motivasi yang muncul dalam nilai-nilai kemanusiaan universal kiranya dapat menyokong tumbuh suburnya gerakan kepemudaan dan mampu

mengubah formasi masyarakat dari kemiskinan ke arah hidup yang lebih sejahtera.

Dalam memerangi kemiskinan, peran budaya amat penting guna memotivasi dan menawarkan kondisi simbolik yang mendukung perubahan sosial. Pentingnya faktor budaya tidak berarti menempatkan kemiskinan sebagai masalah budaya.

Manusia pada dasarnya makhluk simbolik sehingga untuk bertahan hidup dan melawan kemiskinan tidak cukup dengan ekonomi atau fisik, tetapi juga budaya. Semua ini membutuhkan tidak hanya materi budaya, tetapi juga motivasi dan makna (*meaning*). Sebagai sumber makna, peran agama amat fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh agama dalam melawan kemiskinan melibatkan dimensi lain, seperti simbolik, motivasi, kognitif, dan normatif.

Dalam memerangi kemiskinan pada level individu, agama memainkan peran amat penting sebagai spirit untuk berjuang dan bertahan hidup melawan kemiskinan. Makna semacam ini hanya ditangkap dan dimengerti oleh orang-orang miskin sendiri. Memahami makna praktik keagamaan dan kepercayaan amat fundamental, yaitu makna agama ditangkap sebagai spirit dasar dalam hidup keseharian. Dalam spirit agama, kemiskinan merupakan korban ketidakadilan dan dosa sosial yang harus dilawan. Oleh karena itu, baik secara simbolik, kognitif, dan normatif nilai-nilai dalam agama sendiri dapat diinstitusionalisasikan pada lembaga kepemudaan yang pro terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, doktrin keagamaan tersebut tidak hanya mengawang di antara rajutan ayat semata.

Selain membangun dan memompa motivasi dan cita-cita di atas, masyarakat juga harus mau dan bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain yang terbukti telah berhasil. Misalnya di Brasil. Dengan gerakan *Pentecostal* dan *Christian Base Communities* (CEB) mereka berhasil menggunakan metode ini. Mereka memanfaatkan agama sebagai pendekatan alternatif dalam melawan kemiskinan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sebenarnya tidak perlu malu belajar dari negeri atau kebijaksanaan mana pun karena kemuliaan sendiri kadang datang dari proses petualangan panjang atau menyeberangi ragam

kebudayaan. Hijrah kata Nabi Muhammad atau carilah ilmu sampai ke negeri Cina.

Perumpamaan-perumpamaan sederhana yang datang dari Nabi Muhammad merupakan petuah berharga agar manusia selalu termotivasi untuk hijrah atau berubah dari satu tempat ke tempat dalam rangka mencari kemuliaan dan kesejahteraan hidup.

Oleh karena itu, paham dan keyakinan akan perubahan itu harus selalu ditanam dalam jiwa setiap individu. Mulailah dengan menelusuri potensi diri, dengan segenap kesungguhan dan kemampuan, doa, usaha, dan cita-cita untuk berubah. Dalam hal ini nilai-nilai spiritual agama sangat penting untuk memompa semangat dan kesadaran individu. Anggaplah seliap kita akan hidup lama atau abadi di dunia. Oleh karena itu, petuah bijak Nabi Muhammad dapat ditempatkan ketika kita sedang atau harus bekerja. Anggaplah kita mati esok. Ketika di sela-sela berdoa atau ketika sedang bekerja karena dengan kekhusyukan kita bertambah dan keterbatasan akan tampak sehingga gairah spiritual itu tidak berpusat pada yang duniawi semata.

Beberapa prinsip di atas paling tidak menjadi gambaran betapa dalam situasi kemiskinan yang akut kita harus tetap memiliki semangat untuk hidup dan berubah seliap saat. Modal sosial, kultur, dan agama harus menjadi etos bagi setiap individu maupun kelompok. Selain itu, masyarakat harus mendahulukan jangka panjang daripada untuk hari ini.

## **Kebijakan Populis Antikemiskinan di Kalangan Pemuda**

Beberapa pokok bahasan di atas setidaknya dapat menjadi rujukan sebagai skema kebijakan populis antikemiskinan di kalangan pemuda. Terutama terkait dengan motivasi proses institusionalisasi nilai-nilai etos kerja dan langkah-langkah konkret dalam pengentasan masalah kemiskinan di tingkat kaum muda. Beberapa aspek yang terkait dengan itu harus mendasarkan diri pada upaya-upaya serius dan sistematis dalam membunuh virus kemiskinan dan mendiagnosisnya secara sistematis melalui langkah-langkah komprehensif.

Dengan membaca sejumlah indikator persoalan pemuda, terkait dengan faktor dan kondisi yang dialami terutama dalam situasi

kemiskinan dan ketiadaan akses pekerjaan serta lemahnya pendidikan mengakibatkan munculnya problem pengangguran. Oleh karena itu, ketersediaan lapangan kerja menjadi sangat mendesak. Selain itu, instansi terkait seperti kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora) harus mampu mewadahi dan menciptakan sumber daya pemuda yang andal dan mampu berkarya dalam bentuk apa pun. Artinya, harus ada program seperti pelatihan atau bentuk lain yang mampu melahirkan kreativitas tertentu. Selain itu, aspek pembangunan mental dan spiritual generasi muda menjadi penting karena rentannya zaman pada era keterbukaan informasi dan arus perubahan transaksi ekonomi yang semakin cepat.

Terkait dengan hal tersebut menpora sebagai lembaga yang menjadi wadah pembenahan dan penyokong segala aktivitas kepemudaan di seluruh Indonesia perlu memfasilitasi proses kemampuan berkarya dari kaum muda, sekaligus menjadikan diri sebagai motor perubahan dari kepentingan pemuda. Tanggung jawab pengembangan berarti lembaga terkait ikut melakukan pengayaan-pengayaan dalam bentuk karya yang berkaitan dengan penggodokan etos kerja dan profesionalisme dalam arti luas. Yang lebih penting adalah membangun watak kepemimpinan kaum muda yang memiliki jiwa kewiraswastaan sehingga pemuda dapat menjadi mandiri secara ekonomi dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Sebaliknya, pemuda harus menjadi sandaran bagi mereka yang lemah dan memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri dan lingkungan sekelilingnya. Selain itu terkait juga dengan sarana dan prasarana untuk proses pengembangan, sesuai dengan tingkat keberhasilan. Dalam konteks ini, signifikansi peran organisasi atau lembaga yang membawahi pengembangan kaum muda untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses "pemasaran" atas karya pemuda.

Dengan demikian, model pengembangan semacam ini merupakan bentuk dari upaya transformasi lebih jauh program-program kepemudaan ke sektor-sektor strategis lain. Hal ini membutuhkan kejelian untuk melihat setiap potensi dan kemampuan yang ada pada setiap wilayah sehingga program-program yang dibuat organisasi atau lembaga kepemudaan tidak salah tempat atau sasaran dan hanya

membuang energi. Oleh karena itu, upaya menganalisa dan melihat potensi wilayah, semisal daerah pertanian atau industri menjadi penting sebagai tolok ukur program dan evaluasi serta realisasi anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Setiap program kepemudaan dapat berjalan secara efektif dan betul-betul dapat diwujudkan oleh kalangan masyarakat terutama pemuda. Oleh sebab itu, selain menpora yang mengatasi masalah ini, organisasi kepemudaan terkait, ikut mendesak departemen-departemen kenegaraan lain, seperti Departemen Pertanian, Departemen Industri dan Perdagangan, bahkan BUMN dan BUMD untuk memberikan perhatian tertentu terhadap agenda pengembangan pemuda daerah. Sinergitas antar lembaga dapat menghasilkan target maksimum.

Agenda-agenda tersebut bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan pemuda, tetapi juga berpotensi mencegah urbanisasi kaum muda yang akan menjadi masalah tersendiri di tengah kota, jika tidak dibekali keunggulan praktis. Saat ini keunggulan praktis sangat penting untuk memberdayakan generasi muda agar tidak selalu bermimpi ke kota-kota besar sebagai stasion terakhir dalam mencari uang dan kesejahteraan hidup.

Oleh karena itu, pemuda pengangguran juga harus diantisipasi di tingkat daerah karena akan menyumbang angka urbanisasi secara besar-besaran yang menyebabkan lumpuhnya otas ekonomi di tingkat pedesaan. Selain itu, kondisi pengangguran juga mempunyai dampak buruk bagi masa depan kaum muda. Kejelian lembaga kepemudaan dituntut agar peka terhadap potensi. Contoh di bidang olahraga. Selayaknya kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan rekomendasi khusus untuk pembinaan dan pengembangan serta pelatihan yang layak bagi mereka yang memiliki potensi. Selain itu, harus didukung pula oleh modal sosial dan kapital. Menpora perlu mengundang kalangan pengusaha setempat yang diketahui pemda untuk terlibat dalam proses pembinaan. Model untuk menarik para partisipan pendanaan bisa dengan *reward system* yang dapat dibicarakan lebih lanjut bentuknya.

Sementara itu, dampak negatif baik dari pengangguran maupun kemiskinan serta pergaulan bebas merupakan tanggung jawab lembaga kepemudaan. Lembaga kepemudaan harus bekerja keras secara terpolat dan sistematis untuk menghadapi masalah negatif yang diakibatkan masalah di atas. Meskipun diakui bahwa hal itu tidak hanya berada tanggung jawab pada lembaga kepemudaan. Akan tetapi, sebagai lembaga dan organisasi kepemudaan lembaga-lembaga tersebut perlu tampil terdepan untuk menghadapi problem narkoba, serta kriminalitas lainnya, meskipun dengan pendekatan yang bersifat persuasif, seperti menyuatkan program kegiatan bagi pemuda dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, maksimalisasi kegiatan ini mempunyai potensi untuk mengurangi ketergantungan walaupun tidak secara sekaligus. Yang terpenting adalah cara kantor Menpora dan lembaga terkait dapat memprakarsai agenda-agenda strategis mendorong kalangan pemuda merasa tertarik untuk terlibat dan secara tidak sadar terkurangi ingatannya pada narkoba dan mencegah tindak kriminalitas. Intensitas kegiatan yang diikuti pemuda pecandu narkoba dan pelaku kriminalitas akan memiliki makna penting. Oleh karena itu, menpora perlu meningkatkan kerja sama dengan banyak pemerintah daerah (pemda) dan pengusaha untuk kepentingan pemuda itu.

Sementara di bidang lain dalam rangka menghadapi sebagian civitas akademik yang pragmatik, lembaga kepemudaan hanya perlu diarahkan ke agenda kegiatan yang jauh lebih konstruktif. Di tengah kegiatan studi, tidak ada salahnya mereka dilibatkan dalam proses perumusan atau kegiatan-kegiatan lain. Partisipasi kaum muda idealnya harus mendapat balasan secara proporsional karena melalui lembaga itulah kaum profesional mampu mencetak kaum muda yang andal. Walaupun mungkin saja nilainya jauh di bawah standar jika diperbandingkan dengan kegiatan politik praktis seperti demo bayaran. Namun demikian, lembaga-lembaga kepemudaan seperti menpora perlu meyakinkan manfaat jangka panjang bagi pemuda yang terlibat secara dini dalam proses perumusan masalah kemasayarakatan. Sementara itu, keterlibatan pemuda menjadi ruang strategis untuk mengembalikan jati diri pemuda sebagai insan ideolog yang tetap mengedepankan idealisme dibanding masalah yang pragmatis.

Hal lain yang perlu dicatat adalah pragmatisme yang bernuansa materialisme tidak mudah digeser dengan idealisme semata, melainkan selalu membuka kemungkinan negosiasi, bahkan kompromi, sejauh terdapat nilai-nilai idealisme di dalamnya, terutama ketika kerja sama antarlembaga berlangsung. Unsur materialisme sendiri merupakan hal yang belum bisa digeser sepenuhnya, tetapi memiliki intensitas kerja sama mahasiswa dan kantor menpora. Jika hal ini dilakukan sesuai dengan program, diperkirakan mampu mengembalikan integritas diri pemuda sebagai insan yang tetap idealis yang dapat diekspresikan dengan saluran yang proporsional.

Selama ini "Kaum Muda" sebagai kosakata sosial, memiliki konotasi yang identik dengan semangat pembaruan, progresif, dan transformatif. Meskipun idiom itu belum tentu mewakili kategori heroik di atas. Atau jangan-jangan hanya melayani semangat heroisme sebagaimana tampil dalam bentuk kekuasaan hierarkis jauh sebelum era modern lalu. Istilah itu sendiri sulit dicari batasan dan makna yang melekat di dalamnya.

Meskipun demikian, istilah itu mudah dilihat dengan sesuatu yang kontras atau memperlawankan istilah yang berbeda dengannya, yaitu yang bukan muda atau dengan kata lain "Kaum Tua". Sebagaimana telah kita singgung di atas.

Kategori atau klasifikasi (muda vs tua) semacam ini merupakan kategori fisik semata, ketika yang muda selalu dipandang memiliki ketahanan stamina, pikiran, energi, dan daya dobrak atas kemapanan. Meskipun tidak selalu setiap yang muda secara fisik lebih dari yang tua, menurut ukuran atau batasan umur dan atau berdasarkan tahap-tahap perkembangan sebagaimana dalam narasi psikologi perkembangan.

Selain itu, secara umum istilah itu mungkin akan lebih mudah dipahami dalam sifat dan identitas yang terbatas, sejauh bertolak dari semangat atau cita-cita dasar yang integratif-progresif dalam konteks keindonesiaan. Oleh karena itu, yang tersirat dari kosakata politik "Kaum Muda", menurut hemat penulis, lebih merupakan se bentuk gerakan politik yang identik dengan semangat patriotisme dan heroisme politik yang dibayangkan bersifat progresif tadi.

Dalam konteks historis, biasanya kepemimpinan kaum muda atau *"The Young Leader"* yang belakangan diusung adalah akumulasi dari segenap kekecewaan atau keprihatinan atas kepemimpinan politik yang selama ini tidak kunjung mampu membawa rakyat keluar dari jerat kultur politik antipembaruan. Oleh karena itu, gerakan kepemimpinan kaum muda menjadi sejenis manifesto politik yang hendak menyuntikkan darah segar optimisme, bahkan terselip utopianisme di tengah krisis kepemimpinan politik yang belum steril dari kekuasaan masa lalu.

Pada masa lalu terutama ketika era penjajahan, gerakan semacam ini lazim terjadi sebagai letupan perlawanan sekaligus roh atau spirit yang memanasifasikan diri dalam idiom atau bahasa patriotisme dalam rangka melawan ketidakadilan struktur sosial politik ekonomi, sebagaimana juga lazim pada era Perang Dunia II pada umumnya.

Tokoh-tokoh seperti, Budi Utomo, Hatta, Sjahrir, Bung Karno, dan sejenisnya adalah beberapa contoh figur atau individu yang mampu membawa aspirasi sekaligus mengatasnamakan kebangkitan kaum muda Indonesia dalam merebut cita-cita kedaulatan yang saat itu sudah dibangun bertahun-tahun oleh para patriotis kemerdekaan Indonesia. Di usia mereka yang muda, mereka mampu mengobarkan semangat heroisme dan patriotisme yang tidak hanya kukuh dengan utopianisme, tetapi lebih dari itu adalah kemampuan integrasi dan transformasi kultur politik yang lebih progresif.

Lebih jauh apabila bertolak dari sejarah pencerahan di Eropa abad XVII, terutama di Prancis. Tampaknya gerakan "Kaum Muda" boleh jadi terpesona atas cita-cita "yang politis" yang ketika itu basis-basis heroisme dan patriotisme memiliki jejak dan momentumnya yang revolusioner. Hal itu terjadi terutama ketika tatanan dan struktur yang hierarkis politik dapat diubah oleh semangat kedaulatan yang bertolak dari prinsip-prinsip etis, seperti kebebasan, kesetaraan, dan persahabatan, yang kini disebut sebagai "demokrasi".

Seiring dengan itu, semangat atas "yang politis" dipandang sebagai tindakan mulia/agung (*noble*) yang tercermin dalam struktur dan hierarki kekuasaan, daripada aktivitas ekonomi yang lebih dipandang rendah karena bersifat privat. Hal itu tercermin dalam filsafat politik Aristoteles, *"Politics"*, yang merefleksikan citra kekuasaan politik Athena. Menurut Athena, politis sesungguhnya bertolak dari semangat dan cita-cita dasar

*demos* (rakyat) dan *cratos* (kuasa) didasarkan pada prinsip dan kebijaksanaan hidup, seperti semangat kebebasan, kesetaraan, dan persahabatan (*liberty, equality, and fraternity*) dalam konteks ruang publik politik. *Politis* dibayangkan sebagai *"vita contemplativa"* atau tindakan reflektif atau dalam bahasa filsuf Jerman Hannah Arendt dan Jürgen Habermas disebut sebagai tindakan komunikatif yang menjelma dalam diskursus ruang publik.

Dalam konteks ini *politis* berolak dari dan bertujuan meraih cita-cita keluhuran (*nobility*) dalam setiap tahap kebudayaan. *Politis* juga merupakan proses berlangsungnya transisi *politis* dan *ekonomis* dalam proses dan pembentukan kebudayaan.

Selain itu, menelusik hubungan antara bahasa dan kuasa juga menjadi penting. Terutama ketika bahasa secara alami lahir sebagai ungkapan emotif dengan idiom atau istilah yang lebih berpilah pada bentuk daripada isi. Artinya, bahasa dalam sejarah kekuasaan menjadi instrumen yang vital dalam memformulasikan kenyataan *politis*, meskipun tidak selalu memuat unsur ekspresif dan makna dari setiap idiom yang terucap, kecuali sebatas konsep yang terbatas.

Oleh karena itu, kata-kata atau idiom politik kadang kosong secara makna, bahkan secara diam-diam menjadi pelayan bagi *heroisme*, sebagaimana tampil dalam struktur kekuasaan hierarkis abad pertengahan lalu. Meskipun tidak dapat ditampik bahwa dengan bahasa individu menjadi universal sekaligus impersonal sebagaimana tampil dalam figur tokoh yang merefleksikan semangat perjuangan dan kepahlawanan. Nilai-nilai luhur kepahlawanan ini seharusnya dipegang teguh kalangan pemuda di tengah rakyat yang membutuhkan oksigen *optimisme* dan pendampingan terus-menerus baik di tingkat kota maupun pedesaan. Meskipun dalam badai krisis dan *pesimisme*, kaum muda dapat tampil sebagai figur yang mampu membangunkan masyarakat dari tidur *apatisme*, menyadarkan keriuhan *terorisme*, *puntarisme*, serta melabrak buaian *hedonisme* dan *konsumerisme*.

Dalam konteks ini bahasa politik "Kaum Muda" juga identik dengan *katup* emotif, yang boleh jadi ia membuka momentum transisi politik dalam tahap kebudayaan Indonesia kini. Oleh karena itu, kondisi separasi individu dan dunia di luarnya akan terlihat jelas, ketika kondisi

negatif dalam tatanan politik itu muncul, dan dengan itu juga tersedia momentum transisi politik baru, sekaligus memberi ruang kemungkinan baru dari semangat yang tidak lagi melihat isi atas idiom yang muncul.

Hal tersebut setidaknya menegaskan bahwa letupan emotif yang muncul dari gerakan "Kaum Muda" sebenarnya memiliki bobot atau kekuatan politik yang lebih progresif dalam konteks negara modern. Dengan begitu, bahasa sebagai instrumen kekuasaan hierarkis yang sempat menjadi pelayan heroisme pada masa kerajaan absolut kini memiliki kemajuan dalam konteks politik saat ini.

Setidaknya ini terlihat ketika istilah kepemimpinan "Kaum Muda" muncul dalam perhelatan politik Indonesia yang melahirkan banyak kontroversi seputar isi dan makna dari istilah tersebut. Dengan begitu, terjebak dalam esensialisme kebudayaan. Padahal formulasi bahasa yang tampil dalam idiom tersebut sesungguhnya hanya ingin menunjukkan sebetuk peran kaum muda dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur atau membangkitkan semangat "nobility" kaum muda yang hendak membuka lorong baru bagi masa depan politik Indonesia. Terutama untuk keluar dari jerat krisis dan struktur dominan dalam kekuasaan Indonesia mutakhir.

Oleh karena itu, idiom atau bahasa yang digunakan kaum muda tidak hanya bersifat emotif, sebab dalam konteks kekuasaan politik modern, individu memiliki posisi penting sehingga tidak jatuh dalam semangat yang massif, walaupun hal itu niscaya terjadi dalam politik. Meskipun demikian, selalu terletak diferensiasi dengan konteks kekuasaan hierarkis masa lalu, yang lebih menekankan bahasa sebagai ungkapan emotif daripada ekspresif dalam menggapai cita-cita patriotisme dan heroisme.

Hal itu setidaknya untuk melihat dan menempatkan bahwa istilah itu tidak hanya kosong dan bualan siang bolong semata. Sehingga segenap cita-cita elis yang diusung tenggelam di tengah sampah-sampah peradaban akibat dari kolonisasi yang privat atas publik yang kini sedang menggejala dalam ruang publik demokratis. Lorong gelap itu sebagaimana tampak dalam dekapan kemiskinan kaum muda baik secara materi maupun budaya atau pengetahuan.

kebudayaan sehingga seluruh potensi tradisi itu tercerabut dari akar-akar kebudayaan. Bahkan yang ironis sekitar ratusan dan mungkin ribuan generasi muda di negeri ini menggadaikan nasionalisme demi sekeping harapan (dalam kasus *Hidzbul Wathan* Kalimantan) untuk negara etangga karena sudah terlalu letih menunggu perubahan dan apatis atas masa depan republik ini.

Dalam konteks inilah refleksi dan analisis mengenai masalah apemudaan dan kemiskinan sangat bertaut erat dengan kebudayaan dan masalah strategi ekonomi dan pendidikan di dalamnya. Pembangunan ekonomi yang hanya mementingkan pembangunan fisik selama ini terbukti telah membuat mentalitas generasi muda keropos, minim pengetahuan, dan minim penghayatan kebudayaan. Padahal, sebagai basis komunitas dengan lintas bahasa etnis dan agama serta sumber daya alam yang terbentang luas, Indonesia semestinya mampu menjadi negara yang kuat, tinggal *resources* sosial ekonomi itu dapat diberdayakan. Sebab basis-basis komunitas sebagai *embrio civil society* tetap memiliki peran yang signifikan untuk membangun etos kerja dan solidaritas, sejauh prinsip-prinsip mekanis atau hubungan-hubungan yang bersifat emosional dalam komunitas itu sejalan dengan prinsip-prinsip organismik atau prinsip hubungan sosial yang menekankan kerja sama sosial ekonomi yang saling menopang antarindividu dan komunitas. Oleh karena itu, di bawah ini kita akan sedikit menyinggung perihal pemberdayaan wirausaha berbasis komunitas terutama dapat dimotori oleh kaum muda sebagai aktornya.

## **Pemberdayaan Wirausaha Berbasis Komunitas**

Perubahan global yang terjadi secara cepat dewasa ini mampu memengaruhi kondisi masyarakat mana pun. Hal ini terjadi pada setiap lini kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Perubahan ini akan berdampak pada bergesernya struktur dan pola kehidupan masyarakat. Persoalannya sekarang tidak semua perubahan yang ada bisa diantisipasi dengan cepal dan cermat. Langkah ke depan adalah mengantisipasi perubahan itu agar antisipasi yang ada membuat kita mampu memproyeksikan jalan keluar yang harus dicarikan solusinya.

Menyoal perubahan sosial, struktur masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri akan mengalami stagnasi sosial. Ketika stagnasi sosial ini menjadi laten dalam kurun waktu yang lama, masyarakat bersangkutan akan mengalami ketertinggalan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, diperlukan peran serta semua elemen bangsa dalam menyikapi perubahan. Dibutuhkan daya dan upaya guna merumuskan jalan keluar yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Jalan keluar yang ada tentu saja mempertimbangkan kondisi dan menjawab kebutuhan global dewasa ini. Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus segera direncanakan dengan baik.

Menurut Caroline Paskarina, dosen Universitas Padjadjaran, model pembangunan manusia perlu diredesain dengan berbasis pada investasi modal sosial untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki kemandirian untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya.<sup>38</sup> Kebijakan investasi sosial yang perlu dikembangkan harus memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang umumnya diterapkan pada model pembangunan *basic needs*. Kebijakan investasi sosial yang dimaksud lebih dari sekadar pemenuhan pelayanan dasar, tetapi diorientasikan pada pemulihan kepercayaan diri masyarakat sehingga mampu memberdayakan diri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Investasi sosial biasanya terkait erat dengan pengembangan masyarakat atau lumrah dikenal dengan *community development*. Dalam definisi formal menurut PBB, *community development (CD)* adalah "... a process whereby the efforts of Government are united with those of the people to improve the social, cultural, and economic conditions in communities".<sup>39</sup> Dengan kata lain, CD adalah sebuah proses usaha-usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat. Secara umum, *community development* adalah suatu

<sup>38</sup> Caroline Paskarina, 2007, *Pembangunan Manusia Berbasis Investasi Sosial*, Makalah.

<sup>39</sup> PBB, *The Community Capacity Building Program*. Dalam: [www.csrresources.nl/net](http://www.csrresources.nl/net), 18 Januari 2005.

*konsep yang luas, yang mencakup berbagai bentuk upaya dengan mengaplikasikan teori dan praktik berupa kepemimpinan lokal (civic leaders), aktivis, dan melibatkan warga dan kalangan profesional untuk meningkatkan berbagai sisi kehidupan dari komunitas lokal. Dalam praktiknya, para pelaksana melakukan identifikasi permasalahan, mempelajari sumber daya setempat, menganalisis struktur kekuasaan lokal, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan berbagai hal lain di masyarakat tersebut.*

Salah satu tren dari teori dasar pengembangan masyarakat dewasa ini adalah teori sumber daya manusia. Teori sumber daya manusia menjadikan kualitas penduduk sebagai aktor kunci pembangunan dan pengembangan masyarakat. Dengan banyaknya kualitas penduduk yang ada, akan sangat memengaruhi laju pembangunan sebuah negara. Oleh karena itu, tugas negara saat ini adalah meningkatkan kualitas dan mutu rakyat selain harus menyejahterakan perekonomian rakyat. Apabila pengembangan hakikat manusiawi berjalan mulus dan berkesinambungan, partisipasi mereka akan sangat signifikan bagi pembangunan. Perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewirausahaan.<sup>40</sup>

Melihat struktur masyarakat yang kental dengan komunitas, teori pengembangan masyarakat bisa diandalkan. Kekuatan teori ini akan membuka jalan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan masyarakat baik dalam aspek material dan spiritual tanpa merombak keutuhan komunitas dalam proses perubahannya. Saat ini keutuhan komunitas mengalami penggerogotan akibat perubahan dan persepsi tentang dunia. Karakter solidaritas dan kekeluargaan semakin menyusut drastis. Kiranya penguatan komunitas menjadi penting dalam pemberdayaan kewirausahaan yang melibatkan banyak anggota komunitas.

Pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai salah satu model pendekatan pembangunan (*bottoming up approach*) merupakan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber

---

<sup>40</sup> Muhammad Khairul Najib, *Pengembangan Masyarakat Islam*, dalam *Popyula*. Dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat* edisi No. III/2003, 3-4.

daya lokal yang ada. Dalam pengembangan masyarakat hendaknya diperhatikan bahwa masyarakat mempunyai tradisi dan adat istiadat, yang kemungkinan sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial. Tidak bisa dimungkiri bahwa modal sosial menjadi keniscayaan bagi kemajuan sebuah bangsa. Selain modal material, modal sosial menjadi infrastruktur yang tidak bisa dianggap remeh, bahkan modal sosial sangat menentukan. Pelajaran negara maju menunjukkan bahwa perimbangan antara modal material dan modal sosial menjadi sangat penting. Sering sebuah negara dengan modal material yang berlimpah tidak bisa memberikan kontribusi bagi rakyatnya. Hal ini terjadi sebagai sebuah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, modal sosial diperlukan dan menjadi pertimbangan bagi kemajuan bangsa.

Pertimbangan dasar dari pengembangan masyarakat, *pertama*, melaksanakan perintah agama untuk membantu sesamanya dalam hal kebaikan. *Kedua* adalah pertimbangan kemanusiaan karena pada dasarnya manusia itu bersaudara. Dengan demikian, pengembangan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat agar mereka dapat hidup lebih baik dalam arti mutu atau kualitas hidupnya.<sup>41</sup>

Mengapa komunitas menjadi kata kunci dalam pembangunan masyarakat menjadi penting? Hal ini karena "... *community provides human beings with the unifying means of elevating the dignity of each person, providing for the needs and aspirations of all in a group, doing this in harmony with the natural environment, and making possible the communication and interaction between other social and political groups.*" Begitu besar peran komunitas karena ia dapat menjadi representatif kebutuhan individu-individu di dalamnya, dapat menciptakan keselarasan dengan alam, dan memungkinkan untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga di luar. Suatu komunitas tidak akan dapat menutup dirinya sendiri. Ia harus berinteraksi dan

---

<sup>41</sup> Sukriyanto, *Model-Model Pengembangan Masyarakat dalam Era Kekinian*, Makalah.

berkomunikasi dengan komunitas lain, secara lokal maupun global. Ada keterkaitan yang kuat antara satu komunitas dengan lainnya.<sup>42</sup>

Akan tetapi, dalam pengembangan masyarakat kajian demografi berperan penting mengingat tingkat masyarakat satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, baik jumlah populasi, kultur masyarakat, dan potensi sumber daya alam. Dengan demikian, kalkulasi biaya atau ongkos untuk pengembangan masyarakat bisa terukur dan ditentukan seberapa banyak *stakeholder* pengembangan manusia yang bisa diterjunkan. Secara keseluruhan, penduduk kita mayoritas tinggal di pedesaan. Penduduk pedesaan adalah jumlah terbanyak yang terilit kemiskinan.

Pemerintah jelas tidak memiliki ongkos besar dalam membangun masyarakat dengan kondisi perekonomian dewasa ini. Perhatian pemerintah sekarang memang sudah tepat melalui jaringan pengaman sosial atau JPS bagi rakyat kecil dan miskin. Begitu juga dengan subsidi dan pemberian bantuan langsung tunai. Akan tetapi, aksi pemerintah yang demikian tidak bisa bertahan lama. Sekaranglah saatnya bagi pemerintah dan kita semua menjadikan kelemahan yang ada sebagai solusi dari masalah yang ada. Oleh karena itu, mau tidak mau pemerintah dan semua elemen masyarakat harus kembali pada membenahan diri masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat karena pemberdayaan menjadi langkah awal yang bisa menuntun pada pembangunan sosial dan ekonomi bagi masa depan Indonesia.

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara dan ketidakberdayaan dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Kemiskinan adalah multidimensi. Masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan) dan tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya

---

<sup>42</sup> Syahyuti, *Penerapan Pendekatan Pembangunan Berbasis Komunitas*. Paper Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>42</sup>

Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah (1) inklusi dan partisipasi, (2) akses pada informasi, (3) kapasitas organisasi lokal, dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat elemen ini terkait satu sama lain dan saling mendukung.<sup>43</sup>

Dengan demikian, pengembangan dan pemberdayaan bersinergi dalam pembangunan ekonomi kolektif lewat kewirausahaan. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan saling mengisi. Strategi ini penting mengingat kondisi masyarakat yang dikenal dengan solidaritas dan kekeluargaannya akan dengan mudah diberdayakan dan dibangun imajinasi. Akan tetapi, dewasa ini solidaritas semakin menipis dan hampir menyisakan individualitas. Oleh karena itu, pengembangan manusia menjadi salah satu upaya perwujudan dan perekatan solidaritas. Dari situlah pembangunan ikut menambah penting peranan kolektif masyarakat dalam lini kehidupan jika pemberdayaan masyarakat sudah berjalan. Salah satu lini kehidupan yang masih menyisakan kemandekan adalah perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam aspek perekonomian teori ini membuka kebuntuan dalam mentransformasikannya ke dalam bentuk kewirausahaan kolektif.

Bob Widyahartono, pengamat ekonomi bisnis Asia dan akademisi Universitas Tarumanagara, mengatakan bahwa *kewirausahaan kolektif justru telah banyak teruji dengan memberi kontribusi bagi pertumbuhan perusahaan*.<sup>44</sup> Perwujudan kolektif itu senyatanya membutuhkan proses yang lama dan berkesinambungan. Semua ini tidak semudah seperti yang dibayangkan banyak orang. Apalagi unsur kegagalan akan selalu menjadi bayang-bayang pada prosesnya karena tidak semua anggota yang bergelut dalam kewirausahaan mempunyai kekuatan mental yang kuat. Rasa takut gagal, rasa waswas pantas dijadikan pertimbangan

---

<sup>42</sup> Herry Darwanto, *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Masyarakat Terpencil*. Dalam [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id).

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Bob Widyahartono, *Jika Kewirausahaan Bisa dari Individual ke Kolektif*. *Antara News*, 2 Februari 2008.

setiap anggota dan itu manusiawi. Akan tetapi tidak mungkin semua unsur emosional itu dihilangkan. Oleh karena itu, dukungan dan komitmen kuat setiap anggota menjadi penting untuk menghadapi segala cobaan di tengah jalan.

Beberapa yang perlu menjadi pertimbangan sekarang adalah perekonomian harus dimulai dari unit terkecil atau memberdayakan komunitas yang ada. Pemuda sebagai aktor perubahan bisa menjadi garda depan dalam pemberdayaan ekonomi kewirausahaan. Salah satu pertimbangan pemuda sebagai aktor yang bisa terlibat penuh adalah eksistensi mereka yang banyak membentuk organisasi kepemudaan dengan jaringan yang luas. Komunikasi kelembagaan yang intens di antara mereka menjadi keuntungan tersendiri. Pemberdayaan perekonomian lewat komunitas seperti ini akan berdampak dan memiliki sasaran yang terjangkau dan terarah. Mau tidak mau pemberdayaan dengan lembaga kepemudaan sebagai pendulumnya akan berdampak besar. Pemuda pun memiliki sentuhan sosial dengan realitas sosial itu sendiri. Kedekatan sosial lembaga kepemudaan akan menyedot perhatian masyarakat lokal untuk terjun dalam pembangunan ekonomi kewirausahaan. Hasilnya, ke depan pembangunan modal sosial dan modal material beriringan dalam perimbangan kemajuan bangsa.

Model kewirausahaan berbasis komunitas pemuda memiliki keuntungan tersendiri, seperti jiwa muda, mau berkorban, gairah untuk belajar dan daya juang yang tinggi serta imajinasi dan improvisasi. Bentuk pengelolaan kewirausahaan kolektif semacam ini memiliki kesamaan dengan pengelolaan perusahaan. Pengelolaan ini mendayagunakan semua elemen yang terlibat di dalamnya. Setiap anggota dalam kewirausahaan adalah mata rantai yang saling terjalin.

Selain itu, kapasitas organisasi pemuda lokal ditumbuhkan dengan melakukan pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat pada tingkat bawah (seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok peladang) dan terhadap tokoh masyarakat, adat, agama, dan aparat desa/dusun. Tujuan pemerkuatan organisasi lokal untuk menjadikan mereka mampu merencanakan perbaikan lingkungan mereka, meningkatkan produktivitas, dan mampu bernegosiasi dengan pihak lain, melakukan kegiatan-kegiatan bersama

yang bermanfaat. Pemuda pedesaan menjadi tulang punggung penyedot animo masyarakat bergairah dalam kewirausahaan.

Masyarakat pedesaan adalah kelompok miskin yang secara ekonomi, sosial, dan politik paling rentan ditunggangi oleh orang dan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pedesaan perlu dilakukan dengan mengikutkan mereka dalam perencanaan program-program pembangunan serta menyertakan mereka sebagai pelaku aktif proses perubahan yang dilakukan dalam kewirausahaan. Oleh karena itu, mereka perlu mempunyai akses terhadap informasi tentang berbagai hal yang menyangkut kehidupan mereka, mendorong mereka mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok yang mampu menyuarakan kepentingan, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh pelaku-pelaku yang profesional, yang mempunyai kemampuan, komitmen, dan perhatian pada masyarakat pedesaan terpencil yang relatif kurang pendidikan. Berbagai teknik dan bentuk-bentuk prasarana dan sarana serta pola-pola pelayanan khusus perlu diciptakan.

Menurut Bob Widyahartono, ada beberapa faktor dinamisator yang memotivasi suksesnya proses suatu perusahaan. *Pertama* filosofi dan budaya perusahaan yang nil. *Kedua* "market niche" (relung pasar) yang disepakati bersama oleh kelompok inisiator. *Ketiga* kualitas barang atau jasa yang unggul dan membedakan dari pesaing. *Keempat* inovasi yang berproses dan keterikatan pada fokus dengan dukungan modal yang memadai.<sup>42</sup>

Fenomena perusahaan dunia yang mengglobal atau akrab disebut *multinational corporations* atau MNC's mempunyai sejarah yang panjang sampai bisa menguasai dan mengendalikan perekonomian dunia. Sebut saja beberapa di antaranya seperti Sony electronics, industri mobil Toyota, Honda, dan industri perangkat lunak komputer Microsoft, berangkat dari inisiatif perorangan dengan skala operasi yang kecil. Malahan di lingkungan tempat mereka berdiri dan beroperasi tidak dikenal. Kita harus mengakui bahwa fenomena demikian juga terjadi

---

<sup>42</sup> Ibid.

pada perusahaan nasional yang namanya dapat kita temukan di layar kaca lewat iklan-iklan jalanan dan sebagainya. Perusahaan sebesar Gudang Garam dan Kacang Garuda harus menjalani proses panjang untuk besar seperti sekarang dan mereka tidak dianggap oleh lingkungan kecilnya, tetapi tumbuh menjadi kelas menengah kemudian membesar melalui proses.

Kewirausahaan kolektif dengan manajemen berbasis komunitas dapat diandalkan. Kombinasi anggota di dalamnya merupakan komposisi dari anggota-anggota dengan talenta, energi, komitmen berinovasi sebagai suatu tim. Dari komunitas kecil ini interaksi mereka terbangun dari rasa percaya diri yang merata, dorongan bersama, dan masing-masing mereka mempunyai tanggung jawab yang sama pula. Dalam kewirausahaan kolektif, potensi dan keahlian, serta sifat dapat diandalkan (*skill and credibility*). Kalaupun keterampilan dan keahlian tiap anggota berbeda tingkat sangat manusiawi. Justru dengan keadaan demikian transfer pengetahuan akan terjadi dan mereka akan sama-sama mencerahkan satu sama lainnya.

Menurut Bob, kewirausahaan kolektif melalui kelompok semacam itu, selanjutnya harus ada pemberdayaan karyawan dengan mengandalkan "manajemen menengah". Bagi kelompok dan manajemen menengah yang diberdayakan, artinya harus tersedianya investasi dalam pemikiran berinovasi, sumber dana yang dibutuhkan dan waktu, termasuk menghargai waktu (*timing*) tanpa kebiasaan mengulur-ulur waktu.<sup>47</sup>

Menyoal dana yang diperlukan dalam kewirausahaan kolektif ini, pemerintah dan swasta bisa berperan besar. Dengan adanya alokasi anggaran pembangunan dari pemerintah baik pusat dan daerah, juga program *corporate social responsibility*, yang kini sudah menjadi undang-undang, dari perusahaan menjadi modal awal terbentuknya kewirausahaan. Komunitas sebagai aktornya memberikan sumber daya manusia.

Dengan dana yang ada dihimpun program wirausaha yang dapat dikembangkan komunitas bersangkutan. Beberapa hal yang perlu

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

dalam kewirausahaan kolektif ini. *Pertama* penguatan kelompok masyarakat sipil yang terdiri atas organisasi kepemudaan, dan karang taruna. Dalam hal ini pembangunan dan pemberdayaan berkesinambungan akan mudah dievaluasi di tingkat komunitas itu sendiri.

*Kedua* pelatihan tenaga kerja. Minim dan rendahnya pendidikan yang ada, tanpa terkecuali pemuda seperti di pedesaan, menjadi faktor utama yang memicu kegiatan berwirausaha ini tersendat. Oleh karena itu, semua pihak harus dilibatkan dalam pelatihan keterampilan kerja. Instansi pemerintah di sini harus mencontohkan pelatihan kerja bisa berlangsung. Agar lebih mudah, pemerintah menggandeng swasta dan perguruan tinggi. Kolaborasi pemerintah, swasta, dan civitas akademi akan melemahkan jalan bagi pemuda yang andal dalam meniti kewirausahaan ke depan.

*Ketiga* promosi produk wirausaha. Sejalan dengan meningkatnya pendidikan anggota komunitas wirausaha, produk yang dihasilkannya mengalami diversifikasi. Diversifikasi produk akan berharga jika promosi dan sosialisasi berjalan lancar. Sebagai salah satu keberhasilan sebuah produk adalah manajemen *marketing*-nya juga bagus. Lagi-lagi pelatihan dan pendampingan cara mempromosikan butuh kolaborasi semua pihak. Promosi akan mengenalkan konsumen terhadap produk dan produsennya. Hal ini lebih jauh akan berimplikasi kepada anggota komunitas kewirausahaan yang merasa bangga bahwa produknya diapresiasi. Dari sini muncul rasa percaya diri melakukan pembelajaran terhadap masyarakat lokal untuk terjun dalam kewirausahaan.

Jiwa kewirausahaan perlu tumbuh dan tidak hanya perlu dimiliki oleh masyarakat, tetapi juga oleh sumber daya manusia pemerintahan sebagai pelayan masyarakat yang disebut *entrepreneurial government* yang berbudaya inovatif/kreatif dan kompetitif untuk selalu *better, faster, and cheaper* dalam melayani masyarakat sesuai dengan misi pertanggungjawaban sosial (*social responsibility*). Andai saja semua organisasi kepemudaan dan elemen *civil society* aktif kembali memberdayakan organisasinya dalam segi kewirausahaan bukan tidak mungkin kemiskinan akan menyusut tajam.

## Penutup

Indonesia sebagai kesatuan politis yang mengidealkan kesetaraan dan kebersamaan dalam kondisi apa pun. Apa yang dibayangkan nasionalisme pada masa lalu kini tercerabut akibat dari proses pembodohan dan pemiskinan generasi muda saat ini. Meningkatnya angka pengangguran, putus sekolah, dan problem *deprivasi sosial* lainnya menyulut bara konflik antaretnis, agama, serta meningkatnya angka kriminalitas dan kekerasan sosial lain, sebagai bagian dari tercerabutnya nilai-nilai heroisme dan patriotisme kaum muda dalam mengisi kemerdekaan.

Pada akhirnya, jargon nasionalisme hanya berada di ruang hampa dan kosong. Padahal Indonesia sebagai sebuah komunitas terbayang (*imagined community*) sebagaimana pernah ditegaskan Ben Anderson, semestinya mampu diisi dengan suatu cita-cita etis mengenai kedaulatan (*sovereignty*) dan kesejahteraan, tegaknya prinsip kesetaraan dan kesamaan.<sup>46</sup>

Nilai-nilai nasionalisme kepemudaan yang dahulu memiliki semangat kecintaan pada patrianya dan semangat kepeloporan dalam upaya membangun kenegaraan (*state building*), semakin terkaburkan semangatnya. Hal ini terjadi ketika ketidakmenentuan ekonomi politik yang sudah sejak lama tidak mendapatkan jalan keluar dari keterpurukan. Situasi ini membawa sebagian nasib pemuda bersikap apatis terhadap kinerja negara yang ditakdirkan memberi ruang bagi pengembangan kreasi mereka. Oleh karena itu, mereka lari dan berbalik menjadi bersikap *unrepublikanisme* keindonesiaan. Hal ini terlihat ketika sebagian generasi muda di Kalimantan beberapa tahun yang lalu bergabung dalam Hizbul Wathan Malaysia hanya karena

<sup>46</sup> Benedict R.O.G. Anderson, 1991. *Imagined Community: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, hal. 47.

didasarkan jaminan keberlangsungan ekonomi mereka tidak terpenuhi oleh institusi negara.

Revitalisasi dan kontekstualisasi peran generasi muda menjadi penting, dalam rangka membangun etos kepemimpinan yang dibarengi dengan kemampuan *entrepreneurship* sehingga dapat menjadi alternatif bagi tumbuhnya etos kerja yang mandiri untuk mencapai kedaulatan generasi pemuda dalam mengarungi situasi globalisasi mutakhir.

Kebangkitan nasional yang dianggap sebagai sebuah momentum pada tahun 1908 merupakan titik yang sangat signifikan bagi kemunculan bangunan nasionalisme, dan kesadaran untuk bersatu, serta menyatukan keinginan bersama guna merekatkan elemen-elemen yang berbeda dalam satu naungan negara bangsa atas nama Indonesia.

Berawal dari momentum Kebangkitan Nasional 1908 tersebut, terdapat dua faktor yang sangat signifikan bagi investasi Indonesia. Pertama, pemuda yang menunjukkan peran dan eksistensinya secara jelas untuk menjadi lokomotif perubahan yang heroik bagi tercapainya kemerdekaan dan perjalanan kenegaraan serta kebangsaan Indonesia pascakemerdekaan.

Pada konteks tersebut menegaskan bahwa pemuda memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perubahan dan menciptakan sejarah baru bangsa atau menjadi *trend setter* sejarah Indonesia. Hampir seluruh sejarah yang tercipta di negeri ini dilakukan atas peran serta pemuda, seperti gerakan tahun 1908, 1928, 1945, 1966 hingga tahun 1998. Fenomena tersebut menunjukkan betapa signifikannya keberadaan pemuda dalam konteks keindonesiaan.

Dari gugusan sejarah Indonesia yang tidak boleh dilupakan bahwa kontribusi terbesar terbentuknya sejarah Indonesia karena adanya komitmen dan kesadaran yang tulus pemuda pada masa lalu. Akan



Sumber: [www.wilafreda.com](http://www.wilafreda.com)

Hampir seluruh sejarah di negeri ini dilakukan oleh pemuda sebagaimana halnya dengan reformasi Indonesia.

tetapi, kita tidak berharap roda sejarah harus terhenti karena pemuda Indonesia hari ini kehilangan vitalitas ekspresi dalam perubahan keindonesiaan, guna menghadapi tantangan kesejarahan yang semakin berat, dan cenderung semakin masif dan dinamis.

Kedua, dari lembaran sejarah Indonesia berikutnya, secara faktual tertoreh kontribusi daerah-daerah dalam proses terbentuknya dan terpeliharanya konstruksi nasionalisme Indonesia. Melalui peran, komitmen, dan kesadaran yang tulus dari daerah bingkai persatuan dan kesatuan nasional terbentuk. Persatuan dan kesatuan nasional merupakan kerangka mewujudkan kemerdekaan dan memaknai arti kemerdekaan itu sendiri. Selain itu, persatuan dan kesatuan nasional dianggap sebagai pijakan bagi pembangunan bangsa yang menghimpun secara harmonis elemen-elemen daerah dalam tujuan dan cita-cita bersama, yaitu memajukan Indonesia, dapat disepakati, dan diimplementasikan secara bersama.

Komitmen dan ketulusan daerah dalam proses terbangunnya bangsa ini sangat tidak pantas untuk dipertanyakan kembali. Goresan tinta sejarah bangsa teramat berarti bagi komponen bangsa terutama daerah. Eksistensi daerah saat ini tengah menampakkan keceriaan yang sebelumnya tampak kusam akibat paradigma kekuasaan masa lalu, yang memersepsi lahan sosial Indonesia dalam bingkai homogenisasi.

Pola tersebut selanjutnya menempatkan entitas daerah dengan segala bentuk, simbol, dan aktivitasnya sebagai sebuah ancaman bagi ikatan nasionalisme atau integrasi nasional. Mungkin penerapan kebijakan homogenisasi tersebut dianggap tepat, lantaran paham kedaerahan yang sempit terbukti di banyak negara menimbulkan persoalan yang berimplikasi tidak hanya pada ancaman persatuan dan kesatuan nasional, tetapi juga terjebak dalam konflik sosial antaretnis berkepanjangan, yang akhirnya memporandakan bangunan sejarah suatu bangsa.

Akan tetapi, setelah beberapa waktu berjalan daerah dapat menikmati "kebebasannya" dari kooptasi sentralisasi yang berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, nyatanya belum berada dalam posisi yang kondusif. Dalam beberapa peristiwa masih didapat-

kan kecenderungan yang mempertentangkan pusat dan daerah. Keadaan ini memunculkan kecenderungan dekonstruksi nasionalisme dan bukan reformulasi nasionalisme yang menawarkan wajah nasionalisme yang lebih baik.

Mungkin fenomena tersebut sebagai akibat apresiasi dan kepentingan daerah yang belum terakomodasi dalam ruang yang semestinya sehingga kecenderungan-kecenderungan mengurangi dominasi kekuasaan pusat atas daerah tidak bisa dihindari. Memang dalam beberapa hal, sering dipandang melebihi takaran yang seharusnya.

Peringatan Seabad Kebangkitan Nasional tahun ini (2008), idealnya mampu mengantarkan komponen bangsa pada kontemplasi terhadap eksistensi nasionalisme yang tengah berada dalam ancaman. Nasionalisme kita tengah berada dalam ancaman, paling tidak diindikasikan semakin panjangnya deretan persoalan kebangsaan, seperti besarnya utang luar negeri, fenomena memudarnya rasionalitas, dan praktik kriminalitas sosial yang terus diperagakan dalam lahan sosial Indonesia sehingga muncul sebutan *Republic of Horror* atau *Republic of Fear*, menuntut Indonesia untuk memiliki yang disebut nasionalisme baru atau paling tidak merevitalisasi nasionalisme kita yang sesungguhnya dibutuhkan bangsa ini untuk menjadi sebuah keniscayaan.

Langkah ini barangkali bisa menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan sumbangan penting untuk turut meminimalisasi pesimistis yang melanda sebagian besar warga negara agar menempatkan kembali nasionalisme sebagai sesuatu yang dipahami bersama dalam berbangsa dan bernegara serta mempertahankan nasionalisme dari implikasi negatif globalisasi politik dan ekonomi.

Nasionalisme baru yang hendak ditumbuhkan, selain didorong kecenderungan adanya dekonstruksi berbagai hal, pada sisi lain dalam konteks keidealan, Indonesia memang belum menemukan bentuk nasionalisme yang "konkret", selalu berada dalam tahapan "pencarian bentuk" (metamorfosis).

Dalam pergumulan wacana seputar nasionalisme sejumlah ahli, semisal Cornelis Lay, mengungkapkan posisi nasionalisme yang terimpit oleh dua kekuatan mahabesar, yaitu globalisasi dengan logika dan asumsi-asumsi universalitas, uniformitas, dan sentralisasi dengan etnonasionalisme yang berjalan ke arah sebaliknya.

Di tengah impitan arus besar tersebut, nasionalisme baru Indonesia seharusnya memiliki cita-cita bersama yang dirumuskan dalam *good society*, dengan memaknai masa lalu dan merumuskan masa depan dalam kesatuan gerak masa kini. Untuk menopang proyeksi tersebut, alangkah baiknya mempertajam prinsip kewarganegaraan (*citizenship*), yang memiliki daya seduksi yang sangat besar dalam memenuhi hasrat setiap komunitas dan umat manusia atas persamaan.

Mengapa *citizenship* layak mendapat perhatian dalam kerangka memperkuat nasionalisme? Paling tidak, *citizenship* merepresentasikan kehendak untuk mengusung partisipasi kualitatif masyarakat, guna mencapai *civil society*. Barangkali kita sepakat bahwa tidak ada satu pun negara maju yang tidak berlandaskan masyarakat yang kualitatif dalam segala hal.

Dengan demikian, mulai hari ini dan ke depan, kita harus kembali membenahi anyaman sejarah bangsa yang terkoyak di beberapa bagian. Membangun kembali keindahan sejarah melalui jalinan harmonis seluruh kekuatan bangsa, termasuk elemen-elemen daerah. Upaya mengonstruksi keindonesiaan kita baik merupakan sesuatu yang sangat mungkin, seperti yang pernah dibuat pada tahun 1908,<sup>49</sup> mampu mengumandangkan ikrar kebangsaan yang menjadi embrio kebangkitan nasional, dengan kekuatan nasionalisme kepemudaan kita.

Potret nasionalisme kaum muda Indonesia tempo dahulu adalah sebuah spirit nasionalisme yang tidak hanya sebatas wacana dan komitmen di atas tinta, tetapi segenap jiwa dan raganya seakan dipersembahkan untuk *patrienya*. Hingga mati pun jika itu adalah perjuangan kebangsaan, kita hadapi dengan tidak gentar karena perasaan mati dan hidup sudah menjadi satu jiwa yang tidak dapat dijauhkan.

Seiring dengan bergulirnya waktu, tidak selamanya tradisi jiwa nasionalisme dan patriotisme terus bergema layaknya generasi awal pemuda Indonesia dahulu. Sumpah Pemuda dianggap sebagai perwujudan rasa kedalaman nasionalisme dan patriotisme yang sekian lama berada dalam cangkeraman rezim tirani koloni Belanda. Akan

---

<sup>49</sup> Christianto Wibisono, dkk. 1982. *Sejarah Pergeseran Pemuda di Indonesia: Periode Mempertahankan Kemerdekaan*, Dep. P & K, hal. 98.

tetapi, sejarah mengukir ada banyak pengikitan dan tersitanya nilai-nilai nasionalisme kaum pemuda saat ini.

Organisasi kepemudaan cukup berkembang dan banyak di negeri ini, tetapi membludaknya organisasi tidak dapat dijadikan ukuran rasa nasionalisme dan patriotisme pemuda. Banyak organisasi hanya dijadikan sebagai kendaraan politik untuk menaki tangga kekuasaan. Organisasi tidak lagi sebagai wadah advokasi dan emansipasi, tetapi lebih pada hal-hal yang pragmatis dan hedonis.

Ketika organisasi sudah tidak ditopang dengan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang mendalam, tidak heran setelah duduk di tampuk kekuasaan banyak penyimpangan amanah yang dilakukan. Tidak demi tanah dan untuk tanah air yang mereka pikirkan, tetapi mengutamakan kepentingan diri sendiri dan keluarga menjadi target utama.

Rasa memiliki satu jiwa dan raga di bumi Nusantara seharusnya menjadi fondasi untuk seseorang dalam berkarier, terutama politik. Kekeroposan jiwa nasionalisme dan patriotisme justru akan membawa petaka terhadap masa depan bangsa. Tugas pemuda saat ini adalah melakukan advokasi dan emansipasi terhadap rakyat miskin yang termarginalkan akibat kejahatan struktural.

Berkibarnya lambang Merah Putih benar-benar dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Inilah wujud dari nasionalisme yang kontekstual, yaitu nasionalisme dan spirit republikanisme dipahami sebagai bentuk advokasi dan emansipasi bagi masyarakat yang masih terjerebab dalam jeram kemiskinan.<sup>59</sup> Musuh besar nasionalisme masa kini adalah kemiskinan dan keterbelakangan.



Sumber: [www.temposia.com](http://www.temposia.com)

**Kemiskinan satu musuh besar bangsa yang harus dihadapi kaum muda.**

<sup>59</sup> Robertus Robert, 2007, *Republikanisme Keindonesiaan*, Jakarta: Marjin Kin, 2007, hal. 19

# Glosarium

**anakronitis**

tidak cocok dengan zaman tertentu

**eksploitasi**

pemanfaatan untuk keuntungan sendiri

**hedonisme**

pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup

**heroisme**

keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran serta kepahlawanan

**idealisme**

hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita atau patokan yang dianggap sempurna

**imperialisme**

sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan lebih besar

**imperatif**

bersifat memerintah dan memberi komando

**kolonialisme**

paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud memperluas negara itu

**kompresi**

pemberian tekanan yang tinggi masif utuh dan padat

**patriotisme**

sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya

**pesimisme**

paham yang beranggapan atau memandang segala sesuatu dari sudut buruknya

**pragmatisme**

kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia

**revitalisasi**

proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali

## Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict R.O.G. 1991. *Imagined Community: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. Ithaca, N.Y: Cornell University Press.
- Anderson, Benedict R.O.G. 1990. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca, N.Y: Cornell University Press.
- Anderson, Benedict R.O.G. 1976. *Revolusi Pemuda*. Bandung: Grafiti.
- Darwanto, Herry. *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis-kan Masyarakat Terpencil*. Artikel dalam [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)
- Fowler, Alan. *NGDOs as a Moment in History: Beyond Aid to Social Entrepreneurship or Civic Innovation*. Artikel dalam jurnal *Third World Quarterly*.
- Hertantyo, Rizki Aji. 2007. *Membaca Pola Kemiskinan, Suatu Analisa Menuju Pemberdayaan*. Makalah Seminar Kemiskinan.
- Ingleson, John. 1983. *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927–1934*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM. *Revitalisasi Koperasi dan UKM sebagai Solusi Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan*. Edisi 2007.
- Laporan Indeks Pembangunan Manusia UNDP 2007–2008.
- Latif, Yudi. 2002. *Revolusi Demokratik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Leela Gandhi. 2001. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Terjemahan. Yogyakarta: Qalam.
- Majalah INFO SOCIETA. 2006. Edisi khusus Kemiskinan.
- Partanto, Pius A. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Paskarina, Caroline. 2007. *Pembangunan Manusia Berbasis Investasi Sosial*. Makalah.
- Prawiro, Radius. 1998. *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action*. Oxford: Oxford University Press.

- Rawls, Jhon. 1996. *Political Liberalism*. Columbia: Columbia University Press.
- Riyanti, Benedicta P. Dwi. 2006. *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasilan Usaha Skala Kecil di DKI dan DIY*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana UI.
- Robert, Robertus. 2007. *Repukanisme Keindonesiaan*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Rubrik Catatan DR. Sujana Royat (Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ). *Majalah KOMITE*, (edisi 10/V, 5 Oktober 2007).
- Sach, Jeffrey D. 2005. *The End of Poverty: How We Can Make It Happen in Our Lifetime*. London: Penguin Books.
- Schumpeter, Joseph Alois. 1983. *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Chicago: Chicago University Press.
- Soedjatmoko. 1954. *Economic Development as a Kultural Problem*. Cornell: Cornell University.
- Soedjatmoko. 1998. *Etika Pembebasan*. Jakarta: LP3ES.
- Suharto, Edi. 2008. *Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Menangani Kemiskinan di Tanah Air*. Jakarta: LP3ES8.
- Sukriyanto. *Model-Model Pengembangan Masyarakat dalam Era Kekinian*. Makalah.
- Swasono, Sri Edi. 2007. *Strategi Kebudayaan dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*. Makalah.
- Syahyuti. *Penerapan Pendekatan Pembangunan Berbasis Komunitas*. Paper Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Lih.
- Utama, Ade Adriansyah Utama. 2008. *Reorientasi dan Rekonstruksi Pemuda Indonesia; Pemuda Harapan Bangsa, Tawaran Konsep Strategis Membangun Keunggulan*. Makalah Pribadi.
- Wibisono, Christianto dkk. 1982. *Sejarah Pergerakan Pemuda di Indonesia: Periode Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Widyahartono, Bob. *Jiwa Kewirausahaan Baru: Dari Individual ke Kolektif*. Artikel dalam Antara News, 2 Februari 2008.



Lahir di Jakarta, 1 Oktober 1977, Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Chavchay Syaifulah dikenal sebagai penyair, esais, cerpenis, dan novelis. Buku-bukunya yang sudah terbit yaitu *Muttatuli Tak Pernah Mati* (Kumpulan Puisi, Penerbit Sapulidi, 2000), *Payudara* (Novel Filsafat, Penerbit Melibas, 2004), *Sendalu* (Novel Pemerkosaan, Penerbit Kompas, 2006), *Perlawanan Binatang Jalang* (Esai, Penerbit Melibas, 2006), dan *AOTAR* (Novel Sejarah, Penerbit ILDEN, 2006). Kini selain bekerja sebagai sastrawan dan wartawan, ia juga aktif di Kelompok Penyanyi Jalanan Rangkasbitung (KPJ-R), Forum Bangkit Indonesia (FBI), Indonesian Studies and Advocacy Center (ISAC), Lintasan Kalam (Link), dan Sindikasi Generasi Muda Indonesia (SGMI).



# General Muda Menolak Kemiskinan

Ma.08.17

MAN 11

